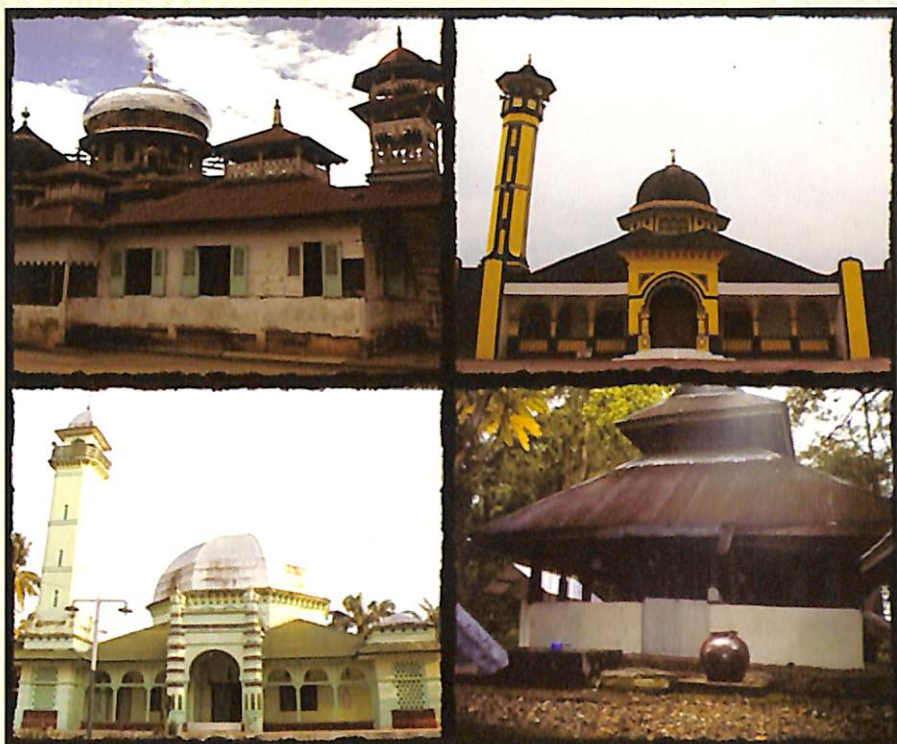


Kisah Mesjid

Dari Dua Provinsi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA BANDA ACEH

**KISAH MESJID DARI DUA PROVINSI:
PEMETAAN MESJID-MESJID
BERSEJARAH
DI ACEH DAN SUMATERA UTARA**

Editor:

Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad

Tim Penulis:

Cut Zahrina

Dahlia

Fariani

Muhammad Affan

Nasrul Hamdani

Sudirman

Titit Lestari

**BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA
BANDA ACEH
2014**

Hak Cipta 2014 pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara menggunakan foto copy, tanpa izin sah dari penerbit.

Pengarah :
Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh

Editor:
Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad

Tim Penulis:
Cut Zahrina
Dahlia
Fariani
Muhammad Affan
Nasrul Hamdani
Sudirman
Titit Lestari

Kisah Mesjid Dari Dua Provinsi: Pemetaan Mesjid-Mesjid Bersejarah di Aceh dan Sumatera Utara

ISBN : 978-602-9457-46-9

Desain Sampul : Muhammad Faiz Basyamfar
Setting/Layout : Miftah Roma Uli Tua

Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh
Jl. Twk. Hasyim Banta Muda No. 17 Banda Aceh 23123
Telp. 0651-23226/ Fax. 0651-23226
Email : bpnbbandaaceh@yahoo.com

SENARAI ISI

Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	v
Sambutan Direktur Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	viii
Kata Pengantar	x
BAB 1	
Mencari Akar Sejarah Mesjid-mesjid Bersejarah di Aceh dan Sumatera Utara: Sebuah Catatan Lapangan	1
BAB 2	
Aceh dan Sumatera Utara: Dua Lapangan Penelitian yang Istimewa	13
BAB 3	
Ragam, Langgam dan 'Nasib' Mesjid-mesjid Bersejarah di Aceh dan Sumatera Utara	36
Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh: <i>Icon</i> Aceh di Dunia	40
Mesjid Jami' Indrapuri: 'Mesjid Asli Indonesia'	49
Cerita Dua Mesjid di Pulau Simuelue : Mesjid Babussalihin dan Babul Khair	54
Mesjid Gunong Kleng	60
Mesjid Tengku Di Kila	65

Tiga Mesjid Tua di Aceh Selatan.....	72
Mesjid Raya Nurul Huda Gosong Telaga.....	82
Mesjid Raya Sultan Ahmadsyah Tanjung Balai: 'Yang Tersisa' dari Perang 1865.....	87
Mesjid Raya Tanjung Pasir Kualuh : 'Monumen' untuk Yang Dipertuan Kualuh Terakhir	110
Mesjid Raya Nurul Yaqin Gunting Saga : 'Mesjid Umat' di Tepi Sungai Kualuh.....	124
Mesjid Lama Tanjung Medan : Kisah Tengku Nong Hamzah dan Revolusi di Kampung Raja	133
Mesjid Besar Kota Pinang : Menuju Mesjid Agung Kota Pinang	144
Kisah Dua Mesjid Agung : Mesjid Agung Rantau Prapat dan Mesjid Agung Kisaran.....	156
BAB 4	
Catatan Penutup	165
Senarai Bacaan	171
Senarai Informan.....	177

SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Akhir-akhir ini timbul gejala bahwa masyarakat termasuk generasi muda kurang memperhatikan sejarah masa lampau. Mereka lebih berorientasi kepada masa kini dan masa yang akan datang. Masa lampau dianggap sebagai sesuatu yang telah berlalu dan kurang bermakna. Mereka kurang menyadari bahwa sejarah bukanlah sesuatu yang lampau saja, tetapi yang selalu aktual, selalu hidup, dan sebenarnya juga mempunyai suatu ikatan antara masyarakat tersebut dengan masa lampau. Oleh karena itu, dapat diperkirakan bahwa pada suatu saat masyarakat tersebut akan terlepas dari akar kehidupan yang telah memberikan identitas bangsa, yaitu warisan masa lampau. Hal yang demikian tentu akan berakibat negatif terhadap pelaksanaan pembangunan bangsa.

Berkaitan dengan kehidupan sosial bangsa Indonesia yang sedang membangun, kedudukan dan peranan sejarah dan budaya sangat penting. Pengetahuan sejarah dan budaya sangat diperlukan bukan sekedar sebagai sumber pengetahuan yang inspiratif, tetapi sebagai pedoman untuk berkarya di hari kini, serta menciptakan hari depan sesuai dengan cita-cita serta nilai luhur masyarakat Indonesia. Pentingnya arti sejarah dan budaya bagi masyarakat kita menjadi lebih kuat kalau diingat bahwa masyarakat kita merupakan masyarakat majemuk. Hal yang demikian itu memerlukan kesabaran, ketekunan, dan penuh pengertian yang baik di antara penyelenggara pemerintahan maupun anggota masyarakat. Untuk mendukung misi tersebut, diperlukan data dan informasi yang memadai tentang sejarah dan budaya masyarakat Indonesia.

Selain itu, kesejarahan dan kebudayaan juga dapat menjadi salah satu media penting dalam membentuk jiwa, sikap, dan pola tingkah laku masyarakat Indonesia. Namun, di kala memuncaknya bahan bacaan dan informasi yang kurang

mendidik akibat negatif dari globalisasi informasi, posisi sejarah dan budaya yang sesungguhnya banyak mengandung nilai edukatif tampaknya sudah begitu terdesak. Bahan-bahan bacaan baru, berupa roman, komik, surat kabar, majalah, media elektronik, serta jenis-jenis hiburan lain sudah merampas waktu yang biasa dipakai guna mempelajari dan memahami sejarah dan budaya. Peranan sejarah dan budaya lokal sebagai salah satu sumber nilai masyarakat sudah semakin menipis.

Terbitnya buku ini merupakan suatu sumbangan penting di tengah-tengah perjuangan kita mensukseskan pembangunan tanah air. Apalagi di dalam buku ini terdapat uraian-uraian mengenai masalah-masalah pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan kepentingan rakyat. Saya yakin bahwa tujuan penerbitan buku ini sebagai upaya ke arah peningkatan kesadaran masyarakat menanggulangi tugas-tugas nasional mereka yang besar dalam periode pembangunan ini. Oleh karena itu, buku ini bukan hanya penting bagi masyarakat Aceh dan Sumatera Utara, tetapi penting, diperlukan, dan menjadi milik bangsa Indonesia. Mengenal sejarah dan budaya rakyat Aceh dan Sumatera Utara merupakan bagian dalam usaha mengenal sejarah dan budaya Indonesia. Untuk itu, buku ini sangat layak diterbitkan sebagai buku bacaan bagi masyarakat.

Saya yakin, apabila setiap daerah dapat pula menyusun dan menerbitkan buku-buku semacam ini maka semakin banyak unsur-unsur sejarah dan budaya Indonesia yang kini belum diketahui akan dapat diungkapkan dan dikembangkan ke depan. Dengan demikian, kita lebih kaya akan bahan-bahan yang diperlukan untuk mempelajari dan mengenal identitas bangsa kita sendiri dan historis kulturilnya, suatu hal yang mutlak diperlukan bagi pembangunan bangsa. Terlepas dari berbagai kekurangan, tentu lebih banyak kelebihannya yang dapat diambil manfaat dari buku ini. Selain menambah informasi tentang sejarah dan budaya, juga memperkaya khazanah literatur tentang daerah. Dengan demikian, ia diharapkan dapat dijadikan masukan, baik untuk kepentingan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan maupun untuk memperluas wawasan masyarakat

tentang negara dan bangsanya. Untuk itu, dengan rasa senang dan bangga, saya menyambut terbitnya buku ini.

Banyak pihak yang telah membantu sehingga karya tulis ini dapat disajikan seperti ini, terutama pihak Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Kemendikbud yang berinisiatif menerbitkan buku ini. Demikian pula pihak Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh yang telah menyiapkan naskah untuk penerbitannya. Untuk itu, kami menyampaikan ucapan terima kasih. Kita berharap buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Jakarta, November 2014
Direktur Jenderal Kebudayaan

Prof. Kacung Marijan, Ph.D.

SAMBUTAN
KEPALA BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA BANDA ACEH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Indonesia merupakan sebuah bangsa yang terdiri dari beribu pulau dengan beraneka ragam suku bangsa. Keanekaragaman suku bangsa yang mendiami berbagai daerah di Indonesia melahirkan keanekaragaman budaya yang berbeda-beda. Berbagai macam budaya tersebut lahir dari hasil kreativitas masyarakat di Nusantara sejak zaman dahulu sampai sekarang. Keanekaragaman budaya tersebut juga memperlihatkan kekayaan yang tanpa batas, salah satunya adalah mesjid.

Mesjid merupakan pusat segala kegiatan bagi umat Islam. Mesjid bukan hanya pusat ibadah khususnya seperti sholat dan i'tikaf tetapi merupakan pusat kebudayaan atau muamalat tempat dimana lahir kebudayaan Islam yang demikian kaya dan berkah. Mesjid yang ada di Nusantara telah melewati rentetan sejarah yang sangat panjang diawali ketika proses islamisasi, kemudian Islam mengalami perkembangan seiring dengan lahir dan berkembangnya kerajaan Islam hingga mesjid juga sebagai pusat perjuangan mengusir penjajah. Sehingga mesjid bagi umat Islam merupakan kebutuhan mutlak yang harus ada.

Buku kisah mesjid dari dua provinsi ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh dalam upaya untuk menggali nilai sejarah dan filosofi yang terkandung pada tiap-tiap mesjid yang dimiliki oleh masyarakat Aceh dan Sumatera Utara. Tergalinya nilai tersebut akan membawa kepada sebuah pemahaman terhadap budaya islami yang berkembang pada tiap tahapan sejarah yang diwakilinya. Sehingga akan terungkap nilai historis, filosofis dan juga nilai persebaran Islam bagi daerah ini dalam melestarikan salah satu *icon* kebudayaan agar tidak lapuk ditelan zaman. Untuk itu, setelah selesainya penelitian ini kami mengucapkan terima kasih kepada peneliti, konsultan, editor dan informan,

serta pihak-pihak terkait lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas kontribusinya baik selama penelitian maupun penulisan.

Kritik dan saran sangat kami harapkan dari seluruh pembaca agar hasil penelitian menjadi layak secara ilmiah dan menggambarkan realitas yang sesungguhnya yang ada pada masyarakat Aceh dan Sumatera Utara. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat dalam rangka pengembangan nilai sejarah religi yang terkandung dalam mesjid yang kami sajikan.

Banda Aceh, November 2014
Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya
Banda Aceh



Irini Dewi Wanti, SS. M.SP.
NIP. 19710523 199601 2001

KATA PENGANTAR

MASJID SEBAGAI PUSAT IBADAH DAN KEBUDAYAAN MASYARAKAT

Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad

Pada awal tahun 1960-an terbitlah sebuah buku karangan seorang penulis terkenal waktu itu Drs. Sidi Gazalba, *Masjid sebagai Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*. Gagasan pokok yang disampaikan Gazalba adalah agar umat mengembalikan fungsi masjid tidak hanya sebagai pusat kegiatan ibadah ritual semata-mata, tetapi juga menjadi sentral berbagai kerja pembangunan dan kesejahteraan umat dalam bidang sosial, ekonomi, kesehatan, kebudayaan bahkan politik sekalipun. Jadi semua aspek kehidupan masyarakat umat Islam haruslah dijalankan dengan berbasis kepada masjid. Kira-kira seperti itulah ide utama buku tersebut. Dalam beberapa *training* yang saya ikuti sebagai pelajar dan mahasiswa pada akhir 1960-an sampai pertengahan tahun 1970-an gagasan Gazalba tersebut sangat bergema. Dan dari kenangan terhadap buku Gazalba itulah saya terinspirasi untuk menulis pengantar buku ini.

Memang selama ini kadang-kadang ada kesan masjid di negeri kita, banyak yang agak jauh dari derap pembangunan yang sedang giat-giatnya dipacu, apalagi diajak serta berbicara tentang peningkatan kerja pembangunan dan kesejahteraan, termasuk misalnya penguatan wawasan umat dalam bidang sosial, ekonomi dan kebudayaan. Yang lebih menyedihkan jika memang ada, sengaja atau tidak, upaya marginalisasi karena dianggap tidak banyak menyumbang bagi pembangunan masyarakat. Bahkan yang lebih berbahaya jika masjid atau lembaga-lembaga keagamaan umat malah dicurigai sebagai tempat persemaian bibit-bibit pemikiran yang menjadi antitesis wawasan pembangunan dan persatuan nasional. Boleh jadi kesan atau anggapan ini dipengaruhi oleh semacam beban sejarah, bagaimana masjid atau pesantren tertentu mungkin pernah digunakan sebagai sarana atau basis pemberontakan di

Aceh pada masa lalu, atau pada waktu yang lain, mungkin juga di tempat lain, lembaga tersebut dinilai menyebarkan pemikiran konservatif, ekstrem, radikalisme atau malah paham terorisme. Saya sendiri tidak tahu, tapi mungkin saja ini terjadi.

Namun di sini perlu diperhatikan kemungkinan bahaya sesat pikir (*logical fallacy*) yang dapat merusak persatuan bangsa akibat generalisasi secara tidak semena-mena. Inilah yang dalam istilah filsafat disebut sebagai kesalahan pemikiran "*pars pro toto*", artinya: apa yang terjadi pada sebagian, lalu dianggap terjadi pada seluruhnya. Atau mungkin pernah terjadi di masa lalu, kemudian digeneralisasi sampai pada masa sekarang ini, atau bahkan sepanjang masa (?). Padahal sebenarnya lembaga-lembaga keagamaan termasuk masjid justru menyimpan potensi besar sebagai tempat untuk menyemai bibit-bibit kedamaian, keharmonisan dan menanamkan wawasan cinta kebangsaan dan tanah air.

Pembangunan di bidang keagamaan pada hakekatnya sekaligus merupakan pembinaan ketahanan moral anak bangsa, moral yang tahan berbagai godaan duniawi, godaan korupsi, kolusi dan nepotisme yang masih melilit bangsa Indonesia sekarang ini. Ini semua adalah bagian yang integral dari pembangunan nasional. Suksesnya pembangunan di bidang ini akan membantu keberhasilan pembangunan nasional pada umumnya. Sebaliknya kegagalan pembinaan bidang moral justru akan merusak pembangunan nasional secara keseluruhan. Sepatutnya masjid dan lembaga-lembaga keagamaan yang begitu banyak di negeri ini dapat menjadi aktor penting yang berperan sebagai benteng penjaga moral anak bangsa sekaligus sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat kita. Mengapa potensi semacam itu seperti dibiarkan tersia-sia?

Sebuah masjid di Aceh dulunya terdapat satu pada setiap kemukiman dan *meunasah* terdapat satu di setiap desa. Namun, sekarang tidak jarang di sebuah permukiman terdapat dua atau tiga buah masjid, suatu hal yang dapat dijadikan salah satu ukuran kegairahan beragama dalam masyarakat. Bahkan di tempat saya, Kampus Kopelma Darussalam, Banda Aceh terdapat

lima masjid dan belasan “meunasah”, tempat ibadah kecil yang multi guna, yang biasa juga dimanfaatkan sebagai tempat belajar, diskusi dan pembinaan mental bahkan kadang-kadang juga menjadi tempat untuk merancang demonstrasi mahasiswa. Boleh jadi ini juga semacam modifikasi gagasan Gazalba sebagai yang dikutip di awal tadi, meskipun buku-buku Gazalba sekarang ini sudah jarang sekali terlihat di perpustakaan.

Sebuah masjid yang dikelola dengan baik dengan pendekatan manajemen modern, yang disebut dengan istilah khas *‘imarah* (dari kata ini muncul istilah: memakmurkan masjid), berpotensi untuk membentuk ummat yang bersatu, memiliki kepribadian kuat dan berakhlak mulia. Mimbar masjid dapat menjadi sarana untuk mendorong pemikiran ke arah kemajuan. Dan dengan pendekatan serta bahasa yang sejuk dan bernas, dari mimbar masjid justru mudah disampaikan pesan-pesan kedamaian dan seruan wawasan pembangunan serta persatuan dan kesatuan bangsa. Suara azan yang bergaung lima kali sehari ditujukan agar ummat sekitarnya secara sukarela berkumpul dalam tempat yang mulia itu bersatu dalam satu jamaah dengan tujuan yang sama, menyembah Allah SWT, menyucikan jiwa dan raga, bermohon dan bermunajat kepada-Nya guna keselamatan dunia dan akhirat. Di tempat ini hilang perbedaan derajat, sirna perbedaan pangkat, keturunan, warna kulit, kekayaan dan sebagainya. Semuanya sama, bersatu tunduk di bawah satu jama’ah dan satu imamah.

Terutama di pedesaan, di mana media dakwah lainnya masih sangat kurang, maka fungsi masjid sebagai media penyeru umat dan sarana komunikasi yang efektif memegang peranan penting. Seruan yang datang dari tempat ini adalah seruan yang suci yang diucapkan di tempat suci, oleh orang yang telah bersuci dan mestinya keluar dari jiwa dan hati yang suci pula. Jika selama ini terasa ada kesenjangan antara bunyi seruan yang terdengar, misalnya malah bertentangan dengan semangat persatuan dan kesatuan yang diharapkan, maka perlu dilakukan introspeksi lebih mendalam di mana letak problematikanya,

bukanlah medianya yang dipersalahkan atau malah ummatnya yang dijauhi atau dipinggirkan.

Fungsi lain masjid yang tidak kurang pentingnya adalah sebagai media pendidikan umat yang berlangsung secara kontinyu, tak pernah absen dan tidak mengenal hari libur. Orang yang hubungannya dekat dengan masjid, dekat pula kemungkinannya menjadi muslim yang taqwa, yang dalam melaksanakan amar makruf nahi munkar, timbul dari kesadaran jiwa. Masyarakat yang tercerahkan semacam ini sepatutnya juga dekat dengan semangat kedamaian, semangat pembangunan dan semangat hidup untuk mencapai cita-cita bersama.

Selain itu masjid juga dapat berfungsi memberi gairah hidup dan gairah kerja bagi ummatnya berupa dorongan motivasi batiniah yang melandasi cita-cita dan amal perbuatan mereka. Terutama dalam zaman yang penuh erosi seperti sekarang ini, kekurangan motivasi ruhaniah dalam setiap tindak-perbuatan kadang-kadang sangat terasa. Mungkin banyak orang-orang *workaholic* yang bekerja keras, lupa waktu, lupa anak, lupa isteri. Tapi mari coba diperiksa, dorongan apa yang membuat mereka seperti itu? Boleh jadi untuk mendapatkan kekayaan yang lebih besar, atau kekuasaan atau jabatan atau hal-hal duniawi semacam itu. Tapi banyak orang yang justru merasa kosong jiwanya setelah itu. Karena semakin dikejar semakin jauh benda-benda itu berlari. Kebahagiaan yang hendak dicapai semakin jauh saja. Oleh karena itu motivasi keimananlah yang perlu ditanamkan lebih dulu. Agama memang mengajarkan untuk bekerja keras dan bersungguh-sungguh. Tapi kerja keras dengan batasan dalam niat baik bahwa setiap perilaku atau perbuatan bukan hanya mempunyai ganjaran di dunia, tetapi juga memperoleh balasan di akhirat.

Ada lagi potensi agama yang penting dapat digali dari mimbar masjid, yakni potensi kreatif yang memberikan dorongan kepada manusia, bukan saja untuk melakukan kerja produktif, melainkan juga mendorong mereka untuk bekerja kreatif dan inovatif, misalnya dengan mendalami terminologi *ijtihad*. Yakni bekerja dengan penuh daya cipta dan kreasi yang

bermanfaat serta usaha-usaha pembaharuan dan penyempurnaan. Dalam hal ini terkenal sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang masyhur yang maknanya kira-kira, beranilah mengambil resiko dalam bekerja, jika *ijhtihad* atau kreasi anda benar, anda mendapatkan dua pahala, tapi jika *ijhtihad* anda gagal anda tetap mendapat satu pahala.

Bukankah ajaran al-Qur'an sendiri menyuruh manusia untuk berpikir selalu berusaha membuka rahasia alam? Berpikir dan berusaha mengambil *i'tibar* (pelajaran) dari keajaiban alam adalah dorongan agar manusia kreatif dan terus menerus menimba ilmu pengetahuan. Demikian juga dalam mengajarkan kedamaian, kemanusiaan serta kesejahteraan dan pembangunan, terminologi agama dapat digunakan untuk meyakinkan ummat bahwa itu semua adalah inheren dengan ajaran Islam

Masjid sepatutnya dapat menempa potensi integratif ummat, yakni upaya memadukan segenap aktifitas manusia sebagai individu, sebagai anggota masyarakat dan sebagai insan yang taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan dan penghayatan terhadap agama akan menghindarkan manusia dari situasi kepribadian yang goyah dan terpecah (*split personality*), sehingga kembali pada kepribadiannya yang utuh. Dengan demikian ia dapat diharapkan lebih kuat dalam menghadapi berbagai tantangan dan segala macam cobaan hidup dan kehidupan yang dapat mencabik-cabik kehidupannya.

Dari mimbar masjid pula dapat diarahkan upaya untuk mengkoduskan dan mensyahdukan segala kegiatan manusia, bukan hanya kegiatan keagamaan, tetapi juga segala usaha dan kegiatan yang bersifat keduniawian. Oleh karenanya segala amal perbuatan yang dilakukan, hendaklah dijalankan dengan tulus ikhlas dan penuh pengabdian. Karena pada hakikatnya, segala tugas pekerjaan adalah sebagai bagian dari ibadah manusia terhadap *khaliq*-nya. Sebab dalam konsep ajaran Islam yang disebut ibadah bukanlah hanya sembahyang, puasa, haji dan semacamnya. Bahkan setiap laku tindakan manusia seharusnya merupakan bagian ibadahnya terhadap Tuhan. Bukankah manusia itu diciptakan justru untuk beribadah kepada Tuhan?

Mengakhiri pengantar ini saya teringat pada puisi penyair terkenal, Emha Ainun Najib, yang berbicara tentang masjid, yang saya kutip tiga saja dari sembilan baitnya :

SERIBU MASJID SATU JUMLAHNYA

Satu

Masjid itu dua macamnya

Satu ruh, lainnya badan

Satu di atas tanah berdiri

Lainnya bersemayam di hati

Tak boleh hilang salah satunya

Kalau ruh ditindas, masjid hanya batu

Kalau badan tak didirikan, masjid hanya hantu

Masing-masing kepada Tuhan tak bisa bertamu

Dua

Masjid selalu dua macamnya

Satu terbuat dari bata dan logam

Lainnya tak terperi

Karena sejati

Tiga

Masjid batu bata

Berdiri di mana-mana

Masjid sejati tak menentu tempat tinggalnya

Timbul tenggelam antara ada dan tiada

Mungkin di hati kita

Di dalam jiwa, di pusat sukma

Membisikkan nama Allah ta'ala

Kita diajari mengenali-Nya

Di dalam masjid batu bata

Kita melangkah, kemudian bersujud

Perlahan-lahan memasuki masjid sunyi jiwa

Beriktikaf, di jagat tanpa bentuk tanpa warna

Kiranya sudah tiba saatnya agar agar kita memberi perhatian yang lebih berarti terhadap masjid dengan segala problematikanya untuk mengoptimalkan potensi besar yang dimiliki, agar masjid benar-benar aktual sebagai *"pusat ibadah dan kebudayaan ummat Islam"* seperti judul buku Gazalba. Atau jika tidak ia hanya menjadi *"masjid batu bata yang berdiri di mana-mana"* tapi ia kehilangan ruhnya dengan akibat *"kepada Tuhan kita tak bisa bertamu"*, seperti ungkapan Emha Ainun Najib.

Buku yang ada di tangan pembaca ini kiranya hendak menggambarkan bagaimana pemetaan masjid-masjid bersejarah baik di Aceh maupun Sumatera Utara. Kiranya dari sini dapat kita lihat peran dan potensi *masjid yang telah dijalankan sepanjang sejarah di dua wilayah tersebut* selama ini. Mungkin tidak semua potensi masjid telah tergali seluruhnya, tapi dari bacaan ini pasti tersedia cerminan bahwa dari masjid banyak hal-hal yang baik telah terjadi pada masa lalu, namun banyak pula hal-hal baru yang dapat dikembangkan pada masa yang akan datang. Itulah sebabnya kita perlu terus belajar dari sejarah, guna memperbaiki diri dan masyarakat kita sendiri.

Rusjdi Ali Muhammad

1

MENCARI AKAR SEJARAH MESJID-MESJID BERSEJARAH DI ACEH DAN SUMATERA UTARA: SEBUAH CATATAN LAPANGAN

Nilai sejarah, magi dan kisah spiritual yang melekat pada mesjid-mesjid tua kemudian dipandang bersejarah umumnya didasarkan pada usia dan/atau hubungan mesjid-mesjid tua itu dengan satu atau serentetan peristiwa. Pengislaman, pentahbisan raja atau pembangunan istana baru serta untuk mengingat kehadiran sosok ulama atau tokoh dengan kemampuan luar biasa menjadi latar peristiwa umum bagi pendirian sejumlah mesjid bersejarah di Aceh dan Sumatera Utara.

Mesjid Indrapuri di Aceh Besar, Mesjid Asal Penampaan di Blangkejeren, Mesjid Pulo Kameng di Kotafajar, Mesjid Teungku Di Ujong di Sinabang, Mesjid dan maktab al-Chairiyah al-Islamiyah Tapanuli di Deli Tua, Deli Serdang, mesjid yang dikelola oleh Madjelis Penjiaran Islam di Tapanuli dan Kabanjahe, Karo atau Mesjid Musalli Sri Alam Dunia di Sipirok menjadi contoh mesjid tua yang dibangun untuk atau sebagai bagian dari pengislaman di daerah itu di masa lalu.

Mesjid Raya Baiturrahman di Banda Aceh, Mesjid al-Abyadh Krueng Beukah di Meulaboh, Mesjid Gang Bengkok di eks-Moskeestraat Medan, Mesjid Raya al-Mashun di Kota Ma'shum Medan, Mesjid Raya Osmani di Labuhan Deli, Mesjid Raya Sulaimaniyah di Perbaungan, Mesjid Azizi di Tanjung Pura, Mesjid Sultan Ahmadsyah di Tanjung Balai atau Mesjid Raya Negeri Lama adalah contoh mesjid untuk kategori yang berhubungan dengan raja atau sultan dan istana.¹

Kategorisasi mesjid dalam tulisan ini merupakan kerangka pikir untuk merekonstruksi cerita sejarah mesjid serta memahami perubahan dan kesinambungan sosial masyarakat

Islam di Aceh maupun Sumatera Utara dari perspektif sosiologis, budaya dan politik. Jika Aceh identik dengan Islam sejak dahulu dan sekarang maka Sumatera Utara pun identik dengan pengalaman itu meski keadaan telah membalikkan keadaan bahwa di masa lalu pesisir Timur Sumatera Utara merupakan wilayah kekuasaan Sultan-sultan Melayu.

Cerita Sumatera Utara masa kini berisi tentang hubungan-hubungan antarbudaya dan 'pertarungan' yang berlangsung dalam hubungan-hubungan itu. Hubungan ini secara sadar maupun tidak telah memisahkan Sumatera Utara dalam dua kelompok kebudayaan nominal dan area kebudayaan yang bertolak belakang; Sumatera Timur (Melayu) dan Tapanuli (Batak). Sumatera Timur mewakili Islam sedangkan Tapanuli (dengan beberapa pengecualian) mewakili area kebudayaan kelompok etnik pemeluk Kristen.²

Mesjid-mesjid tua di Aceh dan Sumatera Utara juga dapat dilihat sebagai representasi sosial, politik, budaya dan ekonomi masyarakat pendukungnya dari masa lalu hingga kini. Pada mesjid-mesjid itu, disadari atau tidak disadari, 'tersimpan' rekaman perubahan serta jejak kesinambungan sosial yang menggambarkan jiwa zaman, alam pikir, gerak, impian, harapan serta cita-cita masyarakat yang menghidupkan dan menggembirakan mesjid-mesjid itu di masa lalu sampai kini.

'Simpanan' rekaman perubahan dan kesinambungan sosial di masa lalu itu menjadi satu dari sejumlah alasan mengapa mesjid-mesjid tua, di manapun rumah ibadah umat Islam itu berdiri, apapun langgamnya, bagaimanapun bentuk atau keadaannya tetap memiliki arti tersendiri bagi masyarakat di sekitarnya.³ Mesjid juga telah menjadi simpul dari beragam jejaring sosial, ekonomi, politik yang dikembangkan oleh masyarakat pendukungnya. Oleh sebab itu mesjid tidak dapat dipisahkan dari proses perubahan dan kesinambungan sosial pada suatu masyarakat.

Mesjid juga menjadi *locus* bagi sejumlah aktivitas sosial-budaya selain tempat beribadah. Secara tradisional mesjid telah dikenal sebagai tempat mengaji yang kemudian hari mendorong

lahirnya madrasah atau sering dinamai dengan *maktab* yang biasanya berdiri di lingkungan mesjid. Mesjid juga menjadi tempat Perayaan Hari Besar Islam (PHBI), *wirid*, inisiasi; khitan (atau sunat rasul terutama bagi anak laki-laki), penabalan nama bayi, akad nikah dan sebagian atau seluruh tahapan fardhu kifayah juga biasa dilakukan di mesjid.

Lingkungan mesjid juga kerap dijadikan areal sakral tempat orang yang *bernazar*; janji kuat yang harus ditunaikan sungguh-sungguh untuk melepaskan *nazar* yang telah dikukuhkan dengan niat dan lisan. Dengan representasi dan pemanfaatan itu, mesjid bukan lagi sekedar simbol religiositas ekstrinsik Islam semata-mata melainkan representasi sosial yang bersifat organis. Oleh karena itu, nilai sosial, kedudukan, fungsi dan model ataupun pola pemanfaatan/pemberdayaan mesjid dapat berubah atau beradaptasi dengan kemungkinan-kemungkinan yang terus berkembang.

Hal-hal yang pernah lekat atau masih melekat pada satu mesjid dapat berubah meskipun kesinambungan fisik dan sosial pada bangunan itu masih tetap dapat dilihat dan dirasakan. Perubahan sekaligus kesinambungan yang berlangsung ini menjadi landasan dalam menentukan nilai-nilai pada mesjid-mesjid bersejarah di Aceh dan Sumatera Utara. Dalam konteks pemetaan mesjid bersejarah ini, mesjid tidak dipandang sebagai rumah ibadah semata-mata melainkan suatu ruang sosial yang menautkan sejumlah unit-unit sosial, menjadi 'saksi' ataupun latar bagi satu atau beberapa peristiwa.

Oleh karena itu, pemetaan mesjid dalam arti mendokumentasikan keadaan sejarah mesjid, merekonstruksi peristiwa, memaparkan keadaan mesjid dahulu dan kini, menghimpun informasi dan menyingkap apa yang 'tersimpan' pada mesjid-mesjid di Aceh dan Sumatera Utara mempunyai bobot tersendiri mengingat mesjid pada dua provinsi ini telah menjadi monumen bagi sejumlah peristiwa di daerah itu dari masa pra-kolonial sampai perang kemerdekaan bahkan jauh sesudah periode itu.⁴

Dari masa pra-kolonial misalnya, Ekspedisi Militer Belanda 1865 untuk menaklukkan Asahan dan Serdang secara tidak langsung telah diabadikan pada Mesjid Sultan Ahmadsyah di Tanjung Balai dan Mesjid Sultan Basharuddin di Rantau Panjang (dekat Lubuk Pakam, Deli Serdang masa kini). Dalam serangan itu, Sultan Ahmadsyah dari Asahan dan Sultan Basharuddin dari Serdang menjadi sasaran antara sebelum Belanda memaklumkan perang dengan Aceh (1873).⁵ Dua Sultan Melayu yang memegang teguh pertuanan dengan Aceh akhirnya kalah. Nama mereka -meskipun bukan karena serangan itu- telah diabadikan pada mesjid yang didedikasikan orang lain untuk mereka atau mereka bangun ketika masih memegang kekuasaan sebagai sultan.

Pangkal sejarah kesultanan Asahan pun ditandai dengan Mesjid Jami' Puluraja (*sic*; Puloan Raja lalu Pulau Raja) meskipun mesjid ini dibangun belakangan.⁶ Mesjid Jami' dan sejarah Asahan ini dihubungkan dengan sejarah awal Asahan dan cerita perjalanan armada perang Aceh ke Johor karena Sultan negeri itu Johor dianggap bersekutu dengan Portugis di Melaka. Dari cerita ini disebut sosok Siti Ungu Puteri Berinai, putri Raja Simargolang yang dinikahi Sultan Iskandar Muda dari Aceh sekaligus ibunda Raja Asahan pertama. Jalinan cerita ini melekat pada mesjid yang sudah lapuk dimakan usia ini.⁷

Mesjid Jami' berdinding papan yang sudah lapuk dan dipenuhi sarang rayap ini terletak persis di tepi sungai Asahan yang lebar. Pada pekarangan mesjid, di bagian tubir sungai yang terancam longsor terdapat makam Siti Ungu Putri Berinai dan Sultan Abdul Jalil Rahmatsyah, Sultan Asahan pertama. Dua makam itu (dahulu pernah) menjadi 'penarik' para peziarah dengan minat tertentu sehingga mesjid serta makam ibu dan anak ini dianggap memiliki magi dan dinilai sakral.

Serangan armada Belanda pertama atas *dalam* (keraton) Aceh pada tahun 1873 menancap kuat dalam ingatan orang Aceh sampai kini. Peristiwa yang menunjukkan kekuatan Aceh menjelang kejatuhan adidaya terakhir di Nusantara ini dikukuhkan pada sebuah *tatengger* yang didirikan di bawah

pohon *geuleumpang* yang tumbuh di halaman Mesjid Raya Baiturrahman di tempat Mayor Jenderal J.H.R. Köhler tertembak tepat di jantungnya.

Revolusi Sosial (3-6 Maret 1946) yang menghancurkan eskistensi kerajaan dan golongan bangsawan di Sumatera Timur ternyata tidak berimbas langsung pada mesjid.⁸ Berbeda nasib dengan istana Sultan Melayu juga raja-raja Simalungun dan Karo yang hampir sebagian besar dihancurkan massa, (sejauh pengamatan kami) tidak satupun mesjid yang menjadi pasangan istana ikut dihancurkan. Massa memilih menghancurkan istana karena dianggap sebagai simbol feodalisme, anti-Republik dan pro-Belanda.⁹

Politisasi simbol pada masa revolusi itu menjungkirbalikkan semua nilai yang melekat pada istana, golongan bangsawan dan segala hal yang berkaitan dengan tatanan sosial lama. Namun di sisi lain, pembentukan tatanan sosial baru juga berlangsung secara simbolik sehingga politisasi simbol baru tidak mampu mengurai perbedaan-permasalahan yang substantif selama perang kemerdekaan. Politisasi simbol baru ini justru mendorong kelahiran kelompok sosial dengan ciri primordial baru dan bersifat sektarian.

Selama perang kemerdekaan, (Islam) dan mesjid menjadi simbol penting dalam berbagai cerita dari masa itu. Mesjid, karena aspek simboliknya menjadi bangunan yang tidak diusik selama perang. Mesjid sering dimanfaatkan secara terbuka atau diam-diam untuk menyebarkan makluman yang digunakan untuk membangun kesadaran politik dan menjaga semangat mempertahankan kemerdekaan. Simbol-simbol yang identik dengan Islam seperti, ucapan salam sering digunakan sebagai bagian utama dalam komunikasi antar-*telik*.

Dalam tulisan ini, kami memilih dan mendeskripsikan 13 dari banyak mesjid bersejarah di Aceh dan Sumatera Utara. Pilihan untuk 'mendaulat' 13 mesjid itu sebagai mesjid bersejarah berdasarkan pada tiga kriteria yang kami tentukan. *Pertama*, usia. Selain menunjukkan derajat ketuaan, aspek usia mesjid ini dapat pula menjadi indikator untuk menilai konstruk-

unik karena memadukan sejumlah corak arsitektur dari kebudayaan yang berbeda-beda; Aceh-Melayu, Arab, Tiongkok, Eropa dan India. Satu lagi hal yang menarik ialah, perpaduan arsitektur itu diklaim sebagai arsitektur Aceh atau Melayu atau paling tidak perpaduan itu menjadi ciri penting dalam pembentukan langgam bangunan yang disebut arsitektur Aceh dan Melayu. Peran serta fungsi kekinian pada mesjid-mesjid itu pun menempati posisi yang istimewa dibanding mesjid-mesjid lain yang dibangun sesudahnya. Mesjid-mesjid peninggalan kerajaan ini telah didaulat secara resmi maupun tidak resmi sebagai Mesjid Jami', Mesjid Besar, Mesjid Raya ataupun Mesjid Agung oleh masyarakat dan pemerintah setempat.

Masyarakat (dalam arti sempit pada sekelompok orang yang pernah atau sedang menjadi pengurus mesjid) ternyata memiliki konsep tersendiri dalam menggolongkan mesjid-mesjid di lingkungan administratif tempat mereka tinggal. Konsep yang didasarkan pada letak/posisi mesjid dari lokasi yang jadi pusat pemerintahan itu menjadi dasar untuk menggolongkan sebuah mesjid apakah akan digolongkan/dinamai Mesjid Jami', Besar, Mesjid Raya atau Mesjid Agung. Penggolongan mesjid dengan kriteria yang sederhana ini telah menjadi dasar bagi pemerintah setempat untuk menyematkan lalu melegitimasi status 'jami'', 'besar', 'raya' atau 'agung' pada sebuah mesjid yang telah berdiri sebelumnya atau dibangun pemerintah kemudian.

Bagi masyarakat, penggolongan ini secara langsung maupun tidak langsung menentukan 'kelas' atau gengsi mesjid-mesjid yang mereka hidupkan. Penamaan Mesjid Jami' mengesankan bahwa mesjid ini terbuka bagi siapapun asalkan *ahlussunnah* letaknya pun di perkampungan. Mesjid Besar misalnya, dinamai demikian karena (umumnya) berada di pusat kecamatan atau jadi tempat ibadah utama yang terletak pada kampung terbesar pada sebuah daerah administratif setingkat kecamatan. Oleh karena itu Mesjid Besar didaulat menjadi mesjid (resmi) kecamatan. Berbeda dengan Mesjid Besar, Mesjid Raya dan Mesjid Agung memiliki pengertian yang tumpang tindih. Baik Mesjid Raya dan Mesjid Agung sama-sama menjadi 'mesjid

resmi' pemerintah kabupaten. Di mata masyarakat, kelas Mesjid Agung berada di atas Mesjid Raya karena mesjid yang disebut terakhir merupakan mesjid utama bagi warga kecamatan yang berdekatan dengan mesjid yang dikelola pemerintah kabupaten/kota.¹¹

Belum ditemukan pengertian yang disusun secara empirik dan sistemik mengenai penggolongan ini namun bisa jadi hal itu memang merupakan penamaan umum. Tanpa bermaksud menghitung jumlah mesjid, banyak sekali mesjid di kota-kota besar di Indonesia menggunakan kata 'jami', 'raya' dan 'agung' bahkan di Medan terdapat Mesjid Raya al-Mashun Medan dekat Taman Seri Deli di kelurahan Kota Matsum sekaligus Mesjid Agung Medan yang bersebelahan dengan kantor Gubernur Sumatera Utara. Yang membedakan kedua mesjid tersebut ialah sejarahnya. Mesjid Raya al-Mashun berdiri di wilayah kekuasaan Sultan Deli yang disebut *Sultangrond* sedangkan Mesjid Agung yang dibangun belakangan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai mesjid resmi pemerintah terletak di wilayah eks-*gemeente* Medan.

Kubah dalam berbagai model menjadi ciri penting bagi mesjid-mesjid bersejarah yang kami kunjungi. Penerapan kubah pada bangunan mesjid di Aceh dan Sumatera Utara menunjukkan bahwa mesjid bersangkutan umumnya dibangun pada masa kolonial. Penerapan kubah besar bisa dibilang tergolong baru mengingat model atap mesjid-mesjid lama di Aceh dan Sumatera Utara ialah atap bertingkat/berlapis yang umumnya terdiri dari dua hingga tiga tingkatan/lapisan. Model atap bertingkat ini masih terlihat pada Mesjid Jami' Puluraja di Asahan. Berdasarkan foto Mesjid Raya Baiturrahman di Banda Aceh pun memiliki atap demikian. Beberapa bagian dari mesjid yang kini berubah total itu dipengaruhi arsitektur Bugis dan Tiongkok (*sic*).¹²

Model atap tingkat/berlapis ini diyakini sebagai simbol hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta (*hablum-min-allah*) dalam mencapai tingkatan tertentu yang ingin dicapai manusia. Pada umumnya ada tiga tingkatan atap yang

melambangkan tiga tahapan spiritual yang ingin dicapai para peminat tasawuf itu. Atap paling bawah yang lebih besar menjadi simbol *syariat*, (kadang disebutkan terdapat aras *tarekat*) lalu *hakekat* dan tingkat tertinggi yang diidam-idamkan yaitu *ma'rifat*. Terlepas dari pemaknaan ataupun penafsiran tingkatan itu, bentuk atap mesjid bertingkat itu seolah-olah tidak populer lagi. Kubah yang diadopsi masyarakat Islam di Arab, Persia, India atau Turki dari seni bangunan Yunani-Romawi telah menjadi ciri utama arsitektur Islam yang diwujudkan pada mesjid-mesjid di Aceh dan Sumatera Utara yang dibangun pada masa kolonial dan sesudah itu.¹³

Terlepas dari penggolongan mesjid-mesjid lama yang mungkin saja terjadi karena ada muatan politis, tentang atap bertingkat atau atap kubah itu, pemetaan mesjid ini lebih menaruh perhatian pada kisah-kisah di balik keberadaan mesjid-mesjid lama yang dipetakan. Juga terlepas dari keterbatasan bahkan ketiadaan data mengenai jumlah, sebaran, langgam dan keadaan mesjid-mesjid tua di Aceh dan Sumatera Utara, bagi kami kawasan ini merupakan lapangan istimewa bagi kajian sejarah (terutama jika menggunakan perspektif atau metodologi *ethnohistory*), antropologi (genealogi dan etnografi) serta bagi kajian sosiologi (tentang stratifikasi, pelembagaan sosial, hubungan antara pedalaman dengan pesisir atau konflik dan konsensus).

Ada hal lain yang menguatkan bahwa Aceh dan Sumatera Utara adalah lapangan istimewa, yaitu hubungan interdependensi antara Aceh dan Melayu serta orientasi budaya masyarakat di Pantai Barat Sumatera Utara pada Aceh (juga pada Minangkabau). Jika merujuk pada asal-usul masyarakat di kawasan ini maka tergambar suatu jalinan cerita yang padu antara Islam, Aceh-Melayu dan Batak yang membangun konstruk sejarah sosial di kawasan ini. Pada jalinan ini, mesjid memiliki posisi sentral karena jika merujuk tradisi masyarakat pada dua daerah itu maka mesjid-mesjid selalu menyimpan cerita-cerita unik, khas meski kadang setengah dongeng tentang konstruksi sosial yang membentuk masyarakat majemuk di Aceh dan

Sumatera Utara. Oleh sebab itu, mesjid-mesjid bersejarah selalu dapat dijadikan pintu masuk atau jembatan penghubung antara masa lalu dengan masa kini.

¹ Abdul Baqir Zein, *Mesjid-mesjid Bersejarah di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, hlm. 25-36.

² Daniel Perret, *Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut*, Jakarta: Gramedia-EFEO, 2010, hlm. 19-23.

³ Konsepsi ini sejalan dengan pemikiran Zein mengenai peranan dan dinamika mesjid di Indonesia, lihat Abdul Baqir Zein.

⁴ Laporan Ery Soedewo *et.al.*, *Perekaman Peninggalan Sejarah Budaya Islam di Sumatera Utara*, Medan: Museum Negeri Sumatera Utara, 2010 menjadi salah satu acuan kami untuk menentukan mesjid-mesjid yang dianggap bersejarah.

⁵ Tuanku Luckman Sinar Basarshah II, *Kronik Mahkota Kesultanan Serdang*, Medan: Perwira, 2002, hlm. ; Tengku Ferry Bustamam, *Bunga Rampai Kesultanan Asahan*, Medan: t.p., 2003, hlm. 36-37.

⁶ Puluraja berasal dari kata Pulau Raja, nama daerah itu pada masa lalu. Nama resmi daerah masa kini ialah Pulau Rakyat namun masyarakat lebih sering menyebut Pulo Raja atau Pulu Raja. Makluman pribadi Ilham Simangunsong (Bandar Pulau, 30 Juni 2011).

⁷ Tengku Ferry Bustamam, *Op.Cit.*, hlm. 12-13. Edi Siahaan, *Wawancara* (Pulau Raja) 30 Juni 2011.

⁸ Mengenai Revolusi Sosial 1946 lihat Anthony Reid, *Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera*, Jakarta: Sinar Harapan, 1987.

⁹ Mengenai isu-isu menjelang Revolusi Sosial lihat Biro Sejarah Prima, *Perjuangan Kemerdekaan dalam Wilayah Sumatera Utara: Medan Area Mengisi Proklamasi* (Jilid 1). Medan: Badan Musyawarah Pejuang Republik Indonesia Medan Area, 1976.

¹⁰ Perayaan Hari Gembira Aidil Fitri (Hagaf) yang jadi kalender tahunan di Guntung Saga. Perayaan ini sudah berlangsung selama 52 tahun, lihat *Waspada*, 5-6 September 2011.

¹¹ Saidi Siregar, *Wawancara* (Kota Pinang) 27 Juni 2011.

¹² Nasir Sagala dan Anas Tambunan, *Wawancara* (Guntung Saga) 28 Juni 2011.

¹³ *Kompas*, 22 Agustus 2011.

2

ACEH DAN SUMATERA UTARA: DUA LAPANGAN PENELITIAN YANG ISTIMEWA

Aceh punya cerita panjang dan istimewa. Pada masa kesultanan Aceh, yang dimaksud dengan Aceh adalah wilayah yang sekarang dikenal dengan Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh, sedangkan daerah di luar itu disebut daerah taklukan.¹ Sejarah Aceh sebelum tahun 1500 masih diselimuti oleh berbagai misteri karena belum banya ditemukan sumber yang akurat. Hal itu disebabkan Aceh belum begitu dikenal oleh orang-orang asing ketika itu, karena ia terletak agak jauh dari pantai sehingga tidak banyak disinggahi oleh orang-orang asing yang melakukan perjalanan atau pelayaran yang melintasi selat Malaka. Sebuah catatan Aceh yang dipelajari oleh Hoessein Djajadiningrat disebutkan bahwa Sultan Johan Syah yang memerintah pada tahun 601 H (1205 M) berkedudukan di Kandang Aceh. Sebuah karangan yang diterbitkan di Konstantinopel berjudul *Djawaib*, menjelaskan pula bahwa sultan Aceh pertama yang beragama Islam adalah Gazi Djohansyah yang mulai memangku jabatannya pada 19 Januari 1215.²

Mesjid Raya Baiturrahman sebagai mesjid kebanggaan masyarakat Aceh terletak di Banda Aceh. Berbagai daulah Islam yang pernah memerintah di Aceh, Banda Aceh dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Dengan demikian, Banda Aceh merupakan salah satu kota tua di Indonesia. Nama kota ini pun dalam perjalanan sejarahnya tidak sama persis dengan namanya yang sekarang. Ketika Aceh masih merupakan sebuah negeri kecil, pusat kerajaannya bernama *Kandang Aceh* (Kandang=kompleks). Kandang Aceh diyakini terletak di sekitar Kampung Pande sekarang. Namun, tidak lama kemudian, pusat pemerintahan dipindahkan lagi ke *Daruddunia* atau *Dar ad-*

Dunia (nama istana Sultan Aceh). Setelah memerintah selama 43 tahun, pusat pemerintahan dipindahkan ke Darul Kamal atau Dar al-Kamal di sekitar daerah Biluy, Aceh Besar sekarang. Demikian pula dengan Kerajaan Lamuri yang teletak di Aceh Besar, pada akhir abad ke-15 dipindahkan ke Makota Alam yang terletak di sekitar daerah Pango Raya sekarang.³

Setelah Syamsu Syah berhasil mengalahkan Darul Kamal (Aceh=Daroi Kameu) dan disatukan dengan Makota Alam, nama kerajaan yang baru disatukan itu dirubah menjadi Kerajaan Aceh Darussalam dengan pusat pemerintahannya masih berada di Makota Alam. Setelah Ali Mughayat Syah naik tahta pada tahun 1516,⁴ pusat pemerintahan dipindahkan ke Daruddunia yang terletak di sekitar Kampung Keraton sekarang. Pada masa pemerintahannya, Daruddunia dan kota sekitarnya diberi nama Bandar Aceh Darussalam. Selama kerajaan ini berdiri, nama tersebut tidak dirubah, tetapi pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda, seluruh kawasan kota dinamakan Kutaraja, mengambil nama kompleks istana yang sebelumnya bernama Daruddunia. Setelah kemerdekaan, ketika Aceh menjadi sebuah provinsi yang bernama Provinsi Daerah Istimewa Aceh, pusat pemerintahannya dirubah pula menjadi Banda Aceh. Kata Bandar dirubah menjadi Banda, sedangkan kata Darussalam tidak digunakan lagi.

Dalam kitab *Bustanus Salatin* juga disebutkan bahwa urutan raja-raja Aceh dimulai dari Sultan Ali Mughayat Syah. Sebab itulah sebagian ahli berpendapat bahwa kerajaan Aceh dimulai sejak raja tersebut memerintah kurang pada tahun 1516. Namun, Aceh mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Menjelang berakhir abad ke-16, fajar kegemilangan Kerajaan Aceh mulai bersinar. Pada tahun 1607, Iskandar Muda diangkat menjadi Sultan Aceh. Dalam karya-karya penulis asing dan Indonesia tentang sejarah Aceh disebutkan bahwa Sultan Iskandar Muda merupakan sultan yang paling besar dan masyhur dalam deretan nama-nama sultan yang memerintah di Kesultanan Aceh Darussalam. Di bawah pemerintahan sultan ini, Kesultanan Aceh mencapai puncak

kejayaannya dalam bidang hukum, politik, kemiliteran, ekonomi, agama, pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya. Sultan Iskandar Muda sangat giat mengembangkan agama Islam di Kesultanan Aceh, setiap daerah diperintahkan mendirikan mesjid sebagai tempat ibadah.

Selanjutnya, Nuruddin ar-Raniri juga memberikan gambaran bahwa sultan adalah seorang yang shaleh dan taat menjalankan ajaran Islam. Ia selalu menganjurkan kepada rakyatnya supaya memeluk dan melaksanakan ajaran Islam dengan sungguh-sungguh dan sempurna. Berbagai peraturan dikeluarkan untuk mencegah orang melanggar ajaran agama, seperti melarang orang berjudi dan minum-minuman keras. Selain itu, Iskandar Muda juga disebutkan sebagai sultan yang sangat pemurah. Setiap kali pergi salat Jumat, ia tidak lupa membawa bermacam hadiah dan sedekah untuk diberikan kepada fakir miskin. Selain itu, Sultan Iskandar Muda juga berhasil membuat ketetapan-ketetapan tentang tata cara yang berlaku di Kesultanan Aceh dan mengenai penggunaan cap *siekureueng* atau stempel halilintar. Kumpulan ketetapan itu kemudian disebut dengan nama *Adat Meukuta Alam*.⁵ Ketika Sultan Iskandar Muda mangkat pada tahun 1636, menantunya Iskandar Thani (suami Safiatuddin Syah) dinobatkan menjadi Sultan.

Pada tahun kelima kepemimpinannya (1641), Iskandar Thani mangkat dan belum dikarunia seorang anak. Selanjutnya, Safiatuddin dinobatkan sebagai sultanah yang memimpin kerajaan Aceh (1641-1675). Menjelang penobatannya, timbul pertentangan di kalangan pembesar Kerajaan Aceh. Hal ini disebabkan Sultan Iskandar Thani tidak memiliki putra dan dipertentangan dengan kepatutan seorang perempuan menjadi pemimpin dalam pandangan Islam. Setelah melalui musyawarah dan ikut campur ulama terkemuka, yaitu Teungku Abdurrauf as-Singkili (Syiah Kuala) yang menyarankan pemisahan antara masalah agama dengan pemerintahan. Akhirnya, Safiatuddin Syah dinobatkan menjadi sultanah pertama. Sultanah Safiatuddin memerintah selama 35 tahun (1641-1675). Pemerintahan yang

begitu lama tentulah dengan segala kebijaksanaan dan kemampuan yang dimiliki seorang wanita. Selama pemerintahannya, sultanah terus-menerus dirongrong oleh tokoh kalangan istana yang tidak setuju kepemimpinan wanita.

Namun, kenyataannya setelah Sultanah Safiatuddin mangkat, kepemimpinan jatuh lagi ke tangan wanita, yaitu Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah (1675-1678). Pada masa pemerintahan Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah terjadi perubahan di bidang struktur administrasi pemerintahan. Di luar daerah yang langsung diperintah oleh sultanah, yaitu daerah Aceh Besar dibagi dalam tiga daerah besar. Pembagian daerah tersebut menyerupai segi tiga dan karenanya dinamakan *Sagi* (Aceh=Sagoe).⁶ Kepemimpinan Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah hanya berlangsung sekitar 3 tahun. Dia lalu digantikan oleh Sultanah Zakiatuddin Syah (1678-1688). Selama kepemimpinan para sultanah, kerajaan Aceh mulai memudar disebabkan pergolakan politik pro dan kontra terhadap kepemimpinan wanita. Sultanah yang terakhir adalah Kamalat Syah yang bertahta pada tahun 1688-1699. Pro dan kontra terhadap kepemimpinan wanita berakhir dengan dilengserkannya Sultanah Kamalat Syah. Kepemimpinan beralih kembali kepada kaum pria dengan diangkatnya Badrul Alam Syarif Hasyim Jamaluddin menjadi sultan.

Mulai saat itu, pemerintahan dipimpin oleh Sultan Badrul Alam Syarif Hasyim Jamaluddin (1699-1702) yang juga anggota seorang perutusan dari Mekkah, ketika terjadi kemelut pro dan kontra terhadap kepemimpinan wanita. Setelah tiga tahun memerintah, baginda diturunkan dari tahta kerajaan. Setelah peristiwa tersebut, empat sultan keturunan Arab lainnya diangkat sebagai Sultan Aceh hingga tahun 1726. Karena pada bulan Juni 1727 dengan suara bulat ketiga Panglima Sagi memilih Maharajalela Melayu menjadi sultan dengan gelar Sultan Alaidin Ahmad Syah (1727-1735) putra Abdurrahim Maharajalela Bin Zainal Abidin bin Daeng Mansur mertua Sultan Iskandar Muda. Dengan demikian, pemerintahan di Aceh kembali dijabat oleh sultan keturunan Aceh-Bugis. Masa pemerintahan

Sultan Alaidin Ahmad Syah (1727-1735) hingga Sultan Alaidin Johan Syah (1735-1760), selalu dihadapkan pada pertentangan yang dilancarkan oleh Sultan Jamalul Alam Badrul Munir yang ingin berkuasa kembali.

Kedua sultan yang hidup pada masa yang berbeda memiliki visi yang sama dalam menjalankan roda pemerintahan, di antaranya mereka dapat membuka hubungan perdagangan dengan Inggris dan Perancis tanpa memberi izin kepada mereka membuka benteng.⁷ Sultan Alaidin Johan Syah (Pocut Uek) digantikan oleh Sultan Alaidin Mahmud Syah (1760-1781). Salah satu keberhasilan Johansyah adalah kenegerian Barus kembali dikuasai oleh Aceh pada tahun 1778 yang sebelumnya sudah dikuasai oleh Belanda. Sultan Alaidin Mahmudsyah berturut-turut digantikan oleh Sultan Alaidin Muhammad Syah (1781-1795), Sultan Alaidin Alam Syah (1795-1824), dan Sultan Muhammad Syah pada 1824-1836, masa-masa ini adalah semakin gencarnya infiltrasi Barat (Inggris) ke Pulau Sumatra sehingga selain menghadapi masalah internal kerajaan, sultan juga dihadapkan pada rong-rongan terhadap kedaulatan Aceh. Sultan Muhammad Syah diganti oleh Sultan Alaidin Ibrahim Mansyur Syah (1836-1870) masa pemerintahan beliau satu persatu daerah kekuasaan Aceh di luar Pulau Sumatra jatuh ke tangan Belanda, di antaranya Barus dan Nias.

Sultan Alaidin Ibrahim Mansyur Syah digantikan oleh Sultan Alaidin Mahmud Syah (1870-1874). Pada tahun 1873, pecahlah perang Belanda di Aceh yang dimulai dengan Agresi Militer Belanda pertama. Inilah awal perang yang memunculkan keheroikan masyarakat Aceh. Agresi Belanda terhadap Aceh adalah awal kesengsaraan hingga pupusnya kesultanan Aceh. Akibat perang yang memakan waktu lebih 40 tahun, menghancurkan bukan saja dalam bentuk fisik berupa lambang-lambang kerajaan, seperti istana (*Dalam*) dan mesjid raya, tetapi juga dengan pengasingan sultan, yaitu Sultan Alaidin Muhammad Daud Syah. Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda tersebut, seluruh wilayah Keresidenan Aceh dibagi menjadi 4 (empat) *afdeeling*, yaitu *Afdeeling* Aceh Besar yang berkedudukan

di Kutaraja (Banda Aceh), *Afdeling* Aceh Utara berkedudukan di Sigli, *Afdeling* Aceh Timur berkedudukan di Langsa, dan *Afdeling* Aceh Barat berkedudukan di Meulaboh.

Mesjid Indrapuri sebagai salah satu mesjid yang bercirikan keacehan terletak di Indrapuri, Aceh Besar. Pada masa kesultanan Aceh, Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh merupakan daerah inti kerajaan Aceh. Sebagaimana sudah disinggung sebelumnya, di wilayah Aceh Besar pada zaman dahulu diperkirakan pernah berdiri Kerajaan Lamuri. Namun, sejauh ini informasi tentang sejarah Kerajaan Lamuri belum didukung oleh sumber-sumber yang konkrit dan memadai sehingga dalam merekonstruksi Kerajaan Lamuri masih mengalami berbagai kesulitan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang pernah diberitakan orang menyangkut kerajaan Lamuri masih bersifat spekulatif dan tentatif. Keterangan tentang adanya kerajaan ini pada umumnya hanya didasarkan atas berita-berita dari luar, seperti yang disebutkan oleh pedagang dan pelaut asing sebelum tahun 1500 M. Selain itu, atas beberapa sumber lokal, seperti *Sejarah Melayu* dan *Hikayat Aceh* yang hanya menyebutkan tentang kerajaan ini dengan beberapa kalimat saja.

Sejauh ini belum ada kesepakatan para ahli sejarah tentang lokasi, kapan berdiri, siapa pendiri, dan bagaimana struktur atau sistem pemerintahan yang berlaku di Kerajaan Lamuri. Beberapa penulis Barat, di antaranya W.P. Groeneveldt, menyebutkan bahwa kerajaan Lamuri terletak di sudut sebelah barat laut pulau Sumatera atau termasuk bagian daerah Aceh pada masa sekarang. Penulis Barat lainnya bernama H. Yule, menyebutkan bahwa Lambri atau Lamuri merupakan suatu tempat yang pertama sekali disinggahi oleh pedagang-pedagang dan pelaut-pelaut dari negeri Arab dan India. Seorang pengembara dan penulis yang bernama Tome Pires dalam karyanya yang terkenal *The Suma Oriental*, menyebutkan bahwa di pantai utara Aceh terdapat enam '*reinos*' dan 2 '*terras*', yaitu *Reino de Achey de Lambry*, *terra de Biar*, *reino de Pedir*, *terra de Aeilabu*, *reino de Lide*, *reino de Pirada*, *reino de Patee*.⁸ Dari nama-

nama yang disebutkan itu dikenal dengan nama Aceh, Lamri, Biheue, Pidie, dan le Leubeue.

Dari keterangan tersebut dapat diperkirakan bahwa Kerajaan Lamuri meluas mulai dari laut atau pantai hingga ke daerah pedalaman. Adapun Cordier, salah seorang penulis Barat lainnya yang menjadi editor dari kisah perjalanan Odorico de Pordenone ke Asia, yaitu *Les Voyages en Asie aux XIV esiecie du Bienheu reux Frere odoric de Pordenon* (Paris 1881), menduga bahwa nama Desa Lamreh sekarang yang terletak dalam IX Mukim Tungkop wilayah Sagi XXXVI Aceh Besar adalah identik dengan nama Kerajaan Lamuri dahulu. Berita tentang *Poli* juga dijumpai dalam catatan Cina. Berita pertama terdapat dalam catatan Dinasti Leang (502-556 M), kemudian dari Dinasti Sui (581-617 M), dan berita terakhir dari catatan Dinasti Tang (618-908 M). Mengenai letak daerah tersebut belum ada kesepakatan, De Casparis, mengatakan bahwa Poli tidak kurang penting dan menggemparkan, Poli dapat disamakan dengan Puri, lengkapnya Dalam-Puri yang disebut Lamuri oleh orang-orang Arab dan Lambiri oleh Marco Polo.⁹

Sejak tahun 1286, Lamri telah mengirim utusan-utusannya ke Cina. Dalam buku Dinasti Ming dijelaskan bahwa pada tahun 1405 M telah dikirim ke Lam-bu-li sebuah cap dan surat, kemudian pada tahun 1411 M negeri ini mengirimkan pula utusan ke Cina untuk membawa upeti. Perutusan tiba bersamaan dengan kunjungan perutusan Klantan dan Cail, kemudian kembali bersama-sama ekspedisi Cheng Ho. Pada tahun 1412 M, raja Maha-Ma-Shah (Muhammad Syah) dari Lam-bu-li bersama-sama Samudera mengutus sebuah delegasi ke Cina untuk membawa upeti. Di antara utusan-utusan Lam-bu-li ke Cina yang secara teratur dikirim setiap tahun terdapat nama Sha-che-han putera Mu-ha-ma-sha. Pada saat Cheng Ho pada tahun 1430 membawa hadiah-hadiah ke seluruh negeri, Lamri pun memperoleh bagian pula. Ada kemungkinan bahwa pengiriman hadiah-hadiah bukan untuk pertama kalinya karena lonceng Cakra Donya yang dahulunya tergantung di istana sultan Aceh

dan sekarang disimpan di Museum Aceh terdapat tulisan Cina dan Arab yang dibubuhi angka tahun 1409 M.¹⁰

Kerajaan Lamuri mempunyai sistem dan lembaga-lembaga pemerintahan yang tidak jauh berbeda dengan Kerajaan Islam Samudera Pasai. Salah seorang Raja yang terkenal dari Kerajaan Islam Lamuri seperti disebutkan dalam *Hikayat Atjeh* adalah Sultan Munawwar Syah. Sultan Munawwar Syah dianggap sebagai moyangnya sultan Aceh yang terkenal, yaitu Sultan Iskandar Muda. Pada halaman 9 dan 10 Hikayat Aceh diceritakan bahwa Raja Syah Mahmud kembali ke Lamri dengan bidadari kayangan. Ayahnya, Sultan Munawar Syah, sangat gembira dengan kejadian itu. Pada halaman 13 Hikayat Aceh diterangkan bahwa Sultan Munawar Syah mengawinkan cucu laki-lakinya yang bernama Raja Ibrahim Syah dengan cucu perempuannya yang bernama Arkiah. Sementara seorang cucu laki-lakinya yang lain bernama Raja Sulaiman Syah menikah dengan Sapiah. Pada halaman 14 Hikayat Aceh disebutkan bahwa Raja Munawar Syah adalah Raja Lamuri yang kawin dengan bidadari kayangan di Seracan. Pada akhir abad XV, pusat kerajaan Lamri dipindahkan ke Makota Alam yang terletak pada sisi utara Krueng Aceh di lembah Aceh.¹¹ Sejak itu, Lamri lebih dikenal dengan nama kerajaan Meukuta Alam di sekitar Pango Raya.

Sebelum dimekarkan pada akhir tahun 1970-an, ibu kota Kabupaten Aceh Besar adalah Banda Aceh. Kota Banda Aceh kemudian menjadi kotamadya sehingga ibukota Kabupaten Aceh Besar dipindahkan ke Jantho. Kota Jantho dihubungkan dengan angkutanyang yang jaraknya 60 km dari Banda Aceh, 28 km menuju Saree, dan 12 km menuju jalan utama Banda Aceh-Medan. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Kabupaten Aceh Besar merupakan daerah yang terdiri atas tiga kawedanan, yaitu Kawedanan Seulimuem, Kawedanan Lhoknga, dan Kawedanan Sabang. Kabupaten Aceh besar disahkan menjadi daerah otonom melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 dengan ibu kotanya Banda Aceh. Namun, sehubungan dengan tuntutan dan perkembangan daerah yang semakin maju dan berwawasan luas, Kota Banda Aceh sebagai

ibu kota dianggap kurang efisien lagi. Usaha pemindahan ibu kota tersebut mulai dirintis sejak tahun 1969, lokasi awalnya direncanakan di Kecamatan Indrapuri yang jaraknya 25 km dari Kota Banda Aceh.

Pada tahun 1976, usaha perintisan pemindahan ibu kota untuk kedua kalinya mulai dilaksanakan lagi dengan memilih lokasi yang lain, yaitu Kecamatan Seulimeum tepatnya di kemukiman Jantho yang jaraknya sekitar 52 km dari Kota Banda Aceh. Akhirnya, usaha yang terakhir ini membuahkan hasil yang ditandai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1976 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh ke kemukiman Jantho. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan Konsultan PT. Markam Jaya yang meninjau dari segala aspek, disimpulkan bahwa yang dianggap memenuhi syarat sebagai ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar adalah Kemukiman Janthoi dengan nama Kota Jantho.

Setelah ditetapkan Kota Jantho sebagai ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar, secara bertahap pemindahan ibukota terus dilakukan. Akhirnya, secara serentak seluruh aktivitas perkantoran resmi dipindahkan dari Banda Aceh ke Kota Jantho pada 29 Agustus 1983. Sementara peresmian dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Soepardjo Rustam, pada 3 Mei 1984. Wilayah darat Aceh Besar berbatasan dengan Kota Banda Aceh di sisi utara, Kabupaten Aceh Jaya di sebelah barat daya, serta Kabupaten Pidie di sisi selatan dan tenggara. Kabupaten Aceh Besar bagian kepulauan di sisi barat, timur, dan utaranya dibatasi oleh Samudera Indonesia, Selat Malaka, dan Teluk Benggala, yang memisahkannya dengan Pulau Weh, tempat di mana Kota Sabang berada. Selain daratan, Aceh Besar juga memiliki wilayah pulau, seperti Pulau Breueh dan Pulau Peunasoe (atau Pulau Nasi). Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda yang menjadi

salah satu pintu gerbang untuk masuk ke Provinsi Aceh berada di wilayah kabupaten ini. Pulau Benggala yang merupakan pulau paling barat dalam wilayah Republik Indonesia merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Besar.

Mesjid Babussalihin dan Mesjid Babul Khair terletak di Kabupaten Simeulue. Pada zaman kerajaan Aceh, Semeulue termasuk daerah yang berada di luar daerah inti. Ketika Belanda berkuasa di Aceh, Simeulue menjadi *onderafdeeling* dari Afdeeling Aceh Barat atau Afdeeling Westkust van Atjeh. Kabupaten Simeulue Berada sekitar 150 km dari lepas pantai barat Aceh. Ibukota Kabupaten Simeulue adalah Sinabang, jika diucapkan dengan logat daerah adalah *Si navang* yang berasal dari legenda Navang. Navang adalah si pembuat garam masa dulu di daerah Babang (pintu masuk teluk Sinabang). Dulunya Navang membuat garam dengan membendung air laut yang masuk ke pantai Babang, kemudian dikeringkan lalu jadilah garam. Garam Navang lambat laun menjadi dikenal di sekitar Ujung Panarusan hingga ke Lugu. Jika penduduk membutuhkan garam, mereka akan menuju si Navang, yang lambat laun konsonan 'V' pada Navang berubah menjadi Nabang.

Peningkatan status Simeulue menjadi kabupaten telah dirintis sejak lama. Hal itu lahir dari keinginan luhur masyarakat Simeulue sendiri, yaitu melalui prakarsa sejumlah tokoh dan segenap komponen masyarakatnya. Tonggak sejarah perjuangan ini dimulai sejak Kongres Rakjat Simeulue yang sedianya dilaksanakan pada tahun 1956, tetapi ada suatu kendala pada saat itu dan baru dilaksanakan pada tahun 1957. Untuk mewujudkan usaha itu, segala potensi dikerahkan; pikiran dan tenaga dicurahkan, keringat bercucuran dan semua anak pulau bahu membahu dan disertai dengan doa yang senantiasa dipanjatkan demi sebuah cita-cita. Akhirnya, perjuangan tersebut terwujud dengan keluarnya UU No. 48 Tahun 1999. Melalui UU tersebut lahirlah Kabupaten Simeulue sebagai Kabupaten Otonom dalam khazanah Pemerintahan Indonesia. Selanjutnya, pada 12 Oktober 1999, Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Ad Interim Faisal Tanjung meresmikan lahirnya Kabupaten Simeulue.

Masyarakat Simeulue mempunyai adat dan budaya yang berbeda dengan masyarakat Aceh. Masyarakat Simeulue memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri dalam khazanah budaya Aceh, di antaranya terdapat bahasa yang beraneka ragam. Namun, dalam pergaulan sehari-hari terdapat tiga bahasa utama yang dominan, yakni bahasa Devayan, bahasa Sigulai, dan bahasa Leukon. Bahasa Devayan kebanyakan digunakan oleh penduduk yang berdomisili di Kecamatan Simeulue Timur, Teupah Selatan, Teupah Barat, Simeulue Tengah, dan Teluk Dalam. Adapun bahasa Sigulai lebih banyak digunakan oleh masyarakat di Kecamatan Simeulue Barat, Alafan, dan Salang. Sementara bahasa Leukon digunakan oleh penduduk Desa Langi dan Lafakha di Kecamatan Alafan. Selain itu, sebagai bahasa pengantar sehari-hari sesama masyarakat yang berlainan bahasa di Simeulue digunakan bahasa Jamu atau Jamee (tamu). Bahasa ini diperkirakan dibawa oleh para perantau niaga dari Minangkabau dan Mandailing. Tidak sedikit dari mereka yang kemudian tinggal atau menetap di daerah ini.

Mesjid Gunong Kleng salah satu mesjid tua yang bercirikan keacehan terletak di Desa Gunong Kleng Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. Penduduk daerah ini pada mulanya membuka perkebunan lada yang kemudian membuat daerah ini dikenal dan disinggahi oleh kapal-kapal Inggris untuk membeli rempah-rempah. Karena semakin maju maka dibentuklah federasi *Uleebalang* yang mengatur tata pemerintahan negeri. Federasi itu kemudian dinamai Kaway XVI yang diketuai oleh *Uleebalang Keudruen* Tjiek Ujong Kala. Disebut Kaway XVI karena federasi itu dibentuk oleh enam belas *Uleebalang*, yaitu Uleebalang Tanjong, Ujong Kala, Seunagan, Teuripa, Woyla, Peureumbeu, Gunoeng Meuh, Kuala Meureuboe, Ranto Panyang, Reudeub, Lango Tangkadeuen, Keuntjo, Gume/Mugo, Tadu, dan Seuneu'am. Aceh Barat bertambah maju ketika Kerajaan Aceh dipimpin Sultan Ibrahim Mansjur Sjah

(1841-1870). Sultan Aceh membuka perkebunan lada secara besar-besaran di wilayah tersebut.

Kabupaten Aceh Barat terletak sekitar 175 km tenggara kota Banda Aceh. Aceh Barat juga dikenal sebagai daerah kelahiran Pahlawan Nasional Teuku Umar Johan Pahlawan. Meulaboh sebagai kota Kabupaten Aceh Barat merupakan kota terbesar di pesisir barat-selatan Aceh dan salah satu area yang paling parah dilanda bencana tsunami 2004. Pekerjaan sebagian besar penduduk Meulaboh mencerminkan kehidupan perkotaan, yakni perdagangan dan jasa. Pada masa pemerintahan Sultan Djamalul Alam, negeri ini dijadikan daerah perkebunan lada. Untuk mengolah kebun-kebun didatangkan orang-orang dari Pidie dan Aceh Besar. Disusul kemudian oleh kedatangan orang-orang Minangkabau yang lari dari negerinya akibat pecahnya perang Padri. Sesampainya di Teluk Pasir Karam, pendatang dari Minangkabau itu sepakat untuk berlabuh “disikolah kito berlaboh”. Sejak itulah Negeri Pasir Karam dikenal dengan nama Meulaboh yang berasal dari kata berlaboh.

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, Kabupaten Aceh Barat termasuk bagian dari wilayah Afdeeling Westkust van Atjeh atau Aceh Barat dengan ibukotanya Meulaboh. Afdeeling Westkust van Atjeh (Aceh Barat) merupakan suatu daerah administratif yang meliputi wilayah sepanjang pantai barat Aceh, dari gunung Geurutee hingga Singkil dan kepulauan Simeulue. Afdeeling Aceh Barat terdiri atas 6 (enam) *onderafdeeling*, yaitu Meulaboh, Tjalang, Tapaktuan, Simeulue, Zuid Atjeh dengan ibukota Bakongan, Singkil dengan ibukota Singkil. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara, wilayah Aceh Barat dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Selatan.

Pada Tahun 1996, Kabupaten Aceh Barat dimekarkan lagi menjadi 2 (dua) Kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat meliputi kecamatan Kaway XVI, Johan Pahlwan, Seunagan, Kuala,

Beutong, Darul Makmur, Samatiga, Woyla, Sungai Mas, Teunom, Krueng Sabee, Setia Bakti, Sampoi Niet, Jaya dengan ibukotanya Meulaboh, dan Kabupaten Adminstrtif Simeulue meliputi kecamatan Simeulue Timur, Simeulue Tengah, Simeulue Barat, Teupah Selatan dan, Salang dengan ibukotanya Sinabang. Selanjutnya, pada tahun 2002 Kabupaten Aceh Barat daratan yang luasnya 1.010.466 Ha, dimekarkan menjadi tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Barat. Pemekaran itu didasarkan pada Undang-undang N0.4 Tahun 2002 yang mensahkan daerah tersebut untuk dimekarkan.

Mesjid Tengku Di Kila terletak di Desa Kila, Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya. Kabupaten Nagan Raya adalah sebuah kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Ibukotanya Suka Makmue, yang berjarak sekitar 287 km atau 6 jam perjalanan dari Banda Aceh. Kabupaten ini berdiri berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2002, tanggal 2 Juli 2002 sebagai hasil pemekaran Kabupaten Aceh Barat. Kata *Nagan* memiliki kemiripan dengan nama 5 kecamatan yang ada di kabupaten tersebut, tetapi secara bahasa sampai sejauh ini belum diketahui maknanya dalam kosakata Aceh. Hal itu disebabkan belum ditemukan landasan historis berdasarkan hasil penelitian. Adapun kata *Raya* berarti besar, menunjuk semua kecamatan yang ada di Nagan, kendati tidak semua nama kecamatan tersebut tercantum kata Nagan, seperti Beutoeng.

Sejauh ini, sumber-sumber tertulis tentang Nagan masih sangat terbatas karena belum banyak yang melakukan penelitian tentang daerah ini. Hal itu dapat dimaklumi karena daerah ini letaknya jauh ke pedalaman. Selain itu, sebelum dimekarkan menjadi kabupaten, daerah ini hanya sebagai bagian dari Kabupaten Aceh Barat. Oleh karena itu, sejarah tentang daerah ini masih mengandalkan informasi dari cerita rakyat. Berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat, Nagan termasuk daerah yang sudah lama keberadaannya. Hal itu dapat diamati bahwa daerah ini disebut-sebut dalam hikayat tentang Aceh pada zaman dahulu. Masyarakat menyakini bahwa orang

pertama yang menjadi raja di daerah ini adalah Meurah Jernang.¹² Merah Jernang seorang raja yang adil dan pemurah sehingga rakyatnya hidup dengan makmur dan tidak banyak tingkah. Penguasa-penguasa daerah ini untuk masa-masa berikutnya tetap dilanjutkan oleh keturunan Merah Jernang. Bahkan daerah ini juga pernah dipimpin oleh wanita. Pada zaman Orde Baru, daerah ini lebih dikenal sebagai daerah transmigrasi. Dengan demikian, daerah ini menjadi objek yang menarik untuk penelitian tentang masyarakat majemuk.

Mesjid Tua Kerajaan Trumon merupakan salah satu lambang kemegahan dan kebanggaan masyarakat Trumon. Mesjid bersejarah ini secara administratif berada di Desa Keude Trumon, Kecamatan Trumon. Sementara Mesjid Tuwo Padang terletak di Kelurahan Padang Kecamatan Tapaktuan. Adapun Mesjid Pulo Kambing, sekarang terkenal dengan nama barunya yaitu Mesjid Nuril Huda. Mesjid tersebut terletak di Desa Pulo Kameng Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh. Sebelum berdiri sebagai kabupaten otonom, wilayah Kabupaten Aceh Selatan adalah bagian dari Kabupaten Aceh Barat. Pembentukan Kabupaten Aceh Selatan ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 pada 4 November 1956. Namun, pada tahun 2002, berdasarkan UU RI Nomor 4 tahun 2002, Kabupaten Aceh Selatan dimekarkan menjadi tiga Kabupaten, yaitu: Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kabupaten Aceh Selatan.

Daerah Aceh bagian selatan ini didiami oleh beberapa etnis, di antaranya Kluet dan Aneuk Jamee. Nama Aneuk Jamee merupakan sebutan yang berasal dari etnis Aceh, sedangkan para ahli etnologi menyebutnya sebagai Melayu Pesisir Barat. Ketika Belanda masuk ke daerah ini, orang-orang Minangkabau yang prokerajaan Aceh tidak disuakai sehingga mereka pindah ke Aceh. Pemurnian ajaran Islam oleh Syekh Burhanuddin Ulakan dengan konsep: *adat bersendi syariat dan syariat bersendi kitabullah*, munculnya dua golongan di masyarakat, yaitu mereka yang setuju pemurnian dan yang tidak setuju. Konflik kedua

golongan yang berkepanjangan menyebabkan sebagian besar orang Minangkabau di pedalaman hijrah ke Aceh. Untuk menampung dan menentukan tempat permukiman orang Minangkabau yang hijrah ke Aceh, Sultan Aceh menentukan sembilan tempat permukiman yang terkenal dengan istilah Rantau Nan Sambilen. Daerah tersebut, antara lain Singkel, Bakongan, Kandang, Tapaktuan, Samadua, Labuhanhaji, Manggeng, Susoh, dan di sekitar Meulaboh.

Selain itu, daerah ini juga menyinpan berbagai cerita yang sangat menarik, seperti cerita pertarungan antara manusia dengan seekor naga. Dari cerita ini kemudian diyakini pula sebagai asal usul nama kota Tapaktuan.¹³ Demikian pula kisah heroik perjuangan melawan penjajahan Belanda. Kisah kepahlawann rakyat di wilayah ini penuh dengan berbagai cerita misteri, seperti seseorang dapat menghilang ketika berhadapan dengan musuh dan cerita tentang kesaktian pedang Bakongan. Teuku Cut Ali dan Raja Angkah menjadi simbol perjuangan di wilayah Aceh bagian selatan ini.¹⁴ Bahkan kisah tersebut diabadikan dalam sebuah ungkapan, yaitu *prang Bakongan cukup beureuhi, kaphe neutadi keunong bak jungka, mati Angkasah tinggal Cut Ali, prang beureuhi lebeuh bak nyangka*. Daerah ini juga termasuk salah satu pusat studi Islam di Aceh, terutama tentang sistem tarikat, seperti Tharekat Naksyabandiyah. Di Aceh Selatan, ulama Tarikat Naqsyabandiah yang sangat dikenal adalah Teungku Haji Muda Waly. Sebagai salah satu daerah pusat studi keislaman di Aceh maka wajarlah di daerah ini banyak terdapat mesjid-mesjid bersejarah.

Bagi kami, keistimewaan daerah-daerah yang di masa kolonial dikenal sebagai *afdeeling* Asahan dan *onderafdeeling* Labuhan Batu terletak pada dua hal, yaitu perubahan dan kesinambungan sosialnya serta akibat-akibat yang timbul karena proses itu. Perubahan dan kesinambungan sosial di kawasan ini telah tersurat dalam sejarah (paling tidak) enam kerajaan Melayu pada dua kabupaten ini yaitu Asahan, Batubara, Bilah, Kota Pinang, Kualuh dan Panai. Berdasarkan kecenderungan pola rekonstruksinya, keberadaan awal enam kerajaan Melayu

itu memiliki sangkut paut dan/atau dihubung-hubungkan dengan peristiwa-peristiwa besar yang berlangsung atau memberi pengaruh besar bagi daerah kekuasaan penguasa pribumi (lama) yang kemudian didaulat sebagai raja pertama.

Asahan misalnya, sejarah kerajaan yang menanamkan pengaruhnya atas kerajaan-kerajaan kecil di bagian Tenggara Sumatera Timur ini mulai diceritakan ketika armada perang Aceh singgah di sebuah kampung sepi di ujung tanjung dekat muara sungai besar yang tenang. Tempat di mana Sultan Aceh melepas lelah itu kemudian dinamai Tanjung Balai sedangkan sungai besar di lingkungan yang asri kemudian hari dikenal sebagai sungai Asahan. Kedatangan armada perang yang kemudian diketahui menyerang Johor itu telah menjadi landasan paling penting dalam konstruksi sejarah Asahan. Dalam konstruksi awal inilah tersebut kisah Siti Ungu Putri Berinai anak Raja Panai yang disebut Raja Simargolang berkuasa di hulu sungai. Dalam cerita itu, singkatnya, Siti Ungu dipersunting Sultan Iskandar Muda dari Aceh untuk kepentingan politik. Seorang anak lelaki yang lahir dari perkawinan itu yang dikenal sebagai Sultan Abdul Jalil Rahmatsyah kemudian didaulat sebagai Sultan Asahan I.

Cerita tentang Asahan sebelum disinggahi armada Aceh hampir tidak pernah dipublikasi meskipun dalam cerita yang disebutkan itu terdapat sejumlah sosok patron bumiputera antara lain, Raja Simargolang, Raja Panai, Batara Sinomba atau Batara Gorga Pinayungan, Putri Lenggogeni dan Patuan Hajoran. Keterbatasan makluman tentang sosok-sosok *patron* yang sudah ada sebelum Aceh datang membuat cerita tentang mereka dan peran yang dijalani terkesan sekedar melengkapi cerita besar itu. Pada peristiwa di atas, Siti Ungu Raja Simargolang itupun disebut tidak lebih sebagai penguasa pribumi yang bertahta di Bandar Pulau. Cerita lain tentang siapa sesungguhnya sosok ini sangat terbatas. Predikat ibunda Sultan Asahan I dianggap sudah lebih dari cukup untuk seorang perempuan yang menurunkan seorang raja yang dimakamkan di Pulau Rakyat, persis di tepi sungai Asahan.

Kecenderungan konstruksi sejarah ini telah memaksa masyarakat awam bahkan sejarawan untuk harus melihat penetrasi asing (Aceh dan Pagaruyung) serta pengaruh yang dibawanya (terutama agama Islam dan pengislaman yang mengatur konsep pertuanan, *patron-client* atau *superior-inferior*) sebagai hal paling penting dalam sejarah kerajaan-kerajaan di Pantai Timur Sumatera. Di sisi lain, tradisi lisan yang menjadi salah satu sumber penulisan sejarah kelompok etnik tidak menyediakan makluman lebih jauh tentang Asahan sebelum Aceh. Keadaan ini bisa saja menjadi celah untuk membangun suatu rekayasa peristiwa yang berdampak secara sistematis terhadap asal-usul dan penggolongan kelompok-kelompok etnik di Sumatera Utara. Dalam konteks ini perlu dipahami kembali adagium bahwa sejarah adalah (dinamika) politik masa lalu.

Tanpa bermaksud mengecilkan keberadaan penguasa-penguasa lokal yang menjadi *patron* di pedalaman dan sejarah yang tersimpan sebagai tradisi lisan, pengislaman lewat perkawinan politik menjadi pangkal dari dimulainya hampir semua cerita tentang keberadaan kekuasaan Melayu. Dalam cerita tentang asal-mula kerajaan Deli dan Serdang, ada sosok Muhammad Dalik atau Gocah Pahlawan yang menjadi Panglima Perang Aceh asal Delhi, India. Gocah Pahlawan menikahi Nang Baluan putri penguasa lokal dan karena pernikahan itu nenek moyang Sultan Deli dan Serdang itu mendapatkan *privilege* dan didaulat sebagai raja sana. Demikian pula dengan kisah tentang penguasa dan asal-usul penduduk di Batubara yang berasal dari Minangkabau. Cerita tentang Kerajaan Pinang Awan (Kota Pinang), Kualuh, Bilah dan Panai pun menunjukkan kecenderungan demikian.

Pengaruh para pendatang yang dipandang superior (lebih kuat, lebih baik), cenderung ekspansif dan menguasai teknologi baru berhasil mengubah struktur kekuasaan lama. Pemberian gelar *sultan*, *wazir*, *wakil*, *sutan* atau gelar asing lain yang menunjukkan pengaruh dan hubungan patronasial yang berlangsung secara damai. Penerimaan ini merupakan bagian dari romantisme dari masa yang lebih jauh bahwa Aceh atau

Minangkabau (dan juga Barus) karena kemajuan negeri-negeri itu di bidang politik, ekonomi (perdagangan) dan militer - menurut Emilio Modigliani yang mengunjungi Bakkara dan berjumpa dengan Guru Somalaing Pardede- telah menjadi pusat orientasi para penguasa di daerah-daerah pedalaman. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika persinggungan dengan dua negeri yang ditautkan oleh dinamika perdagangan lada di Pantai Barat Sumatera memberi pengaruh besar pada daerah-daerah yang disebut di atas.

Konstruksi sejarah Kabupaten Asahan dan Labuhan Batu yang terbilang baru pun menarik garis waktunya hingga jauh ke belakang. Padahal, secara administratif Asahan dan Labuhan Batu 'baru lahir' sesudah 1858 ketika Siak menyerahkan kedaulatannya pada Hindia Belanda sebagai imbalan atas jasa tentara Belanda menumpas pemberontakan Adam Wilson, pedagang bebas Inggris yang merongrong kekuasaan Sultan Syarif Ismail dari Siak. Hal ini termasuk sejumlah hal yang telah menjadi suatu rangkaian peristiwa atau menjadi penyebab dari beberapa akibat pada peristiwa lainnya kadang dianggap sebagai bagian yang berdiri sendiri (tunggal). Ini membuat 'benang merah' yang menghubungkan fakta-fakta keras dari satu peristiwa terputus karena ada dianggap tunggal ditambah pencampuran fakta sejarah dan fiksi dalam peristiwa bersejarah.

Terlepas dari kecenderungan pemerintah daerah dalam memaklumkan sejarah daerahnya, perubahan dan kesinambungan sosial akibat pemekaran di Kabupaten Asahan dan Labuhan Batu tidak saja membelah daerah yang dahulu bersatu secara administratif tetapi turut membuat daerah hasil pemekaran terbelah secara emosional. Perkembangan yang menjadi bagian dari sejarah pemerintahan daerah di Indonesia sejak 1999 ini membuat kabupaten Asahan mekar kembali dengan lahirnya Kabupaten Batubara (beribukota di Limapuluh) menyusul penetapan Kota Tanjung Balai masa kolonial. Kabupaten Labuhan Batu yang sekarang ini masih beribukota di Rantau Prapat pun dimekarkan menjadi Kabupaten Labuhan

Batu Utara (Aek Kanopan), Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Kota Pinang) dan yang rencananya akan dimekarkan ialah Kota Rantau Prapat.

Pemekaran yang mempersempit batas-batas administratif Asahan dan Labuhan Batu menjadi batas-batas kultural telah membangkitkan romantisme sejarah kekuasaan pada daerah yang akan/sudah dimekarkan. Romantisme sejarah di kabupaten yang merupakan bekas daerah kekuasaan Kesultanan Negeri Asahan (beribukota di Tanjung Balai), Batubara (Tanjung Tiram), Bilah (Negeri Lama), Kota Pinang (Kota Pinang), Kualuh (Tanjung Pasir) dan Panai (Labuhan Bilik) ini telah memberi jalan bagi cerita-cerita tentang sosok-sosok penguasa bumiputera dan masa keemasan daerah itu di masa lalu untuk tampil sebagai 'cerita resmi'. Cerita-cerita yang semula disampaikan secara lisan itu kini naik derajat menjadi sejarah sosial yang telah dituliskan dan menjadi rujukan bagi masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Dalam penyusunan sejarah daerah banyak yang tidak disusun dengan kaidah ilmiah. Semua cerita sejarah dianggap penting sehingga komposisinya 'gemuk' dan tidak dibahas mendalam. Semua ruang sejarah pun dianggap penting, mulai dari tingkat keluarga dan kampung yang kalau ditelusuri akan berhubungan dengan perubahan sosial atau nasionalisme namun kadang ada saja cerita yang dipaksahubungkan dengan peristiwa besar atau kisah-kisah tertentu agar terkesan tidak ketinggalan atau menjadi bagian dari *accepted history* itu. Pengindonesiaan sejarah lokal atau membuat peristiwa-peristiwa besar menjadi bagian tersendiri dari peristiwa yang lebih kecil ini terjadi karena dipahami secara keliru. Perkembangan ilmu sejarah memberikan pilihan dan penekanan pada aspek-apsek yang dipandang penting.

Cerita tentang 'Batak Melayu' misalnya, merupakan modal unik dan penting dalam penulisan sejarah kabupaten Asahan dan Labuhan Batu serta daerah pemekarannya. 'Batak Melayu' atau perantau lain yang mengaku atau menjadi Melayu ini lahir dari migrasi bergelombang para anggota kelompok etnik

(Batak) dari pedalaman Asahan dan Labuhan Batu. Prosesnya berlangsung panjang dari masa pra-kolonial hingga kemerdekaan. Migrasi dan Batak Melayu ini dapat dilihat sebagai pangkal keberadaan kampung-kampung Melayu dan persawahan di dataran rendah (di Labuhan Batu Utara disebut 'Sawah Lebar'). Pilihan para perantau Batak untuk memeluk Islam membuat kisah mengenai 'Batak Melayu' dan apa yang mereka kembangkan di perantauan membuat dua kabupaten ini menjadi lapangan istimewa bagi kajian sejarah (*ethnohistory*), antropologi dan sosiologi.

Selain itu, cerita tentang tokoh-tokoh daerah yang dipandang terkemuka berikut peran dan sumbangsihnya pada kawasan turut pula direkonstruksi. Para penguasa bumiputera sebelum pengaruh asing masuk ditelusuri secara genealogis lalu dikenalkan kembali untuk sejumlah kepentingan. Di antara kepentingan itu ialah mencari akar sejarah daerah yang selalu dijadikan dasar legitimasi pemekaran daerah disamping (apa yang dinamai) aspirasi rakyat. Kisah tentang Sultan-sultan Melayu mulai dari sosok yang paling awal hingga terakhir berikut para bangsawannya yang dibantai massa dalam Revolusi Sosial 1946 (di Kota Pinang disebut *kuhanberusuhan*) juga dihidupkan kembali. Kini, dalam suasana yang sudah berubah, kisah hidup para sultan terakhir yang kekuasaannya dijungkirbalikkan kira-kira enam bulan setelah Indonesia merdeka yang dihidupkan itu (ternyata) berisi kerinduan juga semacam penyesalan.

Bangunan atau benda-benda peninggalan dari masa lalu yang ada di Asahan dan Labuhan Batu pun tidak kalah istimewanya. Mesjid-mesjid lama warisan para raja serta segala hal yang melekat pada bangunan itu bukan saja unik karena bentuk dan coraknya tetapi juga menarik oleh nilai-nilai yang dikandungnya. Mesjid-mesjid itu menjadi pusat orientasi daerah sekaligus penaut para perantau dari tempat di mana mesjid itu berada. Beberapa mesjid menjadi tujuan para peziarah. Makam-makam (dalam hal ini ialah kuburan) yang dikeramatkan di sejumlah tempat pada dua kabupaten itu pun demikian, menjadi

tempat yang mengantari orang-orang yang ingin memohon, menyampaikan atau menunaikan sesuatu kepada sang pencipta. Terdapat pula sejumlah *maqom* atau petilasan tempat guru utama maupun pengikut tarekat menunaikan tahapan tertentu dalam ritualnya.

Persebaran bangunan yang menjadi warisan penguasa lokal di masa lalu terbilang cukup merata. Berbagai peninggalan (kebanyakan ialah) makam yang dikeramatkan termasuk mesjid-mesjid dalam berbagai corak arsitektur tersebar mulai dari daerah pedalaman di lembah-lembah dan punggung gunung Wilhelmina atau Bukit Barisan sampai ke pesisir pantai Timur yang berlumpur. Persebaran atas dasar keadaan geografi ini telah menjadi dasar penggolongan (stratifikasi) sosial sekaligus pembagian tingkat peradaban dan teritorial yang melahirkan sejumlah dikotomi yang masih berlangsung hingga kini, antara lain pesisir-pedalaman (kini mungkin telah bergeser jadi Pantai Timur [Sumatera Timur]-dan Pantai Barat [Tapanuli]), Melayu dengan Batak (kemudian menjadi Islam-Kristen), kerajaan-daerah takluk (jajahan) atau bandar (kota) dengan dusun (kampung).

Perkembangan perkebunan karet dan kelapa sawit sejak awal abad ke-20 semakin menguatkan perubahan dan kesinambungan sosial di kawasan yang termasuk dalam *Cultuurgebied* ini. Jika permasalahan di masa lalu menyangkut identitas maka sesudah perkebunan berkembang dan menjadi ciri penting kawasan ini masalahnya semakin kompleks. Permasalahan agraria tahun 1950-an disusul konflik antara perusahaan perkebunan dengan petani atau antar-kelompok masyarakat telah menjadi konflik umum di Asahan dan Labuhan Batu. Selain itu, perubahan lingkungan akibat pembukaan (lebih tepat pembalakan) hutan untuk perluasan perkebunan kelapa sawit yang mendorong penyeragaman tanaman langsung mempengaruhi vegetasi dan lingkungan perairan yang menjadi ciri penting kawasan ini.

Kemiskinan dan kemakmuran di perkebunan yang pernah dibahas R.E. Elson (1988) merupakan akibat-akibat yang

bersifat kontras. Pada satu sisi, perkebunan memang mendatangkan keuntungan berlimpah bagi kelompok pemodal namun pada sisi lain akibat praktik perburuan yang belum adil, kemiskinan petani atau buruh kebun muncul sebagai bagian dari perkebunan. Eksploitasi petani atau buruh perkebunan untuk berbagai kepentingan tuan kebun (mulai dari mandor di lapangan sampai administratur) telah menjadi kelaziman yang tampaknya sulit untuk diubah. Kajian Ann L. Stoler (2005) menunjukkan kecenderungan itu sehingga perkebunan yang menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Asahan dan Labuhan akan tetap seperti dahulu kala.

Di luar pembahasan mengenai dampak perubahan dan kesinambungan sosial di Asahan dan Labuhan Batu dari masa lalu hingga kini, kabupaten yang ibukotanya berkembang di alur jalan Lintas Timur Sumatera yang selalu padat - kecuali kota Tanjung Balai yang berkembang karena pelabuhan- tergolong daerah yang strategis. Kota dan pekan-pekan pada enam kabupaten dapat diakses dengan mudah dari Medan, ibukota Sumatera Utara. Mobilitas penduduk Asahan dan Labuhan Batu dari dan ke Medan serta kota-kota yang menjadi kampung halaman orang 'Batak Melayu' pada enam kabupaten itu tergolong tinggi berkat keberadaan jalur kereta api, jalan raya yang cukup baik, kekerapan angkutan antar kota antar provinsi ditambah keberadaan perusahaan perkebunan skala besar yang telah menjadi tempat bergantung hampir sebagian besar penduduk Asahan dan Labuhan Batu.

¹ Muhammad Ibrahim dkk. *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1991, hlm. 70.

² Teuku Iskandar, *de Hikayat Aceh*, (terjemahan). Banda Aceh: Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Museum Daerah Istimewa Aceh, 1978, hlm. 142 – 143 dan 146.

³ *Ibid.*, hlm. 35.

⁴ Namun, hasil kajian Hoesein Djajadiningrat terhadap karya-karya sejarah Melayu, dia berpendapat bahwa Ali Mughayatsyah mulai memerintah pada tahun 1514.

⁵ K.F.H. van Langen. *Susunan Pemerintahan Aceh Semasa Kesultanan*. Terjemahan Aboe Bakar. Cetakan keempat. Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 2022, hlm. 1.

⁶ Masalah federasi pemerintahan di Kerajaan Aceh ini dapat dibaca dalam Van Langen, K.F.H. "*De Inrichting van het Atjehsche Staatsbestuur Onder Het Sultanaat*" *BKI* 37, 1888. dan buku Mohammad Said, *Atjeh Sepandjang Abad Jilid I*,

⁷ *Ibid.*

⁸ Tome Pires, *The Suma Oriental or Tome Pire vol. I*, translated and edited by Arnando cortesao. (London Printed for the Hakluyt, Society, 1944)), hlm. 138.

⁹ W.P. Groeneveldt, *Historical Notes on Indonesia Malaya Compiled from Chinese Sources*, (Jakarta: CV. Brata, 1960), hlm. 82-84. J.G. De Casparis, *Perkembangan Pengetahuan Sejarah Indonesia Lama*, terjemahan Said Raksakusumah, (Bandung :Tetai, 1961), hlm. 32.

¹⁰ Teuku Iskandar, *op. cit.*, hlm. 26

¹¹ *Ibid.*, hlm. 28-30.

¹² Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat. *Piasan Raya Alam Budaya Pantai Barat*. Meulaboh: Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat, 1996, hlm. 56.

¹³ Lihat M. Soetan Singosoro, *Sja'ir Poetri Naga di Tapa'toean*. Batavia Centrum: Balai Pustaka, 1932.

¹⁴ A. Doup, *Sejarah Pendudukan Belanda di Tapaktuan dan Daerah-Daerah Kenegerian di bagian Selatan Daerah Aceh*, terj. Aboebakar. (Banda Aceh: PDIA, 1980), hlm. 18.

3

RAGAM, LANGGAM DAN 'NASIB' MESJID-MESJID BERSEJARAH DI ACEH DAN SUMATERA UTARA

Megah, berkubah besar, indah berhiaskan ornamen khas dari zamannya membuat mesjid-mesjid tua di Aceh dan Sumatera Utara yang dibangun dengan arsitektur modern pada masa kolonial tampak berbeda dari bangunan lain. Dindingnya dilapisi cat berwarna terang sehingga terlihat memancarkan 'aura' klasik dari setiap sudut bangunan yang dihiasi beragam ornamen bermotif bunga, daun, sulur dan benda-benda geometri yang dirangkai padu.

Mesjid-mesjid tua lain, peninggalan ulama atau 'mesjid rakyat' yang masih dipelihara masyarakatnya memiliki 'aura' yang serupa meskipun tidak semegah mesjid-mesjid tua di pusat kekuasaan yang berdinding batu, berpilar tinggi, berkubah besar dan lebih luas bangunannya. Sejarah, kisah tokoh terkemuka, derajat ketuaan dan kisah di balik masing-masing mesjid tua menempatkan semua mesjid tua dalam buku ini dalam satu ranah perbincangan: pemetaan mesjid bersejarah.

Mesjid-mesjid bersejarah di Aceh yang dipetakan ialah Mesjid Raya Baiturrahman di Banda Aceh, Mesjid Indrapuri di Aceh Besar, Mesjid Babussalihin dan Babul Khair atau Mesjid Teungku Di Ujung di Pulau Simeulue, Mesjid Gunong Kleng, Kaway XVI di Aceh Barat, Mesjid Teungku Di Kila, Seunagan di Nagan Raya, tiga mesjid di Aceh Selatan yaitu Mesjid Tua Trumon, Trumon, Mesjid Tuwo Padang, Tapaktuan dan Mesjid Pulau Kambing, Kutafajar di Kluet Selatan.

Mesjid-mesjid di Sumatera Utara adalah Mesjid Raya Sultan Ahmadsyah di Tanjung Balai, Mesjid Raya Tanjung Pasir di Kualuh, Labuhan Batu Utara, Mesjid Raya Nurul Yaqin di Gunting Saga di Kualuh Selatan, Mesjid Lama Tanjung Medan di Tanjung Medan, Mesjid Besar Kota Pinang di Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan, Mesjid Agung Rantau Prapat, Labuhan Batu dan Mesjid Agung Kisaran di Asahan.

Sedikit berbeda dengan mesjid-mesjid di Aceh, kemegahan mesjid-mesjid pada dua kabupaten di Sumatera Utara itu terpancar dari profil bangunan dan kubah besar yang menjadi titik tengah bangunan. Sebilah 'mata tombak' panjang yang umumnya diberi kriya bulan sabit dan bintang di ujungnya atau dua-tiga bebola yang ditusuk seperti sate menjadi hiasan di puncak kubah. Ornamen Melayu yang diilhami ragam bentuk bunga, buah-buahan atau tumbuhan tertentu terukir padu pada ruang mihrab, mimbar, umpak pilar, lengkungan, daun pintu, jendela dan dinding mesjid-mesjid itu.

Kuning, hijau, krem atau perpaduan warna kuning-hijau-krem yang menarik itu menjadi warna utama mesjid-mesjid peninggalan kerajaan Melayu pada dua kabupaten yang telah disebut. Penggunaan warna kuning dan hijau yang menjadi simbol keagungan para Sultan Melayu di masa lalu itu membuat mesjid-mesjid tua yang umumnya dibangun pada masa kolonial itu terasa sangat berbeda. Perbedaan yang dirasakan itu membuat hal-hal atau bagian-bagian tertentu dari mesjid itu mulai dari warna, corak atau ornamen tertentu, model mihrab bahkan sumber air atau tempat berwudhu' memiliki arti dan kisah tersendiri bagi masyarakat sekitarnya. Namun bukan hal mistik jika mesjid yang dibangun oleh para raja terasa berbeda dengan mesjid-mesjid yang dibangun sesudahnya.

Pancaran 'aura' klasik dari mesjid-mesjid peninggalan kerajaan pun terasa demikian, megah oleh ciri-ciri klasik. Meskipun rasa aura ini sering dikait-kaitkan dengan hal-hal mistik, pancaran itu terasa namun lebih disebabkan faktor usia. 'Bau lama' ditambah kombinasi beberapa corak arsitektur dunia yang padu, kualitas bangunan yang disokong bahan-bahan bangunan terbaik dari masa lalu, teknik pengerjaan yang halus serta peletakan simbol-simbol dengan makna tertentu membuat aura klasik memancar dari setiap sudut bangunan. Kisah-kisah setengah fiksi dan kadang berbau mistik yang melingkupi pembangunan mesjid atau kisah di balik mesjid itu menjadi bagian yang paling menentukan bagaimana seharusnya mesjid itu diperlakukan.

Bagian ketiga dari empat bagian dalam laporan ini akan memberikan gambaran mengenai ragam mesjid, langgam bangunan yang menampilkan ciri khas serta 'nasib' atau keadaan mesjid-mesjid bersejarah di Asahan dan Labuhan Batu di masa lalu dan masa kini. Keragaman bentuk, nilai dan kesejarahan mesjid-mesjid pada dua kabupaten di atas sejalan dengan penerapan berbagai langgam bangunan yang dipadupadankan oleh perencana bangunan. Pemadupadanan langgam bangunan bercorak klasik maupun kontemporer yang berkembang di semenanjung Arab, Eropa, India, Turki dan Persia membuat sejumlah mesjid di daerah itu benar-benar terlihat unik terlebih ketahanan mesjid itu melampaui 'ketahanan' istana yang menjadi pasangan mesjid.

Perpaduan langgam bangunan yang unik itu merupakan khashanah kekayaan arsitektur kombinasi yang menjadi ciri arsitektur Melayu di Sumatera Utara. Corak kombinasi yang untuk beberapa kategori disebut Djoko Soekiman dengan *Indis* ini bukan saja menampilkan gaya hidup Indis dan corak bangunan semata. Dalam kebudayaan *Indis*¹ ini terdapat kisah tentang tentang alih teknologi dan transformasi teknik pertukangan kontemporer yang berlangsung dari jurutera Belanda kepada golongan pekerja teknik mulai dari tingkat mandor sampai tukang yang didominasi oleh tukang dari etnik Tionghoa. Oleh sebab itu, perpaduan langgam yang melahirkan ciri arsitektur yang unik bahkan didaulat menjadi ciri penting dalam arsitektur Melayu dapat menjadi landasan untuk merekonstruksi nilai-nilai budaya, tradisi dan kesejarahan yang memang lekat pada mesjid-mesjid lama itu.

Para raja, ulama atau tokoh terkemuka yang membangun mesjid-mesjid unik di daerah itu pun memiliki landasan kuat mengapa mesjid kerajaan harus dibangun megah seperti apa yang masih dapat dilihat sampai kini. Terlepas dari pandangan pesimistik mengenai sumber ekonomi raja-raja yang disokong pemerintah kolonial (elaun, konsesi termasuk permasalahan *belasting* dan *rodi*), mesjid-mesjid utama yang dibangun di pusat administrasi kerajaan ini merupakan kelengkapan penting dalam

struktur tata ruang bandar kerajaan. Lebih jauh, landasan pembangunan mesjid tentu dapat ditelusuri terutama untuk mengungkap jejak kesejarahan yang lebih panjang; tentang kisah (silsilah) para raja, sejarah negeri, hubungan antara raja dengan rakyat serta perubahan dan kesinambungan sosial (dampak modernisasi, perubahan ekologi, gaya hidup dan lain-lain).



Gambar 1: Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh
(Foto: acehpoegeutanyo.blogspot.com)

MESJID RAYA BAITURRAHMAN BANDA ACEH: *ICON ACEH DI DUNIA*

Mesjid Raya Baiturrahman merupakan mesjid yang terbesar dan termegah di Aceh dan menjadi kebanggaan masyarakat Aceh. Orang muslim yang datang ke Banda Aceh rasanya belum sempurna apabila belum datang ke Mesjid ini. Mesjid ini mempunyai arsitektur yang indah dan terletak di pusat kota yang dapat dilalui oleh semua kendaraan. Mesjid Raya Baiturrahman dijadikan sebagai titik nol kilometer jarak di kota Banda Aceh.

Saat ini mesjid Raya Baiturrahman mempunyai luas $\pm 31.000 \text{ m}^2$, memanjang dari timur ke barat. Di sekeliling mesjid ini terdapat berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari perdagangan, perkantoran, dan aspek kehidupan masyarakat lainnya. Setiap hari orang dapat mendatangi dan memasuki Mesjid ini untuk melihat-lihat keindahannya dan aktivitas di

dalamnya. Bagi mereka yang akan memasuki Mesjid/halaman Mesjid harus berpakaian muslim/muslimah. Dilarang bagi yang tidak memakai busana muslim/muslimah masuk ke dalam Mesjid ini.

Struktur mesjid ini terdiri dari bangunan induk, bangunan penunjang, dan arena sosial. Setelah perluasannya tahun 1992. Mesjid Raya Baiturrahman kini memiliki keadaan sebagai berikut: Luas bangunan induk 56 x 34 m, luas serambi depan 12,5 x 10,5 m, tiang bulat 136 buah, tiang persegi empat 32 buah, kubah 7 buah, menara 5 buah, ruang belajar (2 lantai) sebanyak 12 ruangan, ruang imam 1 buah, ruang kantor remaja mesjid 1 buah, ruang kantor pengurus Mesjid 1 buah, ruang perpustakaan, ruang parkir, dan fasilitas wudhu' / MCK.

Mesjid ini adalah Mesjid yang menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Aceh. Ia tidak sekedar sebuah tempat religius semata, tetapi mempunyai makna yang dalam berkaitan dengan sejarah pendudukan Belanda di daerah ini. Ketika Belanda belum menguasainya, Mesjid ini dipergunakan oleh pejuang-pejuang Aceh sebagai markas pertahanan mereka. pertanyaan mungkin timbul di benak pengunjung tentang kapan tepatnya Mesjid ini dibangun. Sebelum tampak sebagai Mesjid seperti sekarang, beberapa tulisan tentang sejarah Mesjid ini menyebutkan bahwa Mesjid ini mulai dibangun pada masa Kerajaan Aceh diperintah oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636), tetapi ada yang mensinyalir bahwa Mesjid ini dibangun pertama kali pada masa pemerintahan Sultan Alaidin Mahmud Syah pada tahun 1292 (621H). Perluasan mesjid juga dilakukan kembali pada masa pemerintahan Nakiatuddin Syah pada tahun 1675 - 1678 M.

Banyak orang tua di Aceh menyebutkan bahwa bentuk bangunan Mesjid Raya Baiturrahman ketika itu berkonstruksi kayu, beratapkan daun rumbia, dan berlantaikan tanah liat yang rata dan mengeras menyerupai semen setelah kering. Para jamaah menggunakan tikar dari daun pandan untuk menutupi lantai mesjid sebagai alas. Bentuk atap menyerupai belah

kerucut dan berlapis tiga buah dengan kemiringan sekitar 30 derajat.

Ketika perang antara Kerajaan Aceh dengan Kerajaan Belanda pada tahun 1873, banyak tempat di Aceh yang dijadikan benteng oleh para pejuang Aceh, salah satu yang paling terkenal adalah Mesjid Raya Baiturrahman. Di tempat inilah para pemimpin perang di pihak Aceh mengkonsentrasikan diri dalam melawan para serdadu Belanda yang memerangi tanah air mereka. Di pihak Belanda juga berusaha dengan segala daya agar pusat pertahanan rakyat Aceh tersebut dapat mereka rebut.

Pertempuran antara keduanya terjadi begitu dahsyad dalam memperebutkan Mesjd Raya Baiturrahman. Mereka silih berganti untuk menguasainya. Dalam sebuah pertempuran memperebutkan mesjid ini, Mayor Jenderal J.H.R. Kohler tewas oleh sebutir peluru yang dimuntahkan oleh senjata prajurit Kerajaan Aceh pada tanggal 14 April 1873. Tiga hari setelah Kohler tewas, Belanda mengundurkan diri ke pantai dan setelah mendapat izin dari pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 23 April, mereka lalu membongkar sauh dan meninggalkan pantai Aceh pada 29 April 1873. Agresi mereka yang pertama ini mengalami kegagalan total.

Untuk menebus kekalahan, Belanda mengangkat kembali Letnan Jenderal Van Swieten. Pensiunan panglima pasukan Hindia Belanda yang khusus didatangkan dari Belanda pada tanggal 9 Juli 1873 untuk memimpin agresi kedua yang dilancarkan pada tanggal 9 Desember 1873. Dua puluh delapan hari kemudian yakni pada tanggal 6 Januari 1874, Belanda dapat menghancurkan Mesjid Raya Baiturrahman dan menguasainya setelah dengan gigihnya dipertahankan oleh Tuanku Hasyim Banta Muda dan panglima teuku Imeum Lueng Bata beserta pasukannya. Pihak Belanda menelan korban sebanyak 14 bawahan mati, 11 opsir, dan 197 bawahan luka-luka.

Sebelum kembali ke Batavia, Jenderal van Swieten memaklumkan bahwa pemerintah Belanda menghormati sepenuhnya kemerdekaan beragama orang-orang Aceh dan hendak membangun mesjid yang telah hancur akibat serangan

Belanda tersebut. Rencana pembangunan tersebut dibuat oleh arsitek De Bruins dari Departemen Pekerjaan Umum (*Departement van Burgelijke Openbare Werken*) di Betawi bekerjasama dengan opzichter L.P. Luyks dan insiyur-insiyur lain dengan dibantu oleh penghulu besar Garut agar polanya tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Tidak sederhana untuk membuat mesjid sesuai dengan yang direncanakan oleh Belanda, kecuali kalau mereka mau membuatnya dari kayu nangka dan atap nipah. Hal yang menarik dalam rangka merangkul rakyat yang agamanya berlainan dengan Belanda, mereka begitu susah payah berusaha untuk mendirikan sebuah mesjid dengan harapan akan meninggalkan kesan yang baik di hati rakyat Aceh. Untuk pembangunan mesjid, kesulitan menyangkut masalah tenaga kerja, pemborong, dan masalah bahan bangunan. Dalam masalah tenaga kerja ini orang-orang Belanda mengharapkan orang-orang Aceh-lah yang dapat bekerja dalam proyek ini, tetapi karena selalu gagal dan mengecewakan sehingga terpaksa akhirnya dipakai tenaga orang Cina. Karena tidak kenal medan bangunan dan takut kesulitan dalam pelaksanaan, maka pemborong-pemborong yang jumlahnya memang tidak banyak di Jawa itu tidak ikut penawaran. Hanya seorang yang memasukkan penawaran yaitu Lie A. Sie, seorang letnan Cina yang memperoleh borongan itu dengan biaya f 203.000 (dua ratus tiga ribu gulden). Bahan-bahan bangunan berasal dari dalam negeri dan luar negeri, misalnya kapur dari Pulau Pinang, batu bata dari negeri Belanda, batu pualam untuk tangga dan lantai berasal dari Cina, besi untuk jendela diimpor dari Belgia, kayu dari Moulmein (Birma), tiang-tiang besi yang berat berasal dari Surabaya.

Upacara peletakan batu pertama dilaksanakan oleh Jenderal Van der Heyden pada tahun 1879. Pada tanggal 27 Desember 1881 terjadi penyerahan kunci d ari Gubernur A. Pruys van der Hoeven kepada Tgk. Kadi Malikul Adil sebagai tanda telah selesainya pembangunan mesjid. Acara ini diiringi oleh tembakan meriam tiga belas kali dan dilaksanakannya kenduri sebagai rasa syukur. Pengurusannya diserahkan kepada

Teungku Syekh Marhaban, seorang ulama terkenal yang berasal dari Pidie.

Gaya arsitekturnya didominasi oleh kubah, sehingga corak utama dari mesjid tersebut sebagai mesjid berkubah. Penampilannya adalah gaya Timur Tengah yang diolah secara cermat disesuaikan dengan tujuan penggunaan dan fungsi mesjid. Kubah-kubah pada mesjid diperkuat dengan bentuk-bentuk lengkung dari elemen-elemen seperti pintu-pintu dan jendela yang dihiasi dengan ornamen-ornamen untuk menghiasi bangunan mesjid.

Mesjid Raya Baiturrahman jika dilihat dari bentuknya tampak bangunan Eropa bergaya Gothik. Di bagian ruang mesjid terdapat pilar beton yang berjejer yang tersusun rapi dan di bagian dasar pilar berpola hias sulur-sulur daun yang bahannya terbuat dari kuningan. Sementara mimbar mesjid terbuat dari kayu jati berukir-sulur-sulur daun dari bunga teratai. Pintu mesjid terbuat dari kuningan berpola ragam hias bunga teratai dan jendela terbuat dari kayu jati yang berukiran sulur-sulur daun.

Mesjid Baiturrahman yang selesai dibangun pada tahun 1881 itu mempunyai sebuah kubah. Pada tahun 1936 oleh Gubernur Van Aken mesjid ini ditambah lagi dua buah, yaitu bagian kanan dan kiri mesjid, sehingga menjadi tiga kubah. Biaya perluasan ini adalah 35.000 gulden dengan arsiteknya Ir. Mohammad Thaher (seorang putra Aceh) dan dikerjakan oleh Jawatan Pekerjaan Umum (BOW).

Pada masa kemerdekaan RI yaitu pada tahun 1958, di bawah kepemimpinan Gubernur Ali Hasjmy, Mesjid ini kembali diperluas menjadi lima kubah dan ditambah dengan dua buah menara di sampingnya sehingga bisa menampung 10.000 jamaah. Pelaksanaan perluasan Mesjid Raya Baiturrahman diserahkan kepada N.V. Zein dari Jakarta. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Menteri Agama Republik Indonesia K.H. M. Ilyas pada hari Sabtu 1 Shafar 1387 H bertepatan dengan tanggal 16 Agustus 1958. Pada perluasan ini ditambah lagi dua buah kubah dan dua menara sebelah utara dan selatan. Dengan

demikian, Mesjid Raya Baiturrahman mempunyai tujuh buah kubah dan dua menara. Perluasan ini selesai pada tahun 1967.

Dalam rangka menyambut pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat nasional XII pada tanggal 7 sampai dengan 14 Juni 1981 di Banda Aceh. Mesjid ini diperindah dengan pembuatan pelataran, pemasangan klinker di sepanjang jalan-jalan dan pekarangan, perbaikan dan penambahan tempat wudhu' dari porselin, dan pemasangan pintu kerawang serta chandelir dari bahan kuningan di sekeliling kubah bagian dalam serta instalasi air mancur dalam kolam di halaman depan.

Saat ini, di depan Mesjid ini terdapat Menara Tugu Modal. Menara/Tugu modal merupakan sebuah menara sebagai monumen bahwa Aceh pernah dinyatakan sebagai Daerah Modal di dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Menara terdiri dari enam lantai yang dapat dicapai melalui lift maupun tangga biasa. Dari menara ini dapat dilihat pemandangan kota Banda Aceh dan sekitarnya, yang dikelilingi oleh Pegunungan Bukit Barisan, dan puncak gunung Seulawah Agam. Selain itu, tampak juga laut menghampar luas, yang dikenal dengan nama Selat Malaka.

Dalam proses perluasan, pembangunan Mesjid Raya Baiturrahman dibagi menjadi tiga zona, yaitu zona ritual. Zona transisi, dan zona sosial. Zona ritual merupakan fungsi utama dari mesjid ini yaitu sebagai tempat ibadah atau tempat berkomunikasi dengan Allah SWT. Di sanalah seorang melepaskan kerinduannya dengan Sang Maha Pencipta. Seorang yang memasuki zona ini berarti sudah mempunyai kebulatan tekad dan beritikad untuk menghadap-Nya. Pada zona transisi dimana keagungan mesjid ini sudah mulai terasa seorang baru diajak berpikir apakah ia memasuki zona ritual atau kembali ke luar tanpa ingin bertemu dengan khalik-Nya.

Zona sosial merupakan zona umum atau zona bebas dimana orang dapat bercengkrama dan bersenda gurau sesamanya. Tidak lebih sebagai zona wisata yang dilengkapi dengan aneka fasilitas termasuk air mancur, taman yang indah

serta lift untuk menikmati panorama kota Banda Aceh dari udara. Di samping itu, di zona sosial ini juga tersedia ruang belajar, ruang remaja mesjid serta ruang perpustakaan. Multi fungsi dari mesjid ini terlihat pada penataan Mesjid Raya Baiturrahman secara utuh.

Pada sisi pagar mesjid kiri dan kanan terdapat sarana tempat wudhu' yang mampu menampung banyak jamaah. Di samping itu, terdapat pula WC dan kamar mandi untuk umum, sedangkan pada bagian kanan sebelah luar mesjid terdapat lapangan parkir sepeda dan sepeda motor yang luas. Mengacu pada zona-zona tersebut banyak kegiatan yang dilaksanakan di mesjid ini. Selain untuk kegiatan-kegiatan keagamaan seperti shalat lima waktu dan shalat Jumat, pada sore hari, Mesjid ini dipergunakan untuk kegiatan keagamaan lain, seperti pengajian anak-anak atau orang dewasa, kegiatan remaja Mesjid, tempat upacara nikah, studi atau kajian agama. Selain itu, mesjid ini dipergunakan pula sebagai tempat penyelenggaraan upacara peringatan hari-hari besar Islam, seperti Maulid Akbar, dan Nuzulul Qur'an. Halaman Mesjid yang begitu luas dengan taman dan kolam serta air mancurnya seringkali dipergunakan untuk tamasya warga masyarakat, baik warga kota Banda Aceh maupun warga dari luar Kota Banda Aceh sambil menikmati suasana sore hari.

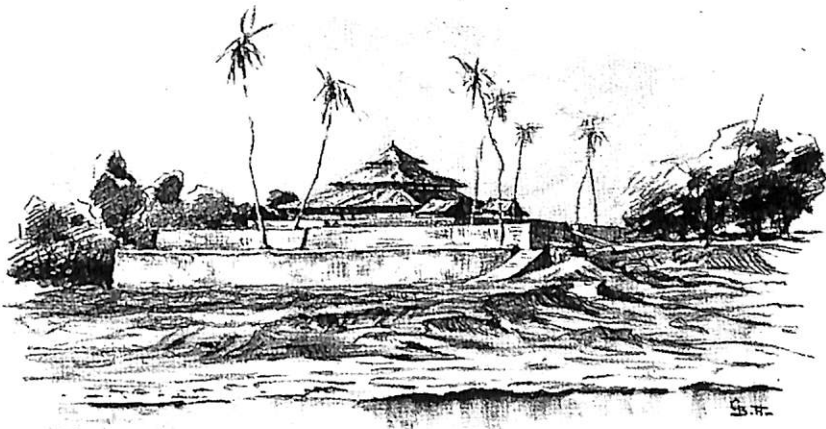
Ketika gempa dan tsunami melanda Aceh, Mesjid Baiturrahman tidak mengalami kerusakan yang berarti. Hanya pada Tugu Modal yang terdapat pada bagian depan halaman yang mengalami rusak parah parah. Ketika tsunami menerjang daratan, air tidak masuk ke dalam Mesjid, hanya menggenangi sekitar halaman Mesjid. Di halaman Mesjid ini bertumpuk sampah, lumpur, dan mayat. Mayat-mayat ini sempat disemayamkan di dalam Mesjid sebelum dimakamkan di pemakaman massal. Ketika masa tanggap darurat berlangsung, ibadah shalat Jum'at mesjid sempat sekali tidak diselenggarakan karena kondisi Mesjid yang masih kotor. Ketika mesjid ini bersih kembali, penyelenggaraan shalat Jumat berlangsung seperti sediakala.

Selain hal yang dipaparkan di atas, pada zaman Belanda Mesjid Raya Baiturrahman berfungsi sebagai tempat aktivitas ekonomi. Ketika pemerintah kolonial Belanda sudah menguasai Kutaraja, di bagian samping kiri luar Mesjid, dulu digunakan sebagai tempat penjualan ternak (sapi dan kerbau). Penjualan ternak ini khusus diadakan pada setiap hari *uroe pupok leumo* (hari adu sapi), tetapi *uroe pupok leumo* arti yang sesungguhnya adalah satu hari menjelang *uroe meugang*, baik *meugang* puasa maupun *meugang* hari raya Idul Fitri dan *meugang* hari Raya Idul Adha. Di tempat inilah dilaksanakan transaksi penjualan ternak yang cukup ramai.

Seperti telah dipaparkan sebelum zaman kemerdekaan, Mesjid Raya Baiturrahman memiliki arti dan peranan yang sangat penting. Misalnya, pada tanggal 23 November 1945 berlangsung musyawarah ulama dayah seluruh Aceh di bawah pimpinan Teungku Muhammad Daud Beureueh. Dalam musyawarah menghasilkan kesepakatan untuk membentuk Barisan Hizbullah dengan ketua umum Teungku Muhammad Daud Beureueh. Beberapa waktu kemudian Barisan Hizbullah yang dibentuk melalui musyawarah di Mesjid Raya Baiturrahman tersebut pada tanggal 1 Desember 1945 diganti namanya menjadi Laskar Mujahidin. Pada waktu itu juga dikeluarkan maklumat yang isinya mengajak seluruh rakyat Aceh untuk berjihad melawan musuh-musuh proklamasi 17 Agustus 1945.

Untuk menggalang persatuan dan kesatuan dalam menghimpun kekuatan, maka pada tanggal 12 Desember 1945 di depan mesjid ini diselenggarakan rapat raksasa perjuangan. Dalam rapat itu berbicara Gubernur Sumatra Teuku Muhammad Hasan, residen Karim MS dari Medan dan Sumadi utusan Pemuda Pelopor dari Pulau Jawa. Dalam rapat raksasa tersebut pemimpin perjuangan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu padu merapatkan barisan dan menggalang kekuatan melawan Belanda. Pada tanggal 27 Maret 1947, Jawatan Penerangan Aceh mengadakan 'Rapat Raksasa Linggarjati' bertempat di halaman mesjid Raya Baiturrahman.

Rapat itu berkenaan dengan penandatanganan naskah Linggarjati. Dalam rapat itu ikut berbicara antara lain Muhammad Abduh Syam (Kongres Pemuda), Mayor Hasballah (TRI) dan Said Abubakar mewakili Residen Aceh.



Gambar 2: Mesjid Indrapuri dalam lukisan kolonialis
(Koleksi: goaceh.com)

MESJID JAMI' INDRAPURI: 'MESJID ASLI INDONESIA'

Mesjid dengan atap cungkup bersusun ini dinamai Mesjid Indrapuri karena terletak di Desa Indrapuri Pasar, Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Mesjid ini berada tidak jauh dari kota Banda Aceh, sekitar 24 km ke arah Utara. Bangunan mesjid berdiri di atas tanah seluas 33.875 meter persegi, terletak di ketinggian 4,8 meter di atas permukaan laut dan berada sekitar 150 meter dari tepi Sungai Krueng Aceh yang lebar.

Bangunan dasar mesjid ini diceritakan dibangun pada abad ke-10 masehi. Sebelum ajaran Islam masuk ke Aceh, Dasar bangunan Mesjid Indrapuri merupakan bekas bangunan candi Hindu/Budha. Diduga bangunan ini merupakan peninggalan Kerajaan Poli/Puri, yang kemudian disebut Lamuri oleh orang Arab dan disebut Lambri oleh Marcopolo. Meskipun saat ini kita tidak dapat disaksikan lagi bentuk candi tersebut secara utuh, tetapi ada beberapa bagian masih tampak tersisa, yakni tembok

tebal yang mengelilingi mesjid. Dari plester tembok yang sebagian sudah tampak terkelupas dapat dilihat bahwa Candi Indrapuri tersebut terbuat dari batu hitam yang dibuat lempengan berukuran panjang sekitar 40 cm dan lebar 20 cm dengan ketebalan 5 cm. Sampai sekarang tembok (berbentuk seperti punden berundak/ tiga tingkat dengan ketinggian 1,46 meter) masih berdiri kokoh.

Konstruksi bangunan mesjid Indrapuri tidak jauh berbeda dengan konstruksi bangunan mesjid tradisional di Indonesia. Pintu masuk mesjid berada di sebelah timur. Untuk mencapainya harus melalui platiran halaman luar. Di halaman kedua terdapat bak penampung air hujan. Pada bagian lantai mesjid terdapat umpak tiang penyangga sebanyak 36 buah terbuat dari batu kali. Di atas umpak ini ditempatkan 36 buah tiang dari kayu yang masing-masing berdiameter 0,28 meter. Tiang-tiang ini terdiri dari empat buah soko guru yang berbentuk persegi delapan dengan 32 buah tiang penampil yang berfungsi sebagai penyangga kerangka atap yang berbentuk tumpang.

Bagian atas tiang dihubungkan dengan balok dan dimasukkan ke dalam lubang yang dibuat pada bagian atas tiang. Sebagai penguat ikatan, dipasang pasak-pasak dari kayu, untuk menguatkan bagian atas dibuat tiang gantung berbentuk persegi delapan. Tiang ini terletak tepat pada bagian tengah atap undak ke-3. Agar tiang ini tidak runtuh dipasang pula 4 buah tiang gantung yang lebih kecil dan dihubungkan dengan balok penahan kuda-kuda. Pada sisi luar soko guru terdapat 12 buah tiang yang mendukung atas undak ke-2. Pada bagian luarnya terdapat 20 buah tiang yang berfungsi sebagai pendukung kerangka atap undak pertama. Tiang-tiang pada bagian sisi luar dihubungkan dengan papan yang berfungsi sebagai pendukung kerangka atap undak pertama. Tiang-tiang pada bagian sisi luar dihubungkan dengan papan yang berfungsi sebagai pengikat tiang satu dengan tiang yang lain.

Atap mesjid Indrapuri dibuat berdasarkan konstruksi atap tumpang berjumlah tiga susun berdasarkan sistem payung terbuka. Pada bagian puncak atap tumpang ini terdapat sebuah

mustaka yang berbentuk seperti nenas dengan pola hias simbar. Perubahan bentuk dari candi menjadi mesjid mempunyai kisah tersendiri. Adapun cerita tersebut dapat dinukilkan sebagai berikut :

“Dikisahkan bahwa datanglah ke daerah Kerajaan Lamuri, seorang penyebar agama Islam yang bernama Abdullah Kan'an yang bergelar Teungku Abdullah Lampeuneuen, berasal dari Peureulak, Aceh Timur. Ia datang bersama Meurah Johan, seorang pangeran, putra mahkota Kerajaan Lingga (di daerah Jambo Aye sekarang). Tujuannya tidak lain, yaitu mengajak agar raja bersama segenap rakyat Kerajaan Lamuri memeluk agama Islam. Kebetulan pada saat itu Kerajaan Lamuri kedatangan gerombolan bajak laut Cina yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Putroe Neng (Putri Neng). Meskipun cantik, Putri Neng terkenal sebagai pimpinan bajak laut yang kejam. Seluruh anak buahnya memiliki ilmu bela diri yang tinggi. Kedatangan ratu bajak laut tersebut ke Kerajaan Lamuri, tidak lain ingin menjadikan kerajaan itu sebagai negeri taklukan. Tentu saja Baginda Raja Lamuri menolak mentah-mentah keinginan itu. Perang pun tidak dapat dihindari. Menghadapi bajak laut yang sudah berpengalaman, pasukan kerajaan Lamuri terdesak. Dalam keadaan terdesak seperti itu, Teungku Abdullah Lampeuneuen dan Meurah Johan menawarkan bantuan. Tawaran itu pun diterima dengan baik, akhirnya gerombolan bajak laut itu dapat dikalahkan. Sebagai ungkapan rasa terima kasih, baginda raja akhirnya memeluk agama Islam. Sikap Raja Lamuri ini diikuti juga oleh rakyatnya. Setelah menjadi muslim dan kerajaannya resmi menjadi kerajaan Islam, oleh Teungku Abdullah Lampeuneuen, baginda raja Lamuri diberi gelar Sultan Alaidin Johansyah Dhilullah Fil'alam”.

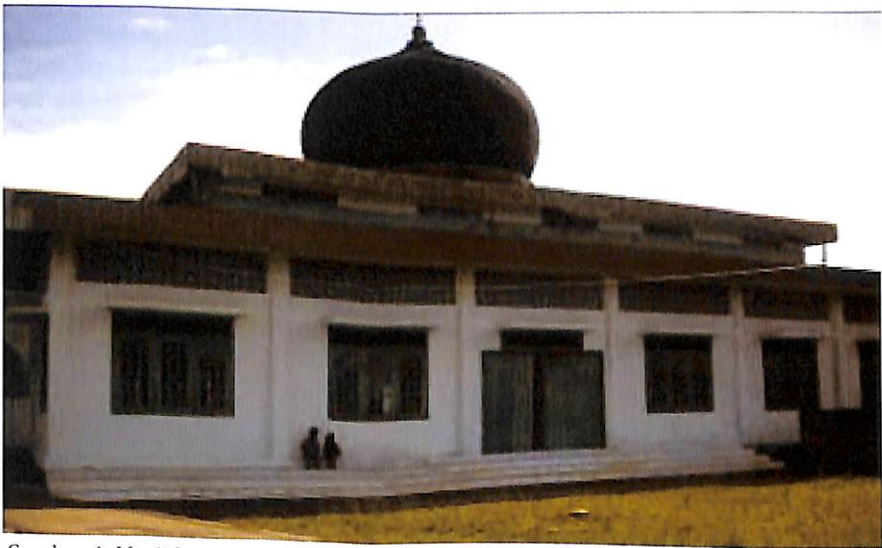
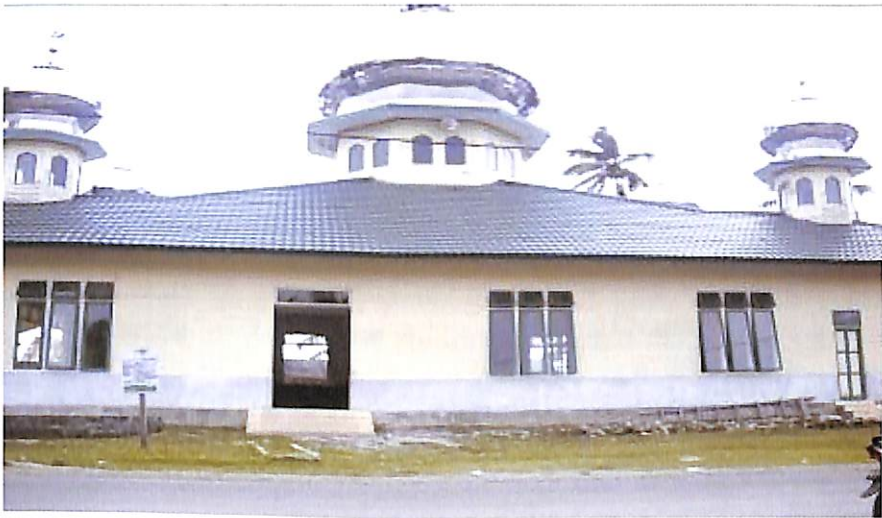
Setelah Lamuri menjadi kerajaan Islam candi-candi ini pun terbengkalai dan satu per satu runtuh, yang tersisa hanya Candi Indrapuri. Atas dasar pemikiran agar tempat tersebut tidak mubazir, candi ini diusulkan untuk difungsikan menjadi mesjid. Usulan tersebut diterima, kemudian candi Indrapuri difungsikan mesjid.

Pada masa Sultan Iskandar Muda, di atas bekas candi tersebut dipugar lagi menjadi sebuah Mesjid dengan ukuran 18,8 meter X 18,8 meter dan tinggi 11,65 meter. Pembangunan mesjid ini dimaksudkan untuk mensyiarkan ajaran agama Islam ke tengah-tengah masyarakat. Selain itu, mesjid ini dijadikan sebagai pusat kegiatan masyarakat, seperti pendidikan, ibadah, dan ekonomi.

Selain ini telah melahirkan banyak ulama, mesjid tua ini pernah pula menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Aceh Darussalam untuk beberapa bulan ketika ibukota kerajaan dikuasai oleh Belanda. Namun kemudian mesjid ini pun dapat direbut pula oleh Belanda, sehingga ibukota dipindahkan lagi dari Indrapuri ke Keumala. Peristiwa yang terkenal selama keberadaan mesjid ini adalah penobatan Tuanku Muhammad Daud Syah menjadi Sultan Kerajaan Aceh Darussalam. Setelah diangkat menjadi sultan diberi gelar dengan Sultan Alaidin Muhammad Daud Syah pada akhir tahun 1874 Masehi.



Gambar 3: Mesjid Indrapuri masa kini
(Koleksi: aboe-hafz.blogspot.com)



Gambar 4: Masjid Babussalihin (atas) dan Masjid Babul Khair di Pulau Simeulue (bawah)
(Foto: Cut Zahrina, Dahlia dan Fariani)

CERITA DUA MESJID DI PULAU SIMEULUE: MESJID BABUSSALIHIN DAN BABUL KHAIR

Mesjid Babussalihin: Mesjid Peninggalan Ulama dari Nias

Mesjid Babussalihin, terletak di pinggir jalan raya Desa Salur, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulu, Provinsi Aceh. Sejarah mesjid ini dari kisah seorang pendatang dari Nias yang bernama Gafaleta. Gafaleta ini merupakan salah satu Kepala Suku di Nias yang telah memeluk Islam dan menggantinya namanya menjadi Banurullah. Nama barunya ini berarti 'berasal dari kampung atau kelompok yang diridhoi Allah.

Untuk mendalami agama barunya ini, Banurullah pun berangkat ke Aceh. Perjalanan panjangnya diperkirakan sekitar abad 18. Sebelum tiba di bandar Aceh, Banurullah singgah di kampung Salur di Pulau Simeulue masa kini. Di kampung ini Banurullah menjumpai sekelompok manusia primitif yang disebut dengan orang *Manteu*. Orang *Manteu* ini disebutkan primitif, liar dan belum beragama. Melihat orang *Manteu*, muncul keinginan Banurullah untuk mengislamkan mereka dengan cara yang santun sampai akhirnya ia dapat menundukkan kelompok orang *Manteu* itu.

Adapun usaha yang dia lakukan adalah membuat ladang dan membuka kebun sayur melalui bercocok tanam. Ketika kebun dan ladangnya mulai berbuah, lalu membiarkan masyarakat mante untuk menikmati hasil cocok tanamnya sehingga mereka diberikan kebebasan untuk memetik sayur dan buah-buahan yang terdapat dalam ladang sepuas-puasnya tanpa mengusiknya. Dengan perlakuan tersebut telah mendekatkan hubungan antara masyarakat Simeulue dengan Banurullah melalui kebaikan tersebut maka masyarakat Simeulue telah berhasil diislamkan.

Setelah memperoleh pengikutnya maka langkah berikutnya adalah membangun tempat untuk beribadah, yaitu Mesjid. Usaha untuk mendirikan Mesjid Banurullah menugaskan tujuh orang kepala suku dan seorang juru bicara untuk memohon doa restu kepada Sultan Aceh yaitu Sultan

Mahmudsyah II yang memerintah pada tahun 1767-1787. Setelah utusan kembali dari Aceh mereka membawa delapan buah sandi batu yang merupakan hadiah dari Sultan Aceh yang disebut dengan *Sandi Salapan* saat itu berfungsi sebagai surat izin untuk membangun Mesjid. Sehingga dibangunlah Mesjid Salur sebagai Mesjid pertama di Simeulue.

Sebelum Banurullah meninggal beliau mewasiatkan kepada pengikut dan murid-muridnya jika dia meninggal agar dimakamkan di atas bukit batu yang berada tidak jauh dari lokasi Mesjid. Ketika Banurullah meninggal pada malam Jum'at para murid-muridnya menguburkannya di tempat yang telah diwasiatkan itu. Setelah beliau meninggal namanya sering disebut dengan *Si Bakudo Batu* yang berarti orang yang berkudakan batu karena menurut cerita yang berkembang dalam masyarakat bahwa setelah dimakamkan pada hari jumat nampak seekor kuda putih melompat dari pusaranya dan menuju pintu Mesjid lalu menghilang dan muncul lagi di pusaranya.



Gambar 5: Makam Banurullah atau Gafaleta, tokoh yang mengislamkan Kampung Salur, Sinabang - Pulau Simeulue
(Foto: Cut Zahrina, Dahlia dan Fariani)

Mesjid Babussalihin ini didirikan di atas pondasi beton setinggi 50 centimeter dengan denah bujur sangkar dibangun semi permanen yang mengarah ke Timur. Lantainya terbuat dari keramik berwarna krem kekuning-kuningan berukuran 40x40 cm, sedangkan dindingnya dari papan dan diberi cat warna krem juga. Pintu masuk ke ruangan ada di sebelah timur dan satu lagi di sebelah utara. Tiang utama (soko guru) berjumlah enam buah terbuat dari kayu jenis seumantok berbentuk bulat segi delapan yang berdiri di atas umpak (sandi batu) berbentuk segi empat. Jendela berbentuk segi empat terbuat dari kaca berjumlah sembilan buah masing-masing sisi Utara tiga buah, sisi Selatan tiga buah, sisi Timur 2 buah dan sisi Barat pada ruangan mihrab satu buah.

Di atas jendela terdapat ventilasi terbuat dari kaca berbentuk segi empat mengikuti pola jendela, dan diberi cat hijau. Ruangan mihrab berbentuk persegi empat dan bagian atas dibentuk melengkung menyerupai kubah. Ditengah-tengah ruangan mihrab terdapat sebuah mimbar dari kayu tanpa pola hias. Plafon Masjid terbuat dari tripleks berwarna putih. Dinding Masjid terdiri dari papan bagian luar sedangkan bagian dalam telah dilapisi dengan tripleks dan diberi cat abu-abu. Ruangan teras ditopang oleh empat buah tiang berbentuk segi empat dan berbentuk terbuka terdiri tiga relung. Atap terbuat dari genteng seng berwarna hijau. Kubah Masjid berjumlah lima buah terbuat dari seng polos putih mengkilat, masing-masing ukuran besar berada di tengah sedangkan empat kubah lainnya berukuran sedang dan terdapat pada sisi kanan dan kiri pada ruang utama bagian depan. Sedangkan dua lagi terdapat pada kiri kanan atap bagian belakang. Antara atap dengan kubah terdapat dinding papan berbentuk segi delapan (oktagonal), dan pada tiap segi terdapat dua buah jendela kaca berbentuk segi empat dan bagian atas berbentuk seperti kubah. Antara dinding dan kubah dibatasi dengan lies dari papan diberi cat warna hijau. Pada bagian puncak kubah dihiasi dengan memolo berbentuk bulatan dan diakhiri dengan hiasan bulan sabit dan bintang.

Mesjid Baitussalihin telah mengalami pemugaran beberapa kali. Pada awalnya dibangun berdenah bujur sangkar berkontruksi kayu berbentuk panggung, beratap rumbia. Tiang utamanya berjumlah enam buah bentuk segi delapan sebagai penopang ruangan utama dan dua buah tiang lainnya sebagai penopang ruangan mihrab. Tiang-tiang itu berbentuk segi delapan yang didirikan di atas sandi batu (umpak) hadiah dari Sultan Aceh. Pada saat terjadi *smong* atau gelombang tsunami di Simeulue pada tahun 1907 Masjid tersebut roboh dan para jamaah jumat di dalam Masjid ikut syuhada. Kemudian Masjid tersebut dibangun kembali pada saat Belanda masih menduduki Simeulue dan masih mengikuti bentuk semula berbentuk panggung namun sudah dilakukan perluasan mengingat jamaah yang semakin hari terus bertambah.

Pada tahun 1972 Masjid ini direhab kembali karena ada beberapa bagian kayu yang sudah lapuk dan lantai semennya diganti dengan ubin. Ketika terjadi gempa dan tsunami yang melanda sebagian besar daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tahun 2004, Masjid Babussalihin juga ikut rusak akibat gempa sehingga dilakukan rehabilitasi dan renovasi secara menyeluruh sebagaimana yang terlihat sekarang ini. Sampai sekarang Masjid Babussalihin masih difungsikan sebagai tempat shalat lima waktu, shalat juma't dan juga dijadikan sebagai tempat pengajian, rapat perangkat desa dan wirid serta pertemuan ibu-ibu PKK.

Mesjid Babul Khair atau Masjid Teungku Di Ujung

Mesjid Babul Khair terletak di Desa Kuta Padang, Kecamatan Simeulu Tengah, Kabupaten Simeulu Provinsi Aceh. Bangunan Masjid yang sekarang ini merupakan bangunan baru sebagai pengganti Masjid tua yang pernah berdiri sebelumnya. Adapun cikal bakal berdirinya Masjid Babul Khair pertama sekali dibangun oleh Tgk Khalilullah atau dikenal juga dengan nama Teungku Di Ujung, di lokasi Desa Latak Ayah dekat pantai tepatnya di muara teluk Kuta Padang dilokasi ini juga terdapat makam Tgk Khalilullah. Pada awalnya Masjid yang dibangun oleh

Tgk Khalilullah dalam bentuk sangat sederhana berbentuk bujur sangkar dengan tiang-tiang kecil dari kayu dan beratap rumbia.

Kisah perjalanan Tgk Kalilullah ke pulau Simeulu diperkirakan pada abad 17 ketika Aceh diperintah oleh Sultan Iskandar Muda (1607–1636) beliau berasal dari Sumatera Barat (Padang) yang hendak menunaikan haji, namun sebelum berangkat ke Mekkah beliau singgah di Aceh dan hendak bertemu dengan sultan. Setelah bertemu dengan sultan maka berlangsunglah dialog antara Khalilullah dengan Sultan Iskandar Muda sehingga sultan meminta kepada Tgk. Khalilullah untuk mengislamkan masyarakat Simeulu. Hal itu lebih besar pahalanya daripada menunaikan ibadah haji. Sultan juga menjodohkannya dengan Putri Melur setelah itu berangkatlah Khalilullah menuju Simeulu untuk saling bahu membahu dalam menyiarkan Islam di sana. Bersamaan dengan itu untuk meningkatkan pengembangan agama Islam di sana maka Tgk. Khalilullah membangun sebuah Mesjid dalam bentuk yang sangat sederhana, Mesjid tersebut digunakan sebagai tempat aktivitas agama. Kemudian Mesjid tersebut diberikan nama Babul Khair.

Mesjid Babul Khair dalam kurun waktu sekian lama tentu saja aus dan keropos dimakan usia, sehingga dilakukan renovasi beberapa kali. Pada tahun 1907 terjadi gempa bumi dan *smong* atau Tsunami di Simeulue dan menghancurkan bangunan Mesjid di sekitar pantai itu. Berdasarkan kesepakatan beberapa tokoh masyarakat maka Mesjid ini dibangun kembali, namun lokasinya bukan ditempat bangunan lama dipindahkan ke tempat yang lebih nyaman yaitu lokasi Desa Kuta Padang sebagaimana yang terlihat sekarang ini. Pembangunan Mesjid Babul Khair yang baru tetap mengikuti bentuk dan pola bangunan Mesjid yang lama yaitu masih berkonstruksi kayu berbentuk bujur sangkar, dengan atap tingkat dua memiliki kubah sebanyak satu buah. Pada 2004 yaitu terjadi lagi gempa dan tsunami Mesjid Babul Khair juga mengalami kerusakan di beberapa bagian terutama pada tiang-tiang Mesjid yang retak-retak yaitu akibat gunjangan gempa.

Mesjid Babul Khair juga terkenal dengan nama Mesjid Tgk Di Ujung, hal itu untuk mengenang jasa tokoh pendirinya yaitu Tgk Khalilullah yang sering dipanggil oleh masyarakat setempat dengan nama *Tgk Di Ujung*. Arsitektur Mesjid Babul Khair yang baru tetap mengikuti pola bangunan yang lama yaitu berbentuk bujur sangkar, dengan arah hadap ke timur. Namun bahannya sudah berbeda dengan bahan bangunan lama. Mesjid yang lama bahan bangunannya adalah kayu sedangkan yang baru bahan bangunannya terbuat dari bata, semen dan kayu, dengan lantai terbuat dari keramik berwarna putih. Pintu masuk ruang utama terdapat di sisi timur dan utara, terbuat dari jeruji besi yang dicat dengan warna hijau.

Tiang-tiang di dalam ruang utama berjumlah 30 buah dan dibentuk lengkungan pada bagian atasnya. Konstruksi bangunan atas masih terbuat dari dinding-dinding kayu yang sudah keropos dan rusak. Dinding terbuat dari tembok, pada bagian atas dinding sisi utara dan selatan diberi hiasan terawangan dari beton, sekaligus berfungsi sebagai sirkulasi udara. Sedangkan dinding sisi timur terbuat dari susunan tembok bermotif terawang dan di atasnya terdapat jalusi terbuat dari besi bermotif bunga. Jendela terdapat pada dinding sisi utara berjumlah 6 buah dan pada dinding sisi selatan berjumlah 7 buah masing-masing terdiri dari tiga daun jendela yang terbuat dari kaca bergaya spanyol. Bentuk atap bertingkat dua terbuat dari seng.

Teras terdapat di sisi timur dengan pintu masuk berada di sisi timur dan utara. Di sisi barat terdapat ruangan mihrab yang berbentuk tiga buah relung yang ditopang dengan 4 buah tiang yang direlif. Pada relung tengah terdapat mimbar terbuat dari kayu berbentuk meja dan pada bagian belakang mimbar diberi dinding dibentuk seperti kubah terbuat dari tripleks. Ditengah-tengah atap kedua terdapat sebuah kubah berukuran besar terbuat dari susunan kayu sirip berwarna hitam. Di atas kubah terdapat mustaka berbentuk segi menyerupai bentuk batu permata dan diakhiri dengan tiang.



Gambar 6: Mesjid Gunong Kleng, Kaway XVI, Aceh Barat (Repro BP3 Aceh)

MESJID GUNONG KLENG

Mesjid Gunong Kleng terletak di Desa Gunong Kleng Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. Dari pusat kota kecamatan Mesjid ini berjarak sekitar 8 km. Mesjid ini dibangun pada abad XX, belum diketahui secara pasti tahun pembangunannya, mesjid dibangun atas prakarsa swadaya masyarakat secara gotong royong. Mesjid Gunong Kleng merupakan salah satu bangunan Mesjid tradisional yang berkontruksi kayu dan berdenah bujur sangkar.

Mesjid adalah salah satu bangunan arsitektur budaya Islam, keadaan fisiknya berkaitan dengan nilai-nilai seni budaya Islam di samping fungsi sakralnya sebagai perwujudan interaksi yang mendalam antara manusia dengan Tuhannya. Begitu juga dengan keberadaan Mesjid Gunong Kleng di Aceh Barat, seiring dengan perkembangan budaya Islam di setiap daerah, bangunan Mesjid seringkali dibangun untuk menampilkan dan memperkenalkan nilai-nilai arsitektur yang berbeda sebagai ciri khas dari masing-

masing daerah. Hal itu dapat menunjukkan bahwa keragaman yang telah dikenal sebagai ciri budaya Islam seperti ragam hias dan arsitektur bangunan yang senantiasa disesuaikan dengan kondisi dan latarbelakang budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, dalam perkembangannya arsitektur Mesjid selalu memiliki sifat yang fleksibel dan tidak terikat pada pakem atau kaidah-kaidah yang kaku.

Zein M. Wiryoprawiro, mengutarakan bahwa sebagai suatu lembaga, Mesjid cenderung merupakan wujud dari aspek aktivitas dan ide, sedangkan sebagai kompleks bangunan (wadah) Mesjid merupakan wujud dari aspek fisik artefak kebudayaan Islam. Arsitektur seni yang terdapat pada bangunan Mesjid Gunong Kleng banyak mengandung nilai-nilai Islami, seperti dalam bentuk ukiran, tulisan dan benda-benda yang terdapat dalam sebuah Mesjid. Arsitektur tersebut dapat dijumpai baik dalam bentuk yang sederhana maupun yang paling megah sekalipun.

Hal ini sebagai pencerminan dari rasa cinta terhadap keindahan, ini tidak lain dari sesuatu yang dianjurkan oleh Allah. Namun adakalanya seni hias yang ditampilkan pada Mesjid-Mesjid tradisional lebih menonjolkan motif-motif lokal tanpa menyimpang dari kaidah-kaidah Islam yang melarang penggambaran makhluk hidup, baik berupa manusia maupun binatang, sebagai upaya untuk menjauhkan umat dari sifat kemusyrikan. Pada umumnya seni hias Mesjid didominasi oleh bentuk-bentuk kaligrafi di samping motif tumbuh-tumbuhan, geometris, dan alam.

Stilisasi terhadap penggambaran makhluk hidup sering pula dilakukan untuk menyamakan bentuk yang dilarang dalam ajaran Islam sehingga muncullah segi-segi keindahan yang netral dan tidak melanggar dogma yang berlaku dalam Islam. Bentuk cermin berbingkai dan padma pada *soko guru* merupakan penuangan seni hias tradisional yang secara prinsip memenuhi aturan yang berlaku.

Mesjid Gunong Kleng hanya mempunyai satu buah *Soko guru*, secara teknis berfungsi untuk menunjang bangunan Mesjid secara keseluruhan, terutama sebagai tumpuan menunjang bagian atap baik tumpang pertama maupun tumpang ke dua. Konstruksi bangunan diperkuat pula oleh adanya balok tarik, balok ikat, dan kuda-kuda. Tampilan atap Mesjid Gunong Kleng pada prinsipnya

berbentuk tumpang dua, terdiri dari tiga buah atap di bagian beranda dan satu buah pada bangunan induk. Antara atap tingkat pertama dan kedua masing-masing dibatasi oleh dinding dan *listplank*.

Atap Mesjid terbuat dari bahan seng. Sementara dinding pembatas atap tingkat pertama dan kedua serta *listplank* terbuat dari bahan kayu berukir kerawang dengan motif hias bunga, bentuk angka delapan, jajaran genjang, dan bunga gantung. Bentuk lengkungan yang terdapat pada *listplank* menimbulkan kesan nyaman, mengimbangi pola-pola tegak yang tertuang dalam bentuk denah Mesjid dan atapnya. Pada puncak atap bangunan induk terdapat *mustaka*. *Mustaka* terbuat dari bahan beton yang semakin meruncing ke bagian atas, dan sebagian ditutup dengan plat kuningan berbentuk pot/vas. Bagian paling bawah *mustaka* dibatasi oleh plat baja setebal satu centimeter. Atap bagian tengah beranda dilengkapi dengan kubah yang terdapat di atas tumpang dua, menghadirkan perpaduan yang unik antara bentuk limasan pada atap tumpang dan berbentuk lengkungan pada kubah.

Keunikan Mesjid Gunong Kleng terletak pada bagian *minaret*/menara yang posisinya terletak di sisi kanan atas mihrab. Pada awalnya menara Mesjid berfungsi praktis sebagai sarana untuk menyerukan azan sehingga dapat menjangkau radius yang jauh. Pada awal pembangunan menara sebagai kelengkapan Mesjid timbul pada masa kebangkitan *Renaissance Timur* yaitu zaman Khalifah Bani Abbasiyyah (750 - 1258 M). Bangunan Mesjid kuno yang menggunakan pola tempo dulu, mulai diperkaya dengan bangunan menara yang merupakan bahagian terpenting dari bangunan sebuah Mesjid. Sebelumnya azan disampaikan oleh *Bilal* dari bagian atas atap. Namun setelah munculnya menara, panggilan shalat lebih mudah dikumandangkan karena bentuk bangunan yang tinggi sehingga memungkinkan penyampaian suara lebih efektif.

Pada masa itu di Mesir berkembang seni bentuk menara yang indah, langsing, dan menjulang. Lain halnya dengan bentuk menara yang terdapat pada Mesjid Gunong Kleng, pola bangunannya menjulang dan dominan. Unsur ini justru memperlihatkan kesan yang menyatu dan menampilkan

keindahan tersendiri sehingga dapat mendukung keberadaan bangunan secara total. Kekhasan Mesjid Gunong Kleng diperkuat oleh hadirnya bentuk limasan yang dipadu dengan kubah. Menara ini berdenah bujur sangkar dengan sisi-sisi terbuka yang hanya dibatasi oleh kayu berukir kerawang dan *listplank* yang menonjolkan bentuk lengkung dan dimeriahkan oleh bunga-bunga jantung. Pada bagian atas atap limasan denah menara berubah menjadi enam sisi sebelum diakhiri dengan penutup kubah di bagian paling puncak.

Bagian bawah kubah juga dilengkapi dengan *listplank* berpola lengkung dan berhiasan motif bunga jantung. Menara ini merupakan bagian yang sangat menonjol pada keseluruhan penampilan Mesjid Gunong Kleng. Namun setelah adanya kemajuan teknologi maka fungsi menara lebih terfokus sebagai *point of interest* (aksen). *Muadzin* tidak lagi harus mengumandangkan azan dari menara setelah dikenalnya alat pengeras suara yang dapat di pasang di menara. Namun keberadaan menara sebagai pelengkap bangunan Mesjid masih dipandang penting terutama sebagai aksen khas dari bangunan peribadatan umat Islam.

Sumber sejarah Mesjid Gunong Kleng sangat terbatas. Namun dari segi arsitektural bangunan memiliki potensi yang cukup besar sehingga perlu tetap dilestarikan sebagai benda cagar budaya yang dilindungi oleh undang-undang. Mesjid Gunong Kleng merupakan salah satu yang dapat mewakili perkembangan arsitektur Mesjid tradisional dari masa ke masa, terutama pada pemakaian bentuk-bentuk atap seperti atap tumpang dan kubah. Perkembangan arsitektur menutup sifat inovatif maupun akulturatif. Sifat akulturatif ini tercermin pada Mesjid Gunong Kleng yang dibangun dengan arsitektur tradisional yang kental serta dilengkapi dengan motif hias lokal yang tetap mengacu pada ajaran Islam.

Bangunan-bangunan ibadah yang didirikan tetap bersumber pada ajaran yang termuat dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Namun kedua sumber tersebut tidak memuat aturan-aturan mengenai mengungkapkan ekspresi yang dituangkan

dalam bentuk fisik berupa tempat ibadah (Mesjid). Oleh karena itu, proses kreativitas tetap dapat dijalankan tanpa harus melanggar aturan-aturan yang berlaku. Sebagaimana Mesjid lainnya, Mesjid Gunong Kleng difungsikan sebagai tempat mengerjakan shalat fardhu lima waktu, shalat sunat, dan Jumat. Menurut keterangan masyarakat setempat, Mesjid ini pada bulan Ramadhan difungsikan sebagai tempat untuk *berkalut* (dari kata *khalwat*; bersemadi dan bertafakkur). Hal itu disebabkan oleh suasana Mesjid yang nyaman dan dingin, sehingga sangat disukai oleh masyarakat untuk menghabiskan hari-harinya dalam rangka ibadah bulan Ramadhan.



Gambar 7: Mesjid Tengku Di Kila, Seunagan - Nagan Raya
(Foto: Sudirman, Dahlia dan Essi Hermaliza)

MESJID TENGGU DI KILA

Mesjid Tengku Di Kila terletak di Desa Kila, Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya. Dari pusat kota kecamatan Mesjid ini berjarak sekitar 6 km dengan menyeberang sungai dan melalui jalan perkebunan. Mesjid Tengku Di Kila tahun berdirinya belum diketahui secara pasti, namun diperkirakan sekitar pada abad XIX. Menurut informasi dari tokoh masyarakat setempat, bahwa pembangunan Mesjid ini atas prakarsa seorang ulama bernama Tengku Chik Di Kila dengan nama aslinya Tengku Hasan yang berasal dari Blangpidie. Namanya diabadikan menjadi nama Mesjid tersebut yaitu Mesjid Tengku Di Kila dan juga menjadi nama desanya.

Menurut informasi Sekretaris Desa Kila (1999) menyebutkan bahwa Tengku Chik Di Kila adalah seorang ulama besar yang datang dari Blangpidie menuju Desa Kila dengan tujuan untuk menyebarkan agama Islam. Di Desa Kila inilah beliau mendirikan bangunan Mesjid untuk menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam yang dapat dijadikan sebagai pedoman menjalankan hukum-hukum Islam pada masanya.

Tengku Di Kila mempunyai lima orang anak, empat orang laki-laki dan satu orang perempuan. Satu orang anak Tengku Di Kila meninggal di Blangpidie, yaitu anak sulung dan dikuburkan di sana. Berdasarkan silsilah keturunan Tengku Chik Di Kila, ia adalah kakek dari mantan Wakil Ketua MPR RI, Abdul Gafur. Abdul Gafur adalah keturunan dari Harun, yaitu anak kedua Tengku Chik Di Kila yang kemudian melakukan penyebaran Islam di Tarnate dan beranak pinak di sana.

Mesjid Tengku Di Kila terletak di atas bukit yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Untuk menuju lokasi ini harus melalui tangga-tangga di sisi selatan bukit yang terbuat dari beton dengan anak tangga berjumlah 64 buah. Mesjid ini berdenah persegi empat berukuran 10.50x6, 30 m, sisa bangunannya adalah berupa pondasi yang tidak memiliki serambi. Di sisi barat terdapat bangunan menonjol yang difungsikan sebagai ruang mihrab (tempat imam memimpin shalat).

Mesjid ini berkontruksi kayu beratap limasan berbentuk tumpang, dan memiliki ruang utama berukuran 10.50x6.30 m. Di dalam ruang utama ini terdapat tiang- tiang penopang atap Mesjid berjumlah 24 buah yang terbuat dari kayu berbentuk segi delapan. Untuk tiang utama soko gurunya berjumlah 4 buah yang berfungsi sebagai penyangga undakan atap pertama yang berukuran panjang 2,30 m dengan diameter 17 cm. Adapun tiang penyangga undakan kedua berukuran panjang 4,65 m berdiameler 25 cm.

Pada bagian tiang utama undakan kedua mempunyai balok penyangga 10 buah. Kedudukan tiang-tiang di dalam Mesjid merupakan dasar dari kekuatan bangunan yang

mempunyai ukuran jarak antartiang 2,10 m. Selain itu, kekuatan tersebut juga ditopang oleh gaya dan model yang ditampilkan sesuai masanya.

Dinding Mesjid merupakan perpaduan dua bahan bangunan, pada bagian bawah dengan tinggi hingga 80 cm, tebal 5 cm terbuat dari pasangan bata dilapisi semen. Sementara dinding bagian atas terbuat dari kayu, pada dinding kayu bagian atas ini terdapat lubang angin (ventilasi) berbentuk seperti terali setinggi 75 cm pada sisi utara dan selatan. Dinding sisi Barat tertutup, di bagian tengah dinding ini yaitu di sisi kiri dan kanan terdapat lubang ventilasi berbentuk belah ketupat dengan ukuran 38 cm x 38 cm dan dihiasi dengan ornamen terawangan seperti bunga teratai. Dinding sisi timur di atas dinding tembok dibiarkan saja terbuka tanpa adanya penyekat dinding-dinding kayu kecuali di bagian tengah yang merupakan pintu masuk ke dalam Mesjid.

Pintu ini terbuat dari kayu dengan ukuran tinggi dua meter dan lebar 1,30 meter dan memiliki dua daun pintu. Di bagian atas pintu terdapat lubang ventilasi berbentuk terali sebagaimana pada dinding sisi utara dan selatan. Dalam ruang imam (mihrab) terdapat mimbar berbentuk tangga terbuat dari beton dan memiliki tiga anak tangga. Di atasnya tangga ini terdapat tiang-tiang kayu yang saling terkait. Sementara di bagian atas dihubungkan oleh kayu dan pada bagian depan berbentuk ornamen seperti sulur-suluran.

Konstruksi bangunan terbuat dari kayu berbentuk limasan bersusun dua, dengan bahan penutup terbuat dari seng. Menurut informasi, bahan penutup tersebut aslinya terbuat dari ijuk alasannya adalah untuk tidak rusak kemudian baru diganti dengan seng di sisi. Bagian depan bangunan Mesjid terdapat bak penampungan air yang terbuat dari pasangan bata dipleset dengan semen dengan ukuran panjang 2,1 m, lebar 1,1 m, tinggi 53 cm, dan tebal tembok 10 cm. Bak air ini difungsikan sebagai tempat orang mengambil air wudhu'. Di sisi utara dengan jarak sekitar 1,8 m terdapat sebuah guci yang difungsikan sebagai tempat air untuk berwudhu', ukuran guci tinggi 57 cm diameter

68 cm. Pada bagian atas guci terdapat hiasan berbentuk seperti untaian manik-manik. Di sisi selatan di luar dinding Mesjid terdapat sebuah kantung terbuat dari kayu yang digantungkan pada balok kayu konstruksi atap dengan ukuran panjang 1,20 m.

Mesjid sebagai bagian dari arsitektur merupakan konfigurasi dari segala kegiatan kaum muslimin dalam melaksanakan kegiatan keagamaannya. Dengan demikian, sebagian ruangnya difungsikan sebagai tempat penampungan kegiatan pelaksanaan ajaran agama Islam sehingga terjadi keterkaitan yang erat antara seluruh kegiatan keagamaan dengan Mesjid. Di samping itu, Mesjid juga sebagai hasil dari ekspresi yang diwujudkan dengan menampilkan bentuk-bentuk yang ideal dan tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh yang berkembang sebelumnya. Pengaruh tersebut terutama berupa aturan dan tingkah laku serta bentuk-bentuk bangunan lokal.

Lingkungan merupakan faktor utama pembentuk atau lahirnya suatu kebudayaan yang direfleksikan dalam bentuk-bentuk fisik karya seni dan bentuk kepercayaan ritual budaya asal daerah penerima agama Islam. Dengan demikian, banyak memberikan warna dalam karya arsitektur Islam sehingga munculnya aneka ragam arsitektur daerah yang mewakili watak dari masing-masing daerah tersebut. Watak dan ciri-ciri esensial itu disebabkan karena faktor peradaban yang berbeda sehingga dapat terungkap kebiasaan dan pola hidup daerahnya. Hal ini disebabkan karena Islam mempunyai sifat keterbukaan dan toleransi terhadap kebiasaan lama di suatu daerah sehingga telah menyebabkan munculnya berbagai corak baru yang merupakan ciri khas daerah yang tentu dapat menambah kemajuan arsitektur Islam.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa akibat beraneka ragam dan lokasi daerah-daerah yang berjauhan, maka timbullah perbedaan jenjang penampilan arsitektur setiap daerah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan lingkungan dan adat istiadat. Disamping itu faktor komunikasi yang sangat menentukan dan berpengaruh untuk pembangunan sebuah

Mesjid. Dengan demikian, suatu daerah tertentu akan lebih cepat menerima masukan dari luar dan dapat merubah kebiasaan lamanya. Hal ini berpengaruh pada kebiasaan arsitektur khas yang masih sangat tradisional seperti Masjid Tengku Di Kila yang merupakan salah satu Masjid tua di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dilihat dari lokasinya, mesjid ini didirikan di atas bukit dan dikelilingi oleh pohon-pohon besar sehingga mesjid terlindungi dari sengatan matahari. Penempatan Masjid di atas bukit mengingatkan kita pada tradisi sebelum Islam yaitu pada masa pengaruh agama Hindu. Dalam filsafat Hindu disebutkan bahwa tempat yang tinggi biasanya disimbolkan seperti gunung dianggap tempat tersebut suci. Hal ini terlihat pada penempatan bangunan suci (candi atau pura) yang kebanyakan di atas gunung atau bukit, seperti candi yang terdapat di Gunung Penanggungan dan Gunung Arjuna di Jawa Timur.

Dinding bangunan Masjid memiliki ventilasi udara yang berbentuk seperti terali di dinding sisi Utara dan Selatan. Sementara di sisi Timur bagian atas dinding tembok dindingnya terbuka tanpa penghalang kecuali di bagian tengah yang merupakan pintu masuk ke dalam Masjid. Dari segi arsitektur, model dindingnya terbuka pada sisi timur dengan ventilasinya berbentuk terali di dinding sisi Selatan dan Utara. Ini menunjukkan adanya sirkulasi udara yang baik di dalam Masjid, sehingga udara di dalam Masjid menjadi sejuk dan tidak panas. Sementara dari aspek simbolis dinding timur yang setengah terbuka itu menunjukkan sikap keterbukaan masyarakatnya (terus terang, tidak saling curiga dan terbuka terhadap orang lain) sehingga memungkinkan bagi siapa saja yang akan memasuki ruangan mesjid itu pada setiap saat.

Tiang-tiang Masjid Tengku Di Kila berbentuk segi delapan dan secara arsitektur berfungsi sebagai kontruksi atas penyangga atap. Tiang persegi delapan adalah ciri khas Masjid di daerah Aceh yang mencerminkan delapan penjuru arah angin. Pola hias dan ornamen yang terdapat pada balok trik/lari adalah sulur-sulur daun yang melambangkan kesuburan dan tali

sulaman yang terkait sebagai lambang persaudaraan dan kegotongroyongan masyarakat Aceh.

Atap Mesjid Tengku Di Kila berbentuk limasan/tumpang dua dengan bahan penutup terbuat dari seng. Bentuk atap tumpang ini merupakan ciri khas bangunan di Indonesia yang ada sebelum Islam yaitu bangunan yang merupakan Meru. Atap tumpang adalah bentuk atap yang bersusun ke atas, semakin ke atas semakin kecil dengan bagian atasnya yang berbentuk limas, jumlah susunan selalu ganjil, biasanya berjumlah tiga atau lima. Sementara undakannya seperti yang terdapat pada Mesjid Banten, namun terdapat juga atap yang bentuknya bersusun dua dan satu. Pada segi arsitektur Mesjid dengan atap bertingkat ini memberikan kebebasan pada sirkulasi udara, dimana Mesjid sebagai tempat berkumpulnya orang banyak memerlukan sirkulasi udara yang baik dan sirkulasi ini di salurkan melalui atap-atap yang bertingkat.

Mesjid Teungku Di Kila difungsikan sebagai tempat shalat lima waktu dan shalat Jumat masyarakat setempat. Selain itu, Mesjid ini digunakan sebagai tempat bertafakkur atau bersemadi. Hal itu disebabkan oleh suasana Mesjid yang mendukung untuk melakukan penyendirian atau persemadian karena letaknya di atas bukit yang sangat sepi dan dikelilingi oleh pohon-pohon besar dan makam-makam tokoh dari keturunan Tengku Di Kila. Keunikan fungsi Mesjid ini adalah pada setiap kali dilaksanakan shalat Jumat, khatib diwajibkan penyampaian khutbah Jumat dengan memakai bahasa Arab, khatib memegang tongkat sambil naik ketangga mimbar lalu membacakan khutbah Jumat.



Gambar 8: Mesjid Tua Trumon, Trumon (atas), Mesjid Tuwo Padang, Tapaktuan (tengah) dan Mesjid Pulau Kambing, Kutafajar Kluet Selatan (bawah)
(Foto: Sudirman, Dahlia, Essi Hermaliza)

TIGA MESJID TUA DI ACEH SELATAN

Mesjid Tua Trumon

Mesjid Tua Kerajaan Trumon merupakan salah satu lambang kemegahan dan kebanggaan masyarakat Trumon. Mesjid bersejarah ini secara administratif berada di Desa Keude Trumon, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan. Meskipun data berupa angka tahun sejarah pendirian Mesjid Tua Trumon belum diketahui secara pasti, karena belum ditemukan inskripsi atau sumber lain yang dapat menunjukkan tahun pembangunan Mesjid.

Menurut salah seorang tokoh masyarakat terkemuka mengatakan bahwa Mesjid ini bangunan dasarnya dibangun oleh Teuku Raja Husein, salah seorang wali kerajaan Trumon pada masa pemerintahan Kolonial Belanda. Beliau diangkat oleh Belanda sebagai wakil Belanda di negeri Trumon sebagai pengganti Teuku Raja Lek yang telah diasingkan ke Kutaraja. Pengangkatan Teuku Raja Husin sebagai wakil Belanda di Trumon telah mencanangkan pembangunan kembali negeri Trumon yang telah mengalami kehancuran beberapa waktu sebelumnya.

Beliau membangun sarana dan prasarana untuk menunjang pembangunan kembali negeri Trumon seperti membangun saluran irigasi Jambo Dalem yang masih utuh sampai sekarang untuk kelancaran dan pengembangan sektor pertanian. Di samping itu, beliau juga membangun sarana ibadah berupa Mesjid (Mesjid Trumon) yang melibatkan seorang arsitek Cina bernama si Apek-Apek yang datang dari Malaysia menuju negeri Trumon.

Penyelesaian bangunan Mesjid ini diteruskan oleh generasi selanjutnya karena pada tahun 1942 Jepang memasuki wilayah negeri Trumon dan menangkap Teuku Raja Husin karena memperisteri putri Belanda, lalu mengasingkannya, sehingga buyarlah cita-cita luhur Teuku Raja Husin untuk meraih kembali masa jaya yang pernah diraih oleh Kerajaan Trumon. Jepang-pun bertekad untuk menduduki dan menguasai wilayah

Trumon dengan melakukan penangkapan terhadap Belanda dan antek-anteknya serta membentuk pemerintahan sampai ke pelosok Aceh Selatan. Untuk wilayah kerajaan Trumon dijadikan wilayah kecamatan yang dipimpin oleh seorang *Shunco* (camat). Lalu Jepang mengangkat Teuku M. Daud sebagai Camat, dengan sendirinya riwayat Kerajaan Trumon berakhir. Wilayah kecamatan Trumon pada waktu itu dibagi dalam tiga mukim yaitu Mukim Buloh Sema, Mukim Kuta Tuha, dan Mukim Krueng Luas.

Bangunan Mesjid ini berdenah bujur sangkar, dicat dengan warna putih, dan dikelilingi pagar teralis beton dengan pintu gerbang utama di sisi selatan. Untuk masuk ke ruang utama Mesjid melalui pintu masuk dan menaiki tiga anak tangga terbuat dari beton yang diberikan keramik terletak di sebelah selatan, dan pintunya terdiri dari jerejak besi. Bagian atas pintu dilengkapi 3 buah lubang angin berbentuk busur berjari-jari. Pada sisi utara dan selatan bangunan Mesjid terdapat jendela kaca berbentuk persegi panjang yang dilengkapi lubang angin berbentuk busur. Jendela dan lubang angin terdiri dari tiga buah dan dicat dengan warna coklat. Sisi-sisi dinding dilengkapi dengan pilar-pilar semu.

Di atas ruang utama terdapat ruangan berdenah segi delapan yang dilengkapi pintu dan jendela berbentuk persegi panjang, serta atap. Lantai ruang ini terbuat dari kayu/papan. Di atasnya terdapat ruangan yang berukuran lebih kecil dengan denah segi delapan, diakhiri dengan puncak berupa kubah berwarna hitam. Pada bagian puncak kubah terdapat kemuncak berbentuk bulat dan hiasan bulan bintang. Di sudut atas ruang utama di sebelah timur kiri dan kanan terdapat kubah dalam bentuk kecil yang dicat warna hitam dan di atas puncak terdapat hiasan bulan sabit dan bintang.

Bangunan Mesjid mempunyai 8 buah tiang utama (soko guru), berbentuk persegi empat dari beton berwarna krem kecoklat-coklatan. Tiang ini berfungsi sebagai penopang dan penyangga ruang atas, sedangkan satu tiang soko guru berada di tengah-tengah berbentuk bulat dan berukuran lebih besar, yang

terbuat dari beton yang dilapisi dengan keramik bermotif kotak-kotak berwarna biru. Tiang ini berfungsi sebagai penyangga ruang atas sampai ke ruang yang lebih kecil. Di dalam ruang utama Mesjid terdapat tangga melingkar terbuat dari kayu yang terdiri dari 25 anak tangga untuk naik ke ruang atas. Pada dinding sebelah barat terdapat lubang angin dari susunan blok beton. Tempat wudhu' terdapat di sebelah timur Mesjid terbuat dari bata dan diplester. Lantai Mesjid terbuat dari keramik berwarna kuning telur (crem).

Fungsi utama Mesjid adalah sebagai tempat shalat lima waktu dan shalat Jumat dan tempat pengajian (ceramah agama). Di samping itu, Mesjid ini juga difungsikan sebagai pusat aktifitas ibadah bersifat sosial yang menekankan hubungan sesama manusia. Selain itu, hal-hal yang berhubungan dengan kemaslahatan umum, seperti pembayaran zakat, tempat musyawarah untuk penyelesaian perkara dan sengketa dalam masyarakat, karena pada masa itu Mesjid tersebut satu-satunya di kecamatan Trumon yang terdiri dari tiga mukim, sehingga fungsi Mesjid multi komplit dalam masyarakat Trumon pada saat itu.

Mesjid Tuwo Padang

Mesjid Tuwo Padang terletak di Kelurahan Padang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Menurut informasi salah seorang tokoh masyarakat setempat dan berdasarkan pada data (dokumentasi) yang terpajang pada papan informasi di dalam Mesjid menyebutkan bahwa Mesjid Tuwo Padang pertama sekali dibangun pada tahun 1276 H - (1858 M). Angka tahun tersebut terdapat dan ditulis pada salah satu tiang Mesjid di sisi barat yang diabadikan pada salah satu tiang untuk mengingatkan tahun pertama berdirinya Mesjid ini. Bangunan Mesjid dibangun sangat sederhana berbentuk panggung, berkonstruksi kayu dan beratap limasan tumpang dua, dinding dan lantainya terbuat dari papan dan tidak memiliki serambi.

Menurut keterangan dari tokoh masyarakat menyebutkan bahwa Mesjid ini telah mengalami perubahan dan pemugaran sejak tahun 1927 M. Pemugaran tersebut atas prakarsa Kapalo Nagari dan tokoh-tokoh terkemuka antara lain T. Abdurrahman, T. Mahidin Nur, dan T. Raja Pakeh Kepala Landchap Tapaktuan secara gotong royong. Dengan demikian, bangunan Mesjid mulai sempurna dengan menggantikan bagian-bagian yang telah lapuk seperti lantai dan dinding. Mesjid yang dahulu berbentuk panggung dan lantainya dari papan sangat mudah lapuk sehingga bangunannya diganti dengan menggunakan bahan semen.

Secara keseluruhan Mesjid Tuwo Padang berdenah persegi empat, terdiri dari ruang utama, serambi, dan mihrab. Bentuk atap limas bertingkat dua terbuat dari seng. Mesjid ini berdiri di tengah-tengah pemukiman di pinggir jalan Kelurahan Padang yang dibatasi dengan sekolah dan rumah penduduk. Di sebelah utara dibatasi dengan jalan dan rumah penduduk, sebelah timur berbatasan dengan jalan dan gedung sekolah MTsN. Sementara di sebelah selatan berbatasan dengan gedung Sekolah Dasar Padang dan sebelah barat berbatasan dengan rumah penduduk. Mesjid ini menghadap ke arah timur yang dikelilingi oleh pagar tembok di bagian bawahnya dan bagian atasnya jeruji besi dicat warna putih dengan pintu gerbang utama di sisi timur.

Pada pintu gerbang masuk halaman Mesjid terdapat panel tiang *pigura* dari tembok berbentuk panjang. Di bagian atasnya dibentuk melengkung yang dilengkapi dengan hiasan mustaka berwarna hitam dan tulisan Allah berwarna putih. Pada panel ini terdapat tulisan kaligrafi Arab yang berbunyi: "*Udkhuluuha bisalaamin aaminiin*" yang artinya "masuklah ke dalamnya dengan aman sentosa". Pada halaman Mesjid di bagian timur dibuat jalan setapak yang dipasang conblok dan tegel. Pintu masuk ruang utama Mesjid berada di sisi sebelah timur. Sebelum masuk ruang utama terdapat teras/serambi dan tiga buah tiang beton yang berfungsi sebagai penyangga atap

serambi. Selain itu, terdapat tiga buah pintu masuk berbentuk persegi yang terdiri dari dua daun pintu terbuat dari kayu.

Dalam ruang utama terdapat 4 tiang soko guru dan 12 tiang lainnya berbentuk segi delapan. Empat tiang soko guru terletak di tengah ruangan dan berfungsi sebagai penopang atap tumpang satu dan dua. Sementara dua belas tiang lainnya terletak di seluruh sisi bangunan yang berfungsi sebagai penyangga dinding dan atap tumpang satu. Lantai terbuat dari keramik, dinding sisi utara, selatan, dan timur terbuat dari papan, sedangkan dinding sisi barat telah diganti dengan beton. Jendela terletak di dinding sisi utara dan selatan masing-masing ada tiga buah berbentuk persegi panjang terbuat dari kayu yang terdiri dari dua daun jendela. Di sisi barat terdapat tiga buah jendela terbuat dari kaca berbentuk persegi panjang yang dilengkapi lubang angin berbentuk busur dengan ventilasi berbentuk jari-jari.

Mihrab berada pada sisi barat menjorok ke luar dan mempunyai tiga relung, yang bagian atasnya berbentuk setengah lingkaran dan terdapat pola hiasan kaligrafi berupa ayat-ayat suci Al-Quran. Pada relung pertama diberi pintu yang difungsikan sebagai tempat menyimpan Al-Quran dan kitab-kitab agama. Relung tengah berfungsi sebagai tempat imam memimpin shalat. Sementara pada relung ketiga terdapat mimbar terbuat dari kayu dan pada badan mimbar terdapat tulisan Allah.

Ruangan serambi berada di sisi utara, timur, dan selatan. Lantainya dibuat dari keramik yang berwarna putih. Serambi merupakan ruangan terbuka tanpa dinding. Bangunan serambi terdiri dari tiga buah tiang yang berbentuk empat persegi, adapun fungsinya adalah sebagai penyangga atap serambi yang berbentuk limas. Bangunan serambi pada sisi utara dan timur lebih luas daripada serambi yang berada di sisi selatan.

Beduk merupakan salah satu perlengkapan Mesjid. Adapun fungsinya adalah sebagai media untuk menyampaikan waktu shalat telah tiba di samping untuk memberitahukan berita-berita penting kepada masyarakat, misalnya tentang

kebakaran, serangan musuh, dan bahaya banjir. Hal itu merupakan tradisi atau adat di kalangan masyarakat Aceh khususnya dan di Nusantara umumnya. Demikian juga di dalam Mesjid ini dapat dijumpai sebuah beduk yang terletak di ruang serambi di sudut dinding sisi barat. Letak beduk diapit dengan tralis kayu dilengkapi dengan angka tahun pembuatannya ditulis pada papan digantung di dinding. Angka tahun yang tertera di papan tersebut yaitu 1280 H (1862 M) atau empat tahun setelah didirikan Mesjid Tuwo Padang (bangunan lama). Beduk ini tidak difungsikan lagi sebagaimana mestinya.

Keunikan yang terdapat pada bangunan Mesjid ini adalah pada ornamen pola hias berupa sulur-suluran dan bunga teratai. Ini terdapat pada semua balok lari dan balok *linteung* dengan warna dasar biru muda. Sementara ornamen-ornamennya berwarna merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Pada balok miring dan balok kap (*indreng*) di bagian depan terdapat pola hias sulur-suluran dan kembang teratai. Terdapat kaligrafi Arab pada balok kap yang terdapat di atas pintu masuk ruang utama Mesjid.

Adapun kalimat kaligrafi yang tertera di atas pintu masuk sebelah kanan berbunyi: "*Ya Jibril, Ya Mikail, Ya Israfil, Ya Izrail*". Kaligrafi yang tertera di atas pintu tengah berbunyi: "*Lailaaha Illallah, Muhammadurrasuulullah, Ya Allah, Ya Muhammad, Allahu fahuwa Hayyun Laa Syariikalahu, Fainnaka mansyuura*". Sementara kaligrafi yang terdapat di atas pintu sebelah kiri berupa nama empat orang shahabat rasulullah yang berbunyi: "*Ya Umar, Ya Usman, Ya Ali, Ya Abu Bakar*". Pada balok ujung dipenuhi dengan pola hias sulur-suluran dan tali terkait berwarna biru dan merah.

Umumnya para seniman ukir atau seniman kriya lokal mereka mengekspresikan bakat seni dan rasa estetikanya di atas kayu. Biasanya untuk bangunan rumah-rumah, gedung-gedung pertemuan, meunasah, dan Mesjid-Mesjid diukir dengan motif kaligrafi berupa garis-garis, motif kembang dan sulur-suluran. Semua motif tersebut mempunyai makna dan lambang simbolik bagi masyarakat Aceh Selatan. Demikian juga tata warna, lebih

didominasi oleh warna-warna yang terang sehingga mengandung kesan yang tegas dan menantang. Warna yang digunakan seperti warna merah darah, hijau rumput, kuning emas, ungu, biru, dan hitam. Menurut masyarakat warna-warna tersebut adalah makna dari ciri khas dan budaya masyarakat Aceh Selatan itu sendiri.

Di kalangan masyarakat Aceh warna hitam mempunyai makna universalisme yaitu mengandung kesan keanggunan, keluhuran, keagungan, dan keabadian. Warna merah mewakili watak kegagahan, keberanian, kesyuhadaan, dan kemujahidian. Hijau adalah warna keagungan dalam kehidupan dan ketuhanan. Sementara kuning berarti kesejahteraan (yang diibaratkan kepada warna gabah dan emas). Sementara itu warna biru adalah lambing cakrawala menuju keharibaan Allah serta warna laut yang luas tak bertepi sebagai simbol atau lambang dari wawasan berpikir dalam menghadapi serta memecahkan berbagai persoalan. Warna putih merupakan warna suci dan sakral, dalam persepsi budaya masyarakat Aceh Selatan khususnya, warna tersebut melambangkan kesucian, sehingga kebanyakan bangunan Mesjid diberikan cat dengan warna putih karena dianggap sebagai tempat suci bagi umat Islam. Demikian juga dengan Mesjid Tuwo Padang ini kini seluruhnya dicat dengan warna putih.

Pada tahun 1950, seiring dengan penambahan jumlah penduduk maka untuk menampung jamaah shalat yang banyak, mulailah Mesjid ini diperluas dengan penambahan bagian serambi pada sisi utara, timur, dan selatan. Demikian juga dengan seluruh lantainya diganti dengan keramik. Hingga kini Mesjid Tuwo Padang selain difungsikan sebagai tempat shalat lima waktu, shalat Jumat dan juga sebagai tempat peringatan hari-hari besar Islam dan tempat pendidikan Al Quran (TPA Al Khairiah). Masyarakat setempat menyebutkan Mesjid ini dengan nama *Masagik Tuwo Al Khairiah*. Mesjid ini berstatus sebagai Mesjid kecamatan karena terletak di Kelurahan Padang, di samping itu masih ada sebuah bangunan Mesjid baru berukuran

kecil yang berfungsi sebagai tempat shalat lima waktu. Untuk kegiatan shalat Jumat dilaksanakan di Mesjid Tuwo Al Khairiah.

Mesjid Pulo Kambing

Mesjid Pulo Kambing, sekarang terkenal dengan nama barunya yaitu Nuril Huda. Mesjid tersebut terletak di Desa Pulo Kameng Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Menurut sumber dari masyarakat setempat dan didukung oleh data kaligrafi yang terdapat pada empat tiang soko guru menyebutkan angka tahun dan nama tokoh penggerak pembangunan Mesjid pulo kambing.

Mesjid ini pada mulanya dibangun di Kluet Selatan di seberang sungai pada masa Kejreun Teuku Imam Syah tahun 1282 H atau 1864 M. Lokasi Mesjid sekarang berada di Desa Pulo Kambing Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, akibat sering terjadinya erosi air sungai maka keberadaan Mesjid kurang strategis. Pada tahun 1329 H atau 1910 M Mesjid dibangun kembali dengan tidak merubah bentuk dan bahan seperti aslinya. Bangunannya terdiri dari empat soko guru dan 12 tiang lainnya. Pada masa pemerintahan Kejreun Teuku Raja Mukmin pembangunan Mesjid dilaksanakan secara gotong royong sehingga melibatkan beberapa keuchik dan tokoh masyarakat antara lain: Keuchik Imam Kampung Krueng Kluet dan Imam Ruak dan Keuchik Kampung Tiga Nyak Ushin, Keuchik Qamar yang dijuluki pangkat panglima Muda Basyar, anak Panglima Chik, Keuchik Mahmud Krung Batu sebagai tukangnyanya, Keuchik Ricah Ibnu Teungku Karimukmin dari Kampung Ruak, dan Zulkarim dari Kampong Paya.

Pembangunan Mesjid ini tersendat-sendat akibat terjadi serangan kolonial Belanda di kawasan Kluet Utara. Pada tahun 1351 H / 1932 M di bawah kepemimpinan Teuku Meuráh Adam sebagai Kepala *Landschip* Kluet Utara yang dibantu oleh rekan-rekannya, yaitu Imam Mesjid Teuku Haji Ali Basyah, Imam Teungku Haji Susoh, Haji Raja Tawar dari Kampung Peuruah, dan Keuchik Mamat bersama tokoh-tokoh masyarakat lainnya

meneruskan pembangunan Mesjid ini sebagaimana yang disaksikan sekarang ini.

Mesjid Pulo Kambing salah satu bangunan bercorak tradisional berkonstruksi kayu, berdenah bujur sangkar dengan atap limasan bersusun tiga. Bangunan Mesjid berada di pinggir jalan Desa Pulo Kambing dengan orientasi menghadap ke timur, yang dikelilingi oleh pagar tembok dari susunan beton lubang angin, pintu masuk halaman Mesjid terletak di sebelah timur. Bangunan Mesjid terdiri dari ruang utama dan serambi. Atap bangunan merupakan atap tumpang tiga dari bahan seng.

Di antara tingkatan atap terdapat dinding dari kayu dan jendela yang berbentuk oval/bulat terbuat dari kaca seperti jendela kapal. Pada tingkat ketiga berbentuk segi delapan (oktagonal) dan dilengkapi dengan selasar. Di setiap sisi dindingnya terdapat jendela dari kayu yang berbentuk persegi dan bagian atasnya melengkung. Pada bagian puncaknya terdapat mustaka berbentuk kubah yang dialasi dengan hiasan kelopak bunga delapan tangkai. Pada ujung mustaka terdapat hiasan bulan bintang.

Untuk masuk ruang utama kita harus melalui pintu masuk ruangan serambi yang berada di sisi timur. Dalam ruang utama yang berukuran 13,50 x 14,40 meter terdapat empat tiang soko guru dan 12 tiang penyangga dengan bentuk segi delapan. Pada tiang-tiang soko guru dipenuhi dengan ukiran kaligrafi Arab dalam bahasa Melayu yang diberi cat kuning emas. Kaligrafi itu bertuliskan asma Allah dan tokoh perintis pembangunan, dan angka tahun sejarah pendirian Mesjid.

Tiang penyangga berfungsi sebagai penopang atap tumpang satu dan dua, sedangkan tiang soko guru berfungsi sebagai penopang atap tumpang satu, dua dan tiga. Dinding terdiri dari papan kasar (tidak diketam) dengan lebar 35 cm dan tiang kosen 10 x 10 cm. Jendela terdapat pada dinding sisi utara dan selatan masing-masing 3 buah, sedangkan di dinding sisi barat dan timur masing-masing terdapat dua buah. Bentuk jendela persegi panjang dan berdaun dua dengan ukuran panjang 165 centimeter dengan lebar 112 centimeter.

Di sisi barat ruang utama terdapat ruangan menjorok ke luar seperti bilik kecil yang berfungsi sebagai mihrab. Ruangan mihrab ini gerbangnya sudah dipugar (baru), adapun bentuk relifnya melengkung dengan tumpuan pada dua buah tiang tambahan berbentuk bulat. Serambi pada bangunan Mesjid ini letaknya di sisi timur dan selatan dengan ditopang oleh tiang-tiang kayu yang berukuran kecil. Dinding serambi bangunan dibuat dari kayu tralis dan lantainya dibuat dari semen. Sementara lantai Mesjid pada ruang utama diganti dengan keramik yang berwarna putih. Sarana lain di dalam kompleks Mesjid Pulo Kambing adalah bak wudhu' yang terletak pada sisi barat mesjid.

Mesjid Pulo Kambing hingga saat ini masih difungsikan sebagai tempat shalat lima waktu secara berjamaah dan shalat Jumat. Selain itu, juga dimanfaatkan sebagai tempat pengajian. Menurut informasi dari masyarakat setempat, Mesjid ini dianggap *keramat*. Hal ini dengan adanya pancaran air seperti mata air yang keluar dari salah satu tiang soko guru sehingga di buatlah kran dan bak di sekeliling tiang itu untuk menampung air tersebut agar tidak merembes ke lantai Mesjid.

Menurut kepercayaan sebagian masyarakat sekitarnya bahwa air tersebut dapat membawa berkah, sehingga orang berdatangan ke Mesjid sekaligus hendak melepaskan *nazar*. *Nazar* dilakukan dengan membaca Surat Yasin berkali-kali dan shalat hajat kemudian mengambil air yang keluar dari tiang soko guru itu untuk diminum dengan keyakinan bahwa air tersebut dapat menyembuhkan penyakit yang tentunya atas izin Allah.

Sebagian masyarakat yang mengunjungi Mesjid tersebut setelah mereka menunaikan shalat maka seringkali mereka membawa pulang air tersebut ke rumahnya. Di antaranya air tersebut untuk diminumkan kepada anak gadis yang belum mendapatkan jodoh dengan harapan bahwa air dari Mesjid (rumah Allah) tersebut dapat membawa berkah sehingga terkabul apa yang dihajatkannya, antara lain cepat mendapatkan jodoh dan juga untuk kepentingan lainnya.



Gambar 9: Masjid Raya Nurul Huda, Gosong Telaga, Singkil Utara
(Foto: Miswardi)

MESJID RAYA NURUL HUDA GOSONG TELAGA

Mesjid Nurul Huda, kampung Gosong Telaga, Kecamatan Singkil Utara adalah mesjid tertua di Kecamatan Singkil Utara. Sebelumnya mesjid ini terbuat dari kayu. Sejarah mengenai siapa yang membangun mesjid ini tidak diketahui lagi oleh tetua kampung setempat. Gosong Telaga adalah sebuah daerah yang masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Kampung ini memiliki keunikan karena pembangunan lasekap permukiman penduduknya harus mengikuti aturan kampung, yaitu rumah harus dibangun sejajar dengan rumah-rumah yang ada disebelahnya. Jadi tidak ada rumah yang lebih menjorok kedepan atau lebih masuk kebelakang dari rumah-rumah disekitarnya. Kondisi inilah yang mengantarkan kampung ini beberapa kali mendapat penghargaan sebagai juara lomba desa tingkat propinsi.

Berawal dari keinginan mendirikan sebuah mesjid yang lebih besar dan lebih permanen, maka pada tahun 1980, masyarakat Gosong Telaga melakukan musyawarah untuk tujuan dimaksud. Dalam musyawarah tersebut terpilihah Haji Tani selaku ketua panitia pembangunan tersebut. Pembangunan mesjid dilakukan secara gotong royong oleh seluruh warga desa, sumbangan dapat berupa uang, tenaga, maupun sarana dan prasarana. Sebelum mulai membangun mesjid, masyarakat mengumpulkan material yang mereka angkut dari Barus dan Sibolga, karena pada waktu itu akses hubungan yang lancar dari Gosong Telaga maupun Singkil ke kedua kota tersebut yang berada di Propinsi Sumatera Utara. Pelepasan tim pertama yang berangkat mengambil material terlebih dikumandangkan azan. Mereka tidak digaji.

Pengambilan bahan dasar seperti batu diambil di Sungai Aek Sirahar Kinali Barus Tapanuli Tengah dengan menggunakan perahu masyarakat. Masyarakat yang terdiri dari remaja dan orang dewasa ikut terlibat mengambil batu ke Barus dengan biaya sendiri. Masyarakat berangkat ketika bulan bulan purnama karena ketika bulan purnama masyarakat nelayan tidak melaut untuk mencari ikan.

Pada waktu tahun 1980-an jumlah perahu yang dimiliki masyarakat Gosong Telaga masih sangat terbatas hanya orang-orang yang berkecukupanlah yang mempunyai perahu dan ukuran kaya atau miskinnya seseorang pada saat itu bisa dilihat dari perahu yang dia miliki karena hanya orang-orang kaya yang mampu membuat perahu ketika itu. Satu perahu mampu mengangkat batu lebih kurang tiga ton. Masyarakat yang mempunyai perahu pada saat itu di Gosong Telaga adalah:

1. Sutan Kari dua buah perahu
2. H. Ama mempunyai dua buah perahu
3. H. Tani mempunyai dua buah perahu
4. Khalidi mempunyai satu buah perahu
5. Mengko mempunyai dua buah perahu
6. Umar mempunyai satu buah perahu

7. Gahama mempunyai satu buah perahu
8. Arifin mempunyai satu buah perahu
9. H. Alimuddin mempunyai satu buah perahu
10. Bustami mempunyai satu buah perahu
11. Naim mempunyai satu buah perahu
12. Rasip mino mempunyai dua buah perahu
13. H. Sadalil mempunyai dua buah perahu
14. Tuan Suni mempunyai satu buah perahu
15. Hasmuil mempunyai satu buah perahu
16. H. SK mempunyai satu buah perahu

Perahu yang dimiliki warga pada waktu itu adalah perahu tradisional tanpa mesin. Selanjutnya masyarakat meminta bantuan kepada perusahaan HPH PT. Gruti untuk membantu pembangunan mesjid. Selanjutnya PT. Gruti memberikan bantuan operasional sebuah mobil dan juga tug boat yang mereka miliki. Dua puluh dua perahu pengangkut batu tersebut kemudian di tarik oleh tug boat milik perusahaan PT Gruti di Gunung Raya dengan sekali tarik, tiga tahun berselang sebahagian masyarakat Gosong Telaga Sudah ada yang punya boat. Boat adalah perahu yang sudah bermesin. Pemilik boat di Gosong Telaga pada waktu itu adalah :

1. Sutan Kari mempunyai satu buah
2. H. Patani mempunyai satu buah
3. H. SK mempunyai satu buah
4. H. Alimuddin mempunyai satu buah
5. Tuan Suni mempunyai satu buah
6. Asri mempunyai satu buah
7. Alinur mempunyai satu buah
8. Aminuddin Megko mempunyai satu buah
9. H. Sadalil mempunyai satu buah
10. Mahlil Kumak mempunyai dua buah

Karena boat sudah ada maka masyarakat tidak lagi menggunakan perahu untuk mengambil batu ke Barus namun kapasitas bot dengan perahu sama yaitu tiga ton sebenarnya bisa empat ton namun karena bot memiliki kamar mesin lagian juga tidak bisa terlalu dipaksa melebihi tiga ton karena bot bermuatan batu kalau di hempas gelombang tidak membal/membenam makanya tidak bisa terlalu di paksa lebih dari tiga ton.

Sebelum berangkat ke Barus untuk mengambil batu ada pelepasan dari masyarakat yang berbondong-bondong mengantarkan tim pengambil batu ke dermaga dengan di peusejuk dan di panjatkan doa terlebih dahulu, lantunan azan yang dikumandangkan merupakan tanda pelepasan tim pengambil meterial dari dermaga dan berangkat menuju Barus. Mereka berangkat pukul 20.00 WIB dan sampai Barus pagi hari. Sesampai di Barus masyarakat tidak buang-buang waktu, mereka langsung mengambil batu memasukkannya kedalam perahu hingga sore hari dan langsung pulang menuju Gosong Telaga pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB.

Untuk pengambilan pasir diambil dari kecamatan Simpang Kanan dari sungai Salabuan oleh masyarakat Gosong Telaga sendiri pengambilan pasir ini pun juga pada bulan terang ketika masyarakat libur melaut namun pasirnya tidak diangkut dengan Perahu tetapi dengan mobil perusahaan PT. Gruti yaitu sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspor impor balok kayu.

Peletakan batu pertama bangunan beton dilakukan pada tahun 1980 Oleh H. Tani selaku ketua umum panitia pembangunan mesjid, dan pemberian nama Nurul Huda yang artinya adalah cahaya penunjuk. Dimaksudkan agar mesjid tersebut senantiasa menjadi penunjuk cahaya Islam bagi masyarakat setempat.

Pembangunan mesjid Nurul Huda terbilang sangat lamban karena biaya pembangunan nya hanya mengandalkan uang amal laut yakni 5 % dari hasil pendapatan masyarakat nelayan dan ini berlaku untuk masyarakat yang menggunakan

perahu kecil maupun bot besar ini sesuai dengan kesepakatan dari panglima laut yang menjabat pada waktu itu yaitu Umar. Saat ini mesjid Nurul Huda adalah mesjid Raya bagi warga Gosong Telaga dan merupakan mesjid terbesar di daerah ini.



Gambar 10: Mesjid Raya Sultan Ahmad Syah, Tanjung Balai
(Foto: Nasrul Hamdani & Muhammad Affan)

MESJID RAYA SULTAN AHMADSYAH TANJUNG BALAI: 'YANG TERSISA' DARI PERANG 1865

Berdiri di jantung kota Tanjung Balai yang semakin sesak oleh petak-petak rumah toko (ruko) membuat Mesjid Raya Sultan Ahmad Syah terhimpit dan kehilangan 'aura magis'-nya sebagai monumen pengingat sang pendiri; Sultan Ahmad Syah dari Asahan, mesjid kerajaan sekaligus cagar budaya. Mesjid yang kubah utamanya sudah lebih rendah dari jejeran loteng ruko sarang walet yang 'memagari' kompleks semakin tenggelam pula ketika Maghrib menjelang. Riuh rendah rekaman suara kicau burung walet yang bising itu memenuhi udara membuat suasana di ambang petang di lingkungan mesjid berikut kompleks makam diraja Asahan yang mulai dibangun tahun 1883 itu tidak lagi pernah terasa hening.

Pengembangan kota sejak tahun 1970-an telah mengubah kedudukan Mesjid Sultan Ahmadsyah dalam tata ruang kota Tanjung Balai. Jika di masa lalu mesjid dan istana menjadi pusat orientasi maka di masa kini mesjid tidak lebih sebagai salah satu sarana peribadatan yang tertua di kota itu. Permukaan jalan protokol di depan mesjid kian meninggi membuat tanah pekarangan mesjid menjadi lebih rendah. Pergeseran paras jalan ini memaksa pengelola meninggikan paras tanah pekarangan sehingga berakibat permukaan lantai serambi yang dahulu berlantai tegel corak dari Maastricht kini hampir sejajar dengan pekarangan dan permukaan jalan yang dinamai Jalan Mesjid Raya di Kelurahan Indera Sakti Kecamatan Tanjung Balai Selatan itu sekaligus membuat mesjid itu terlihat pendek.

Mesjid yang semula dibangun di atas tanah seluas 8.455 M² ini praktis menjadi satu-satunya peninggalan monumental Kesultanan Negeri Asahan yang masih berdiri.² Istana Kota Raja Indera Sakti (KRIS) dan Istana Kota Dingin yang menjadi 'pasangan' mesjid telah rata dengan tanah. Sejumlah bangunan dari masa kolonial memang masih dapat dilihat sebagai bagian dari struktur tata ruang *gemeente* (kotapraja) Tanjung Balai di masa lalu namun sukar untuk menemukan bangunan lain milik atau peninggalan Kesultanan Negeri Asahan yang masih tegak di kota yang dijuluki Kota Kerang itu. Sebuah alun-alun yang dinamai Lapangan Pasir oleh masyarakat Tanjung Balai dengan beberapa pertimbangan dapat dijadikan pembanding.

Lapangan Pasir yang terletak kurang-lebih satu kilometer dari mesjid tidak seperti alun-alun umumnya. Pada lapangan itu dihamparkan pasir putih sebagai pengganti rumput. Lapangan yang menjadi tempat pemerintah kota menggelar pameran pembangunan dan ruang berkumpul warga Tanjung Balai untuk menikmati petang ini disebutkan sudah ada sejak lama namun kemungkinan baru ditata sebagai alun-alun utama kota ketika Asahan ditetapkan sebagai daerah langsung pemerintah kolonial Hindia Belanda (1886) disusul penetapan *gemeente* Tanjung Balai (1917).³ Penetapan tahun 1886 itu langsung mengubah

struktur politik Asahan terutama pasca-kekalahan Sultan Ahmadsyah dalam Perang 1865 dan gugurnya Pak Netak (*sic*), pemimpin gerilya Asahan di Dolok.⁴

Penetapan status administratif atas daerah-daerah taklukan baru di Pantai Timur Sumatera menyusul pembukaan perkebunan tembakau di Deli merupakan awal modernisasi kawasan ini. Kota-kota baru termasuk ibukota kerajaan tumbuh dan berkembang mengimbangi pertumbuhan ekonomi perkebunan. Dalam masa-masa inilah, kota-kota kolonial dan bandar-bandar utama yang menjadi ibukota kerajaan Langkat, Deli, Serdang dan Asahan; empat kerajaan besar yang terikat *lange verklaring* atau plakat panjang ditataulang sebagai pusat administrasi pemerintah swapraja sekaligus kota yang merepresentasikan kebudayaan Melayu. Oleh karena itu, bukan tanpa alasan jika *landmark* ibukota pemerintah swapraja itu termasuk kerajaan-kerajaan yang lebih kecil adalah istana dan mesjid.⁵

Mesjid Raya Sultan Ahmadsyah didirikan oleh Sultan Asahan IX setelah negeri itu didera krisis politik selama 1867-1879. Armada *Militaire Expeditie tegen Serdang en Asahan 1865* yang menggempur Asahan tidak saja menghancurkan negeri itu tetapi turut menimbulkan krisis. Hukuman buang yang dijatuhkan pada Sultan Ahmadsyah ke Bengkalis disusul pengangkatan Yang Dipertuan Negeri Kualuh dan Leidong, Tengku Naamalullah Syah bin Muhammad Ishak sebagai Sultan Asahan secara sepihak membuat negeri ini terus bergolak. Serangan-serangan dari pedalaman yang dipimpin Pak Netak, Raja Bandar Pulau tidak saja merongrong kedudukan Tengku Abdullah Ni'matullah Syah dan *controleur* Asahan namun menjadi teror bagi patroli-patroli Koninklijk Nederlands Indië Leger (KNIL) di pedalaman.

Tahun 1868-1869 instabilitas di Asahan mencapai klimaks menyusul perpecahan antara pembesar Asahan dan Kualuh akibat penunjukan Tengku Abdullah Ni'matullah Syah itu.⁶ Eskalasi konflik pun semakin meluas dengan terlibatnya sejumlah raja dan kepala-kepala kampung, antara lain Tuan

Rondahaim dari Raya, Raja Himbang dan seorang patron di daerah hulu sungai Asahan yang dikenal dengan nama Si Bagot.⁷ Kampung-kampung di pedalaman Asahan mulai dari Dolok, Pulau Raja, Bandar Pulau, Huta Bara, Huta Padang, Buntu Pane dan Bandar Pasir Mandoge pun menjadi basis pertahanan pejuang sedangkan para pemimpinnya terlibat dalam sejumlah serangan atas pos atau patroli-patroli militer Belanda dan kampung-kampung di pinggiran bandar Tanjung Balai.

Ketika eskalasi konflik semakin meluas, Residen Residentie van Sumatra's Oostkust E. Netscher menggantikan Tengku Abdullah Ni'matullah Syah dengan suatu dewan yang dipimpin *controleur* Asahan untuk menjalankan roda pemerintahan. 'Pemakzulan' Yang Dipertuan Negeri Kualuh-Leidong disusul pengangkatan dewan tersebut berlangsung sebelumnya gugurnya Pak Netak (1869). Penggantian ini dinilai gagal meredam serangan pejuang dari pedalaman karena perlawanan Pak netak dilanjutkan oleh kelompok-kelompok yang lebih kecil. Tahun 1870-an, Netscher yang bertanggung jawab atas kendali birokrasi kolonial di Pantai Timur Sumatera mempertimbangkan suatu skema konsensus untuk meredam perlawanan pejuang di pedalaman. Skema itu ialah mengakhiri hukuman buang dan memulihkan kekuasaan Sultan Ahmadsyah.

Pertimbangan lain yang mendorong rencana konsensus itu ialah Koninklijk Nederlands Indië Leger (KNIL) juga terlibat dalam perang di Sunggal, Tapanuli, Simalungun serta menghadapi manuver armada perang Aceh di Pantai Timur.⁸ Oleh karena alasan itu juga, Batavia memilih mengakhiri hukuman buang Sultan Ahmadsyah di Bengkalis dan memulihkan kedudukannya dengan syarat-syarat ketat yang diatur dalam *Acte van Verband*. Dalam perjanjian yang mengikat penguasa tempatan yang baru saja takluk atau tunduk secara damai itu, Sultan Ahmadsyah dipaksa untuk mengakui kedaulatan Belanda atas Asahan dan menutup segala kontak dengan negara dan orang asing selain Belanda. Pemulihan kedudukan Sultan Ahmadsyah itu menandainya perubahan

struktur kekuasaan Asahan, kolonisasi sekaligus awal modernisasi negeri itu.

Perubahan struktur kekuasaan berarti 'pemangkasan' kekuasaan Sultan AhmadSyah atas kehidupan politik dan ekonomi. Hal ini mengakibatkan rasionalisasi jabatan dalam struktur pemerintahan Asahan dan ketergantungan ekonomi yang bersifat kompleks.⁹ Asahan seperti kerajaan lain di Sumatera Timur bergantung secara ekonomi pada tunjangan pemerintah kolonial dan perkebunan. Selain itu penetapan tapal batas antara Asahan dengan negeri-negeri di sekitarnya, perkebunan termasuk daerah langsung pemerintah kolonial atau *rechtstreeksbestuurgebied* telah mempersempit ruang gerak dan daerah kekuasaan Asahan. Kebijakan inilah yang menjadi landasan penataan wilayah Pantai Timur Sumatera yang melahirkan sebuah residensi baru; Residentie van Sumatra Oostkust, lima *gemeente* dan empat *zelfbestuurgebied* yang maju pesat berkat perkebunan di sekelilingnya.¹⁰

Pada awal kolonisasi dan modernisasi itu, Tanjung Balai yang hancur dalam perang 1865 dibangun kembali. Pada masa itu pula, Sultan AhmadSyah disebutkan membangun Istana Kota Raja Indera Sakti dan mesjid pendamping istana yang dinamai Mesjid Raya Sultan AhmadSyah. Mesjid yang didominasi warna hijau dan kuning ini rampung dalam waktu dua tahun terhitung 1883-1885 (*sic*). Tidak diketahui berapa banyak biaya yang dihabiskan Sultan AhmadSyah untuk membangun mesjid beserta kompleks istana Asahan ini namun perluasan dan diversifikasi tanaman perkebunan ke daerah Selatan jadi dasar perbaikan ekonomi Sultan AhmadSyah dari Asahan.¹¹ Diperkirakan pendapatan Sultan Asahan IX pasca-pemulihan kekuasaannya dari konsesi tanah sudah lebih dari cukup untuk membangun kembali ibukota Kesultanan Negeri Asahan.

Mesjid Raya Sultan AhmadSyah Tanjung Balai dibangun permanen dengan teknik pengerjaan Eropa. Permanensi bangunan-bangunan untuk istana dan mesjid di Sumatera Timur menjadi penanda penting untuk menilai jangkauan pengaruh kolonialisme dan modernisasi pada visi para penguasa

tradisional soal hubungan antara *rural-urban* yang biasanya diwujudkan dalam kebijakan tata ruang. Selain itu, sumbangan seni dan teknologi bangunan Eropa pada bangunan-bangunan di kawasan itu juga dapat memahami politik simbol atau simbolisme, mengapa istana para raja dan mesjid di pusat pemerintahan dibangun permanen sementara rumah-rumah para pembesar di pedalaman dan surau di kampung-kampung Melayu bertahan dengan ciri tradisionalnya: semi permanen!

Pembangunan Mesjid Raya Sultan Ahmadsyah pun tidak lepas dari politik simbol dan simbolisme itu. Tarikh pembangunan mesjid yang diterima sebagai *accepted history* adalah 1883 namun jika merujuk tahun kembalinya Sultan Ahmadsyah ke Tanjung Balai (tahun 1885/6) berarti mesjid itu dibangun kira-kira dua-tiga tahun sebelum kedudukan Sultan Asahan IX itu dipulihkan. Dua inskripsi yang dipahat pada panel marmer ditanamkan pada sisi kanan dan kiri pintu utama mesjid pun tidak menyebut tarikh awal pembangunan mesjid (bandingkan inskripsi pada gambar 2 dan 3). Inskripsi ini berbeda dengan inskripsi yang terdapat di Mesjid Raya al-Osmani Labuhan, Medan. Meskipun tidak mencantumkan tahun awal pembangunan namun tahun restorasi mesjid Kesultanan Negeri Deli itu tercantum dalam inskripsi berbahasa Belanda dan Melayu (beraksara Jawi).

Perbedaan tarikh ini menimbulkan pertanyaan 'siapa sesungguhnya yang membangun mesjid ini?' Jawaban atas pertanyaan itu dapat dijawab dengan mengambil rentetan peristiwa sebagai pembanding. Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh misalnya, dibakar tahun 1873 oleh KNIL namun dua tahun kemudian dibangun kembali untuk mengajuk hati sultan dan rakyat Aceh. Siasat itu mungkin berulang ketika Asahan dan Serdang diserang dalam waktu yang hampir bersamaan.¹² Mesjid Besar Serdang yang sesudah perang dinamai Mesjid Sultan Basyaruddin di Rantau Panjang pun diberitakan dibakar sebelum akhirnya dibangun kembali. Dengan analogi itu sangat mungkin jika mesjid lama Asahan yang terletak di tapak Mesjid Raya

Sultan Ahmadisyah sekarang, dibakar sebelum dibangun kembali sebagai bagian dari politik simbol *rust en orde*.

Anakronisme dibalik rekonstruksi peristiwa yang melatarbelakangi pendirian mesjid-mesjid permanen yang umumnya dibangun di penghujung tahun 1800-an di Sumatera Timur agaknya dianggap bukan masalah. Masyarakat menerima apapun kisah yang berkaitan dengan pembangunan dan pemanfaatan mesjid itu. Dalam rekonstruksi pembangunan Mesjid Raya Sultan Ahmadisyah yang diterima umum, tarikh awal pembangunan (1883) dan tahun kepulangan sang sultan dari pembuangan di Bengkalis (1885/6) terpaut dua sampai tiga tahun. Jadi, jika tarikh di atas digunakan sebagai landasan merekonstruksi tahun awal pembangunan mesjid itu maka Mesjid Raya Sultan Ahmadisyah Tanjung Balai ini telah atau mulai dibangun ketika sang sultan masih berada dalam pembuangan.

Kemungkinan di atas mungkin terjadi mengingat proses pemulangan Sultan Ahmadisyah beserta dua saudaranya tidak berlangsung mulus. Tengku Pangeran Besar Muda yang dibuang ke Ambon dan Tengku Adil ke Buitenzorg (Bogor kini) disebutkan menolak kembali terkait dengan masalah-masalah yang timbul menjelang, selama dan sesudah perang berkobar. Sebagai catatan, masalah ini kembali terulang menjelang Sultan Ahmadisyah mangkat. Jadi, dalam konteks ini, (pembangunan) mesjid dan tawaran pemulihan hak-hak sebagai bangsawan mungkin sekali digunakan untuk mengambil hati para pembesar Asahan yang dihukum buang itu. Dengan demikian Mesjid Raya Sultan Ahmadisyah memang dibangun lebih dahulu sebelum tahta Sultan Melayu yang beristeri Bugis (Che Daeng) ini dikembalikan.



Gambar 11: Dua panel inskripsi yang terdapat di sisi kanan dan kiri pintu tengah Mesjid Raya Sultan Ahmadsyah Tanjung Balai. Tulisan inskripsi (atas): *la-ilaha-illa-lah. La-ilaha-illa-llah-malikul-haqq-al-mubin. Maulana Sulthan Ahmadsyah al-Mansyur Bil-llah* (bawah): *la-ilaha-illa-llah-muhammad-al-rasulullah shanq-ul-adil-al-amin* (sic) *almarhum Maulana Sulthan Husinsyah.*

(Foto: Nasrul Hamdani & Muhammad Affan)



Gambar 12: Inskripsi Mesjid Raya al-Osmani Labuhan, Medan.

Isi inskripsi berbahasa Belanda (atas): 'direstorasi untuk Yang Mulia Sultan Deli dan persembahkan oleh Deli Maatschappij ketika Direktur Herbert Cremer mengunjungi Deli pada Desember 1927'. Isi Inskripsi beraksara Jawi (bawah): 'diperbaiki untuk Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Negeri Deli dan dipersembahkan oleh Deli Maskapai sewaktu Direktur Tuan Herbert Cremer mengunjungi Deli bulan Desember 1927'

(Foto: Nasrul Hamdani)

Kemungkinan lain ialah, mesjid permanen itu dibangun pada masa pemerintahan dewan menggantikan mesjid lama yang dibakar ketika perang. Pemberian nama 'Sultan Ahmadsyah' pada mesjid yang dibangun itu mungkin saja dilakukan belakangan menjelang atau sesudah sang sultan kembali. Selain itu dalam tradisi pemberian nama pada mesjid kerajaan, sultan-sultan Melayu yang membangunnya mendapatkan kehormatan untuk menabalkan namanya sebagai nama mesjid. Penamaan ini menandakan bahwa mesjid bagi orang Melayu bukan sekedar tempat ibadah tetapi memiliki fungsi sosial dan sejarah. Mesjid pun difungsikan sebagai media *commemoration* atau mengingat, memetik hikmah terutama untuk memelihara dan/atau membangkitkan *sense of community*.

Media dan *sense* yang disebutkan di atas menjadi motivasi dalam pemilihan atau pembangunan suatu monumen. Untuk mesjid, ada sejumlah contoh untuk menguatkan motivasi pemberian nama mesjid oleh nama penguasa (orang) yang membangunnya ini, antara lain Mesjid Raya al-Osmani (1870/1884) yang dibangun Sultan Osman Perkasa Alamsyah dari Deli, Mesjid Raya Sulaimaniyah di Perbaungan (1894) dan Pantai Cermin (1901) yang didirikan Sultan Sulaiman Shariful Alamsyah dari Serdang dan Mesjid Azizi (1897) yang dibangun Sultan Abdul Aziz Jalil Rahmatsyah dari Langkat. Mesjid yang dibangun belakangan pun ada yang dinamai dengan nama orang mendirikan, misalnya Mesjid al-Musannif di Kompleks Cemara Asri yang didirikan oleh Haji Anif Shah, seorang pengusaha dan dermawan di Medan.

Di luar kemungkinan yang dapat dijadikan eksplanans itu, bangunan Mesjid Raya Sultan Ahmadsyah Tanjung Balai menampilkan ciri bangunan dari masa yang diperkirakan itu. Pilar-pilar 'gendut' berjumlah banyak yang menopang serambi mirip dengan pilar Mesjid Raya Sultan Basyaruddin di Rantau Panjang (untuk membandingkan lihat gambar 4). Mesjid lama yang diperkirakan dibakar dalam Perang 1865 itu lalu kemungkinan dibangun kembali dan dinamai dengan nama penguasa masing-masing. Belum ditemukan keterangan tentang

pembangunan itu namun dengan membandingkan langgam maupun bagian-bagian dari kedua mesjid di bawah ini merupakan salah satu cara untuk mengungkap waktu pembangunan, selain menganalisis alasan dan motivasi politik kolonial secara langsung maupun tidak langsung.

Seperti kebanyakan mesjid lama di Sumatera Timur, pada kompleks Mesjid Raya Sultan Asahan Tanjung Balai terdapat kompleks pemakaman keluarga diraja Asahan. Makam yang ditandai beragam bentuk nisan ini dapat menjadi tolok ukur untuk menilai usia mesjid atau keberadaan pertapakannya. Salah satu cara yang terbilang mudah ialah mengidentifikasi bentuk, corak atau langgam nisan yang ada di kompleks makam ini. Batu-batu nisan yang telah dibentuk secara artistik dengan pola, *jirat*, hiasan atau penandaan *khat* tertentu dapat menjadi landasan untuk menentukan usia nisan serta kawasan sekitarnya.¹³ Selain itu, cara lain yang dapat digunakan ialah menelusuri cerita atau tradisi lisan tentang siapa dan bagaimana sosok yang dikuburkan pertama kali di kompleks mesjid ini.

Pada kompleks Mesjid Raya Sultan Ahmadsyah Tanjung Balai terdapat sejumlah tokoh terkemuka yang dikuburkan di tempat ini. Para tokoh yang terkemuka secara politik dan religius dimakamkan merupakan orang-orang yang terkait dengan kesultanan Asahan. Makam yang terletak di bagian belakang mesjid (jika masuk dari gerbang utama yang dibangun mirip Arc de Triomphe di Paris, The India Gate di Delhi dan gerbang Mesjid Raya al-Mahsun Medan) atau di depan mihrab jika masuk dari gerbang yang terhubung dengan Jalan Gereja di sebelah Barat Daya terlihat sudah padat. Sejumlah tokoh yang dimakamkan di situ antara lain ialah Sultan Ahmadsyah, Sultan Muhammad Husinsyah, ulama kharismatik yang dihormati para sultan dan raja-raja di Sumatera Timur, yaitu Syeikh Ahmad Syu'aib dan Syeikh Haji Abdurrahman Silau atau Tuan Syeikh Silau Laut.



Gambar 13: Pilar-pilar 'gendut' penopang serambi Mesjid Raya Sultan Ahmadsyah
Tanjung Balai (atas - foto: Nasrul Hamdani & Muhammad Affan)
Pilar Mesjid Raya Sultan Basyaruddin, Rantau Panjang
(bawah - foto: Yayasan Kesultanan Serdang - Medan)



Gambar 14: Pemakaman Kerabat Diraja Asahan di Kompleks Mesjid Raya Sultan Ahmad Syah Tanjung Balai (atas). Makam yang dipagari merupakan makam sultan, permaisuri, pangeran atau mereka yang digolongkan bangsawan tinggi (bawah).
(Foto: Nasrul Hamdani & Muhammad Affan)

Ruangan utama Mesjid Raya Sultan Ahmadsyah Tanjung Balai terlihat unik, selain tidak disangga pilar penopang struktur bangunan seperti pada serambi, bentuk langit-langit mesjid yang akan berusia 128 ini berbentuk segitiga sama kaki dengan dua kaki yang melengkung. Ditinjau dari dalam, lengkungan yang jadi langit-langit bangunan ini mengesankan atapnya berbentuk pelana, suatu ciri penting dalam arsitektur transisi (1890-1915).¹⁴ Namun jika melihat atap mesjid yang bersusun dua; atap paling bawah menaungi serambi sedangkan atap paling atas menjadi pelindung ruang utama, kesan 'pelana kuda' pada bagian dalam ruang utama itu tidak terlihat sama sekali. Kesan yang muncul justru model atap bersusun yang biasa diterapkan pada mesjid-mesjid lama. Pengaruh Arab, India dan Barat adalah dua kubah yang menjadi penanda ruang utama dan mihrab.

Mesjid Raya Sultan Ahmadsyah Tanjung Balai yang berlantai marmer tersusun diagonal ini memiliki sembilan pintu utama yang besarnya sama. Enam pintu berada di sebelah kiri serta kanan ruangan utama, tiga pintu lain berada di bagian depan. Hanya terdapat dua jendela besar di bagian depan pada sisi kiri-kanan ruang mihrab. Selain jendela, ventilasi berbentuk busur dengan aksesoris mata tombak, kusen dan daun pintu yang dicat hijau dominan dengan ornamen tiga kotak berbeda ukuran yang sisinya dilapisi cat warna kuning juga difungsikan sebagai ventilasi. Penerapan pintu dan jendela berukuran besar khas bangunan tropik yang dikembangkan Barat ini menjamin sirkulasi udara berjalan lancar pada mesjid yang terletak tidak jauh dari pantai dan muara sungai Asahan yang memang berhawa panas.



Gambar 15: Enam pintu di sisi kiri dan kanan, dua jendela besar di depan, di antara jendela itu terdapat mihrab bertangga.
(Foto: Nasrul Hamdani & Muhammad Affan)

Mihrab atau mimbar menjadi daya tarik penting di mesjid ini. Selain masih asli dan belum ada tambahan yang menghilangkan keaslian, ornamen pada mimbar bercungkup berdimensi panjang kira-kira dua meter, lebar satu meter dan tinggi kira-kira dua setengah meter ini merupakan representasi ornamen khas yang masih mencirikan keaslian ragam ornamen Melayu di Asahan. Ornamen bunga dan tumbuhan dipahatkan secara detil pada hampir semua bagian mimbar yang masih digunakan ini. Dominasi warna hijau dan kuning sebagai aksent membuat mimbar ini terlihat padu dengan bangunan yang dicat dengan warna serupa dengan komposisi warna yang berbeda; kuning jadi warna dominannya. Warna khas Melayu yang melambangkan kebesaran dan kehormatan raja-raja Melayu.



Gambar 16: Mihrab Mesjid Raya Sultan Ahmad Syah Tanjung Balai
(Foto: Nasrul Hamdani & Muhammad Affan)

Dua helai bendera segi empat berwarna hijau mengkilat diikatkan miring pada tiang kecil pada pilar cungkup sebelah kiri dan kanan. Bagian paling depan, yang menjadi tempat anak tangga pertama pada mimbar itu terdapat dua daun pintu kecil tempat khatib menaiki mimbar itu. Pintu yang cantik oleh ukiran bunga dan tumbuhan itu merupakan satu-satunya akses menuju tempat khatib duduk atau berdiri. Di atas 'kusen' pintu masuk ke mimbar itu terdapat 13 jenis mata senjata tajam yang merupakan beragam bilah pedang pendek, bilah parang dan mata tombak panjang. Senjata yang disusun dalam format setengah lingkaran inilah yang menjadikan mimbar itu menarik, terutama jika simbolisme atas senjata itu dikaitkan dengan kisah Sultan Ahmad Syah dari Asahan ketika berperang melawan Belanda.

Seiring bertambahnya usia Mesjid Raya Sultan Ahmad Syah, keadaan fisik mesjid inipun berubah. Perubahan yang mencolok terdapat pada lingkungan mesjid, mulai dari

kenaikan permukaan tanah, pembangunan ruko di sekelilingnya akibat pelepasan hak atas tanah milik kesultanan. Pelapisan dinding mesjid dengan keramik berwarna putih di bagian atas dan hijau pada bagian dasarnya membuat ketebalan dinding mesjid pasti bertambah. Dinding lama yang ditegakkan dengan susunan bata dan diplester semen masih dapat dilihat pada bagian atas. Penambahan demikian juga diterapkan pada lantai serambi depan yang sudah dilapisi keramik putih model kini. Tidak diketahui apakah hal ini mempengaruhi konstruksi namun bagian-bagian asli bangunan ini kian berkurang.

Perubahan lain yang kasat mata ialah, menara di atas mihrab tempat muadzin mengumandangkan adzan tidak lagi pernah digunakan. Beberapa anak tangga paling bawah pada tangga melingkar secara vertikal itu sudah tidak ada lagi. Penggunaan pengeras suara modern yang memiliki jangkauan lebih jauh telah menggantikan fungsi menara adzan itu. Selain itu penambahan atap yang mengesankan atap/koridor mesjid bersatu dengan tempat tinggal nazir mesjid membuat luas mesjid seolah-olah bertambah meskipun tidak begitu. Pada Mesjid Raya Sultan Ahmadsyah Tanjung Balai ini dapat dikatakan serambinya lebih luas dari ruang utama mesjid. Sebuah balai pertemuan - mungkin diinspirasi dari cerita tentang asal mula Tanjung Balai- yang terletak di samping kiri mesjid mengesankan hal itu.

Kisah tentang Sultan Ahmadsyah dan mesjid yang didirikannya ini telah menjadi bagian penting dari sejarah pemerintahan di kabupaten Asahan dan kota Tanjung Balai. Masing-masing pemerintah menetapkan asal-mula Asahan (dimulai paruh pertama tahun 1600-an) sebagai landasan kesejarahan daerah masing-masing dan menjadikan Perang 1865 serta reaksi perlawanan Sultan Ahmadsyah sebagai klimaks. Hal-hal yang berkaitan dengan asal-usul Asahan yang berhubungan dengan Aceh, ikatan-ikatan dengan kelompok etnik di pedalaman yang berarti pula pengislaman ditambah kisah serta sikap kepahlawanan Sultan Ahmadsyah yang dilekatkan pada Mesjid Raya Sultan Ahmadsyah Tanjung Balai membuat

mesjid -satu-satunya representasi sejarah yang disebut itu-sangat penting artinya bagi Tanjung Balai dan Asahan.

Nilai kesejarahan pada Mesjid Raya Sultan Ahmadsyah Tanjung Balai 'bertambah' pada tahun 2002. Pada tahun itu, zuriat atau keluarga bangsawan Kesultanan Negeri Asahan memindahkan sejumlah besar tulang-belulang anggota keluarga mereka yang diculik lalu dibunuh secara kejam ketika Revolusi Sosial meletus. Sisa-sisa kerangka yang digali dari sebuah tempat yang dijadikan kuburan massal di daerah yang dinamai Sungai Lendir (disebutkan berjarak satu jam perjalanan dengan perahu) itu dikuburkan kembali di halaman depan Mesjid Raya Sultan Ahmadsyah Tanjung Balai. Tidak diketahui persis berapa jumlah kerangka yang dikuburkan kembali di halaman mesjid itu tetapi kubur yang telah diberi pagar dan dua nisan berbentuk silinder sebagai penanda terletak persis di balik 'tugu' nama Mesjid Raya Sultan Ahmadsyah Tanjung Balai.

Menurut Bustamam, ada 71 korban Revolusi Sosial yang dapat dikenali dari 140 orang yang dianggap telah menjadi korban.¹⁵ Suatu jumlah yang besar dan karena itu ada reaksi yang muncul terkait dengan pemindahan sisa tulang belulang dari Sungai Lendir ke Tanjung Balai. Bagi keluarga, adat telah menguatkan pemindahan itu: 'tidak baik jika ada keluarga yang dimakamkan bukan di tanah miliknya'.¹⁶ Kekhawatiran akan 'mengingatkan orang pada kisah pahit' itu pun jadi alasan utama mengapa sejumlah kalangan menolak pemindahan itu. Terlepas dari alasan-alasan yang timbul, fungsi *commemoration* yang disandang mesjid-mesjid yang dibangun para penguasa Melayu menjadi salah satu dari sekian kemungkinan alasan mengapa ada makam di lingkungan mesjid. Dalam pandangan Islam, *ziyarah* kubur bukanlah sekedar ritual tetapi lebih kepada mengingatkan yang orang yang masih hidup pada kematian.



Gambar 17: 'Tugu' nama Mesjid Raya Sultan Ahmadsyah Tanjung Balai. Di belakangnya terdapat makam korban Revolusi Sosial yang dipindahkan dari Sungai Lendir (atas) Makam korban revolusi Sosial (bawah)
(Foto: Nasrul Hamdani & Muhammad Affan)

Mengenai proses pembangunan disusul penamaan Mesjid Raya Sultan Ahmadsyah Tanjung Balai seperti yang telah dibahas di atas, Kabupaten Asahan juga memiliki mesjid lain yang dipandang sebagai penanda awal sejarah Kesultanan Negeri Asahan. Begitupun, mesjid kecil yang sesungguhnya tidak memiliki nama resmi ini tidak berasal dari awal abad ke-17 ketika keberadaan Asahan diketahui. Mesjid yang terletak persisi di tepi sungai pada ujung jalan Pekan Pulau Rakyat ini baru dibangun kira-kira tiga abad sesudah keberadaan Asahan diketahui. Tengku Musa, seorang bangsawan Asahan tercatat sebagai tokoh yang membangun mesjid itu pada tahun 1900 sebagai bentuk penghormatan kepada Sultan Asahan I, Abdul Jalil Rahmatsyah dan ibundanya Siti Ungu Putri Berinai.

Mesjid yang dibangun Tengku Musa agaknya lebih dikhususkan untuk peziarah yang hendak mengunjungi dua makam itu. Aktivitas ziarah ini masih terus berlangsung meskipun kekerapan orang yang datang ke mesjid yang lebih dikenal masyarakat dengan nama Mesjid Siti Unai itu tidak lagi pernah seramai seperti pada tahun 1970-an sampai awal 1990-an. Pada tahun itu, disebutkan sejumlah pejabat pemerintah atau pejabat teras perusahaan perkebunan di (dahulu Kota Administratif) Tanjung Balai dan/atau Kabupaten Asahan disebutkan sering mengunjungi untuk sekedar berkunjung untuk berziarah secara simbolik, meniatkan diri untuk bernazar hingga menunaikan hajat. Kemunduran mesjid di tepi Sungai Asahan yang kini bisa dibilang hancur terjadi sesudah reformasi bergulir.

Pamor mesjid semi-permanen yang menandai makam Siti Ungu Putri Berinai dan putranya Sultan Abdul Jalil Rahmatsyah ini semakin pudar ketika sebuah mesjid baru didirikan di sebelahnya. Mesjid baru yang dibangun tahun 1980-an itu dinamai Mesjid Jami' Puluraja. Penamaan ini menyebabkan mesjid lama di sebelahnya pun disebut dengan nama mesjid baru itu meskipun sejumlah orang masih menyebutnya Mesjid Siti Unai. Mesjid baru dengan sebuah menara yang pendiriannya turut disumbang/dibantu sejumlah bantuan pejabat pemerintah dan pejabat perusahaan perkebunan ini 'mengambilalih' fungsi

Mesjid Siti Unai sehingga mesjid kayu itu terlantar, tidak lagi dirawat, dijadikan gudang bahkan salah satu sudut mesjid itu tampak terisi pasir yang menjadi penanda sarang semut dan/atau rayap.

Pembangunan mesjid baru dan kerusakan pada mesjid lama ini mempengaruhi nilai sejarah, sosial dan budaya dua makam yang masih dianggap keramat oleh masyarakat di sekitar mesjid. Seperti mesjid yang menandai makam dua sosok paling penting dalam sejarah Asahan ini, makam Siti Ungu Putri Berinai dan putranya Sultan Abdul Jalil Rahmatsyah kini bukan saja terancam kehilangan nilainya tetapi juga terancam hilang oleh pengerusan tanah oleh aliran air (abrasi) sungai Asahan. Makam Siti Ungu disebutkan pernah direnovasi awal tahun 2000 oleh isteri Walikota Tanjung Balai,¹⁷ namun perbaikan itu lebih pada usaha monumentasi makam Siti Ungu saja; membangun pagar sebagai penanda makam dan pemasangan nisan sehingga tetap tidak dapat menghindari ancaman pengerusan.

Dari segi arsitektural, mesjid lama itu masih menunjukkan bentuk awalnya karena belum pernah direnovasi berarti. Lantai semennya yang sudah melesak dibangun lebih tinggi dari permukaan tanah, memiliki atap dua susun dengan kubah kecil sebagai puncaknya. Mesjid berdinding papan ini memiliki serambi depan berpagar kayu yang cukup luas untuk sebuah mesjid kecil. Kusen, pintu dan daun jendela dihiasi ornamen susun sisir yang sederhana, fungsional namun menunjukkan ciri bangunan Melayu yang kental. Mesjid yang memiliki tiga pintu masuk utama dan tujuh jendela ini memiliki bagian mihrab persegi yang menjorok keluar ke arah sungai. Pada ruang mihrab inilah jendela ketujuh yang ukurannya lebih kecil ditempatkan asimetris agak ke pinggir/sudut dinding untuk mengalirkan udara dari luar ke bagian dalam ruang mihrab berukuran kira-kira dua meter persegi.



Gambar 18: Pagar makam Siti Ungu Putri Berinai yang berada di tubir tebing tanah di belakang Mesjid Jami' Puluraja (mesjid baru) terlihat dari kejauhan.
(Foto: Nasrul Hamdani & Muhammad Affan)



Gambar 19: Makam Sultan Abdul Jalil Rahmatsyah terletak persis di belakang mesjid lama.
(Foto: Nasrul Hamdani & Muhammad Affan)



Gambar 20: Keadaan mesjid lama atau kini disebut juga Mesjid Jami' Pulau Rakyat (Pulu Raja) pada 30 Juni 2011
(Foto: Nasrul Hamdani & Muhammad Affan)



Gambar 21: Mesjid Raya Tanjung Pasir, Kualuh Selatan - Labuhan Batu Utara
(Foto: Nasrul Hamdani & Muhammad Affan)

MESJID RAYA TANJUNG PASIR, KUALUH: 'MONUMEN' UNTUK YANG DIPERTUAN KUALUH TERAKHIR

Terletak di pinggir jalan kabupaten yang menghubungkan Aek Kanopan ibukota Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan Leidong, daerah penghasil beras bermutu tinggi dan terbesar di Sumatera Timur sejak masa lalu tidak membuat Mesjid Raya Tanjung Pasir mudah dijangkau. Perlu waktu lebih dari satu jam untuk mencapai mesjid ini terhitung dari ruas Jalan Lintas Timur Sumatera. Kondisi jalan yang sempit, berlubang atau belum beraspal pada beberapa bagian, lalu lintas truk-truk beroda enam pengangkut sawit dari dan ke beberapa titik

pengumpulan sawit di Kualuh ditambah kumpulan lembu yang digembalakan lepas sedikit banyak memperlambat perjalanan menuju mesjid berkubah besar yang dibangun Sultan atau Yang Dipertuan Kualuh terakhir, Tengku Muhammadsyah.

Mesjid Raya Tanjung Pasir, Kualuh ini, terletak kira-kira 100 meter agak menjauh dari jalan raya yang menghubungkan pekan Tanjung Pasir dengan Tanjung Leidong. Rimbunan daun kelapa sawit di sisi kiri dan kanan jalan kadang menutup pandangan orang sehingga agak sukar menentukan titik orientasi mesjid lama yang mulai dibangun tahun 1932 itu. Mesjid yang menjadi satu-satunya peninggalan Kesultanan Kualuh itu pun tegak sendiri di tengah rimbunan sawit karena selain rumah semi-permanen yang ditempati penjaga mesjid di sudut kompleks, tidak ada bangunan lain yang berdiri di kompleks mesjid yang luas itu. Pagar terluar mesjid agaknya menjadi penanda batas-batas kompleks mesjid lama itu di masa lalu.

Tanjung Pasir tidak seperti bandar yang ramai seperti Aek Kanopan atau Aek Nabara di sebelah Barat dan Timur Laut. Bandar atau lebih tepat disebut pekan kecil yang menjadi ibukota Kesultanan Kualuh ini tergolong jauh dari Rantau Prapat ibukota *onderafdeeling* Labuhan Batu apalagi Tanjung Balai, pusat kekuasaan Asahan yang memiliki ikatan sejarah dan genealogis dengan Kualuh. Begitupun sebagai bandar yang terhubung dengan (Tanjung) Leidong serta kampung-kampung di sepanjang sungai Kualuh dan pesisir, kedudukan Tanjung Pasir menjadi penting. Beras dari Leidong berikut aktivitas ekonomi yang timbul dari perdagangan komoditas unggulan dari Kualuh itu merupakan kunci untuk memahami perkembangan Tanjung Pasir sebagai ibukota Kesultanan Negeri Kualuh.

Berdasarkan cerita, negeri Kualuh lahir dari kesepakatan politik antara Sultan Asahan VIII, Muhammad Husinsyah dengan sepupunya Raja Muhammad Ishak untuk mengakhiri perseteruan di antara mereka yang telah berlangsung sejak Sultan Alisyah mangkat (1813). Dua bangsawan Asahan yang masing-masing mengaku sebagai Sultan Asahan VIII yang sah,

sepakat menyerang Kualuh. Jika negeri itu dapat ditaklukkan maka akan diserahkan kepada Raja Muhammad Ishak sebagai daerah kekuasaannya dan melepaskan tuntutan atas tahta Asahan. Dalam penyerangan itu, laskar Sultan Husinsyah menyerang Kualuh dari kuala sungai Kualuh sedangkan laskar Raja Muhammad Ishak menyerang dari hulu sungai Kualuh.¹⁸ Negeri yang masyarakatnya disebutkan belum menganut Islam¹⁹ atau dalam konsepsi Melayu disebut Batak, jatuh dalam waktu yang singkat

Kejatuhan Kualuh lama itu berhasil mengakhiri perseteruan di Asahan. Tahun 1829, tahun ketika Kualuh dikuasai Asahan, Raja Muhammad Ishak dinobatkan sebagai Yang Dipertuan Muda Kualuh atau Raja Kualuh I yang kemudian mengislamkan penduduk di daerah-daerah yang dikuasainya, sepanjang sungai Kualuh dan pantai sekitarnya. Daerah kekuasaan ayah Tengku Abdullah Ni'matullah Syah ini meliputi kampung-kampung termasuk wilayah sungai dan pantai di Kualuh masa kini. Belum ditemukan keterangan tentang keadaan Kualuh pra-Islam atau sebelum penyerangan itu namun asal kata 'Kualuh' yang disebutkan berasal dari kata *walu* (berarti sembilan dalam bahasa Batak atau diceritakan juga bahwa sungai Kualuh yang mengalir dari wilayah Padang Lawas kini dan bermuara di selat Melaka terbentuk dari sembilan aliran anak sungai di pedalaman)²⁰ dapat menjadi permulaan untuk menelusuri jejak Kualuh sebelum 1829.

Kisah tentang asal mula Kualuh (Islam) itu meskipun tidak terkait secara langsung, selalu muncul ketika warga emas Tanjung Pasir mengingat Yang Dipertuan Kualuh terakhir, Tengku al-Haji Muhammadsyah (selanjutnya disebut Tengku Muhammadsyah). Dalam kenangan itu, warga tidak pernah mempersoalkan gelar resmi yang seharusnya disebut/disandang ketika harus menyebutkan nama Tengku Muhammadsyah, apakah disebut 'Raja', 'Sultan' atau 'Yang Dipertuan Kualuh' namun kebanyakan warga menyebutnya dengan Raja Kualuh saja. Tentang asal mula Kualuh ini, selain berhubungan dengan serangan Asahan pada 1829 juga terkait dengan migrasi orang

dari pedalaman Padang Lawas dan Angkola ke Kualuh melalui sungai yang kemudian dikenal sebagai orang Batak Melayu.

Masyarakat Batak Melayu di Pantai Timur Sumatera terbiasa memulai cerita dengan mencari hubungan dan asal-usul orang yang baru kenal atau diperbincangkan. Warga Tanjung Pasir pun demikian. Kisah tentang Tengku Muhammadsyah pun selalu dikaitkan dengan asal-usulnya generasi di atasnya. Kakek Muhammadsyah, Raja Muhammad Ishak semasa muda dikenal sebagai seorang pengembara 'sakti' dari pedalaman Padang Lawas dan Angkola yang selalu mencari lawan tanding untuk menguji kemampuan ragawi dan ilmu batinnya di manapun tempat yang disinggahinya. Kesaktian Raja Muhammad Ishak membawanya masuk ke lingkaran kekuasaan Asahan hingga meletusnya perang saudara akibat saling klaim tahta Asahan antara dua sosok terkemuka di negeri itu sesudah Sultan Alisyah mangkat.

Seperti kakeknya, Yang Dipertuan Kualuh Tengku Muhammadsyah mewarisi sifat-sifat moyangnya. Tengku Muhammadsyah menerima jabatan Yang Dipertuan Kualuh dalam usia belia sesudah sang ayah mangkat (1882) tidak lama setelah kembali menetap di Kualuh pasca kisruh di Asahan. Jabatan itu tidak menghalangi Tengku Muhammadsyah untuk mengembara dan menjelajahi daerah-daerah untuk berguru dan menuntut ilmu batin. Periode inilah yang membentuk kepribadiannya yang keras dan kemapanan ilmu batin yang membuat Tengku Muhammadsyah dari Kualuh ini tetap dikenang kawulanya hingga kini

Dari silsilah yang diketahui masyarakat Batak Melayu yang kemudian menjadi atau mengaku Melayu, Tengku Muhammadsyah disebutkan memiliki marga (*fam*) Dalimunte. Yang Dipertuan Kualuh terakhir ini tidak menggunakan *fam* itu secara resmi namun secara sosiologis hampir semua kawula di wilayah kekuasaan Kualuh mengetahui bahwa raja mereka bermarga Dalimunte dan memiliki ikatan kultural dengan daerah 'Batak' di pedalaman Padang Lawas dan Angkola. Pengakuan bahwa dirinya memiliki garis keturunan Dalimunte biasanya

digunakan untuk sejumlah kepentingan antara lain menarik garis keturunan secara vertikal, menegaskan misi budaya sebagai perantau, menjalin persekutuan terutama untuk memperkuat kedudukan sosial, ekonomi maupun politik dengan masyarakat Batak Melayu dan masyarakat Batak di pedalaman.²¹

Kecenderungan yang dilakukan kelompok 'Batak Melayu' di atas lazim berlangsung untuk menguatkan ikatan-ikatan dengan daerah asal. Hampir seluruh Sultan Melayu memperistri putri dari raja-raja Batak di pedalaman untuk memperkuat ikatan politik dan sejarah. Pengakuan diri sebagai orang Melayu lebih ditujukan untuk menegaskan identitas keislaman dan ikatan-ikatan politik semacam pertuanan dengan/dan penguasa dominan di kawasan itu (berturut-turut dengan Aceh, Portugis, Inggris lalu Belanda). Satu ungkapan yang populer di Negeri Sembilan negeri yang identik dengan Minangkabau di Semenanjung Malaya, yaitu 'Bertuan ke Johor, Bertali ke Siak, Beraja ke Minangkabau' cukup tepat untuk menggambarkan konsep pertuanan Melayu sehingga entitas dan identitas politik berkembang sebagai entitas sekaligus identitas kawasan.

Selain itu, mengaku Melayu juga merupakan manifestasi langsung pengamalan adat resam Melayu, yaitu beragama Islam dan (salah satu yang terpenting) berbahasa Melayu. Bahasa Melayu yang menjadi *lingua franca* di Asia Tenggara menguatkan alasan mengapa 'Batak masuk Jawi' (Melayu). Alasan lain ialah, perbedaan Melayu dari Batak secara sosial, politik, kultural bahkan stereotipik membuat orang Batak yang merantau ke daerah pesisir Timur yang subur mau tidak mau harus menganut Islam, mengaku sebagai hamba Melayu, menanggalkan marga sekaligus memakai/mengganti nama dengan nama-nama penganut Islam.²² Pengakuan ini merupakan satu-satunya jalan sekaligus cara paling mudah untuk memperoleh hak-hak ekonomi (terutama hak atas tanah) yang dimiliki kawula sultan. Kisah tentang 'kesaktian' Tengku Muhammadsyah dan bentuk-bentuk adaptasi Batak Melayu di Kuala Lumpur melekat pada Mesjid Raya Tanjung Pagar yang dibangunnya tahun 1932. Cerita tentang seorang tukang Tionghoa yang jatuh tergelincir dari

kerangka kubah lalu mati ketika pembangunan mesjid hampir rampung dikaitkan dengan kesaktian Yang Dipertuan Kualuh itu. Kematian tukang Tionghoa itu jadi perbincangan luas di Kualuh namun tidak pernah ada penjelasan mengenai kecelakaan ini sekalipun jika memang benar hal itu kecelakaan adanya. Masyarakat yang terlanjur 'takut' untuk menyebut segan cenderung merekonstruksi sendiri peristiwa itu untuk kemudian dihubungkan dengan tuntutan ilmu sakti yang dimiliki sang raja.



Gambar 22: Yang Dipertuan Kualuh, Tengku Muhammadsyah (tengah) bersama Pemangku Jabatan Sultan Saibun dari Asahan (Regent van Asahan), Tengku Alang Yahya (kiri) dan Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah (paling kanan)
(Foto: Yayasan Kesultanan Serdang - Medan)

Yang Dipertuan Kualuh ini dikenang pula memiliki sifat keras hingga lebih banyak kawulanya yang 'takut' kepadanya. Saking takutnya, semua orang (terutama warga kebanyakan) akan memilih menghindar jika melihat atau akan berpapasan dengan Yang Dipertuan Kualuh ini. Dalam acara-acara kerajaan, warga dipastikan akan menunduk dalam ketika berhadapan sang

raja. Mereka yang berani melihat rupa sang raja disebut akan mendapatkan bala.²³ Begitupun Raja Kualuh itu dikenang, Tengku Muhammadsyah juga memiliki sifat-sifat terpuji. Raja yang membangun istananya di Kampung Dalam ini dikenal pula sebagai raja ringan tangan. Berbagai bentuk bantuan yang diberikannya kepada kawulanya -terlepas dari karena yang memberi itu ialah raja- masih jadi pembicaraan hingga kini.

Terlepas pula dari kisah-kisah yang dihubungkan dengan kesaktian sang raja dan 'ketakutan' kawula terhadap rajanya, pembangunan Mesjid Raya Tanjung Pasir merupakan bagian penting dari perkembangan masyarakat Batak Melayu di Pantai Timur Sumatera. Dibangun tidak jauh dari sungai Kualuh di Tanjung Pasir yang menjadi jalur tradisional perantau dari hulu serta ruas jalan darat yang menghubungkan Kualuh dengan bandar-bandar penting membuat mesjid ini penting artinya bagi pelintas. Sejumlah kelompok tarekat yang dianggap tidak populer di daerah ini pernah memanfaatkan keberadaan mesjid ini namun karena beberapa pertimbangan, Tengku Muhammadsyah akhirnya mendirikan persulukan sederhana yang terletak agak jauh dari mesjid yang memiliki kubah paling besar di antara mesjid-mesjid yang kami petakan.

Pembangunan Mesjid Raya Tanjung Pasir disebutkan tuntas dalam waktu satu tahun tepat namun tidak ada penanda yang dapat dijadikan patokan. Demikian pula dengan warga, tidak ada yang mengingat secara pasti kapan pembangunan mesjid itu bermula dan berakhir. Sejumlah warga masyarakat hanya mengingat mesjid yang seluruhnya bercat hijau kombinasi dengan varian hijau lain mulai dibangun pada hari Jum'at tahun 1932. Peresmian mesjid ini ditandainya dengan dua momentum yang masih diingat masyarakat sampai kini. Dua momentum itu ialah perayaan hari ulang tahun emas Tengku Muhammadsyah yang dirayakan secara besar-besaran di Istana Kualuh pada Kamis malam Jum'at tahun 1933 disusul Sholat Jumat keesokan harinya sebagai tanda rampungnya mesjid berkubah besar yang bahan dari logam mengkilap.

Hari ulang tahun Tengku Muhammadsyah yang dirayakan meriah di Istana Kualuh itu masih diingat dan diceritakan sampai kini. Menurut warga, ulang tahun Yang Dipertuan Kualuh ke-70 atau ke-75 (*sic*) itu dihadiri para bangsawan dari seluruh kerajaan di Sumatera Timur termasuk Orang Besar Kualuh. Dihadiri juga oleh pegawai pemerintah (Tuan Kontelir, asisten dari Rantau Prapat) serta tuan kebun Belanda yang mengenakan jas. Warga Tanjung Pasir dan kampung-kampung di sekitarnya pun diperkenankan untuk menghadiri perayaan itu. Selain menikmati jamuan makan malam, acara yang berlangsung malam hari itu dimeriahkan oleh pertunjukan musik yang dimainkan kelompok Orkes Melayu dari Medan.²⁴

Sekalipun ada cerita miring tentang acara dansa dalam perayaan ulang tahun Tengku Muhammadsyah itu, ulang tahun Yang Dipertuan Kualuh pada salah satu hari Jum'at dari 52 hari Jum'at yang ada dalam setahun pada 1933 itu merupakan penanda penting untuk merekonstruksi usia, keberadaan serta perkembangan fungsi mesjid. Selain itu, penandaan dengan peristiwa yang terjadi pada tahun itu sedikit-banyak dapat menjelaskan apakah ada peristiwa lain yang melatarbelakangi pembangunan mesjid itu. Apakah Yang Dipertuan Kualuh memiliki kepentingan sendiri atas dua peresmian itu terutama jika hal itu dikaitkan dengan ketegangan antara pemerintah kolonial dengan para penguasa *zelfbestuur* (para sultan dan raja-raja) yang memanas sejak tahun 1928 hingga akhir tahun 1930-an.

Ketegangan itu menjadi salah satu alasan timbulnya keberatan para raja yang disampaikan secara terbuka kepada Gubernur Jenderal di Batavia. Pendirian *Syarikat-ul-Mulk* (Persatuan Raja-raja) yang digagas Sultan Sulaiman dari Serdang untuk mempersatukan para penguasa tradisional di Sumatera Timur terkait dengan ketegangan ini. Bersama Sultan Sulaiman dari Serdang dan *Regent van Asahan*, Tengku Alang Yahya dan Tengku Muhammadsyah, tiga raja berusia lanjut yang digolongkan sebagai penguasa yang susah diatur. Anthony Reid

menggambarkan posisi ketiga raja senior di mata pemerintah kolonial dan tingkat ketergantungan negeri yang usia rajanya masih muda dengan sebuah ungkapan 'semakin muda usia raja semakin besar tingkat ketergantungannya' (pada Belanda).²⁵

Dengan menggunakan ungkapan sejarahwan asal Selandia Baru itu, dapat dipahami mengapa raja-raja senior di Sumatera Timur terkesan 'menakutkan' atau 'ditakuti' bahkan oleh kawulanya. Tengku Muhammadsyah, selain karena cerita tentang kesaktiannya Raja Kualuh ini dikenal tidak peduli dengan saran atau tuntutan kontelir yang dinilainya terlalu banyak mengatur. Yang Dipertuan Kualuh ini merupakan satu-satunya 'raja kecil' yang mengatur 36.000 penduduk yang memperoleh hak-hak istimewa akibat kontrak politik seperti halnya Langkat, Deli, Serdang, Asahan dan Siak. Hal ini, menurut Reid terjadi karena faktor sejarah Kualuh yang telah diurai dan sikap Yang Dipertuan Kualuh itu sendiri. Tengku Muhammadsyah disebut bersikap keras dan gigih karena usianya yang panjang. Tahun 1930-an sikap bandel dan megah dari Yang Dipertuan Kualuh ini menjadi sumber-sumber ketegangan baru dengan Belanda.²⁶

Secara ekonomi, Yang Dipertuan Kualuh juga seperti raja-raja lain yang terikat kontrak politik yang 'dipandang menyimpang' itu karena berbeda dengan kerajaan Langkat yang dipimpin menantunya, kekuasaan dan pengaruh Kualuh dipandang kecil. Hal ini menjadi pertanda bahwa kontrak politik yang memaksa para raja menggadaikan kedaulatannya itu dapat dinegosiasiasikan secara terbuka. Ekonomi Kualuh memang bergantung pada tunjangan tahunan namun hal itu tidak menghalangi raja tua ini untuk menuntut hal-hal lain yang tidak ditentukan dalam perjanjian. Hal atau tuntutan ini disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya bertambahnya kewajiban raja atas rakyatnya menyusul perkembangan industri perkebunan yang membuat kawula menjadi gamang, di samping perubahan gaya hidup.

Cerita tragis tentang Yang Dipertuan Kualuh, Tengku Muhammadsyah terjadi kurang dari setahun setelah Indonesia

merdeka. Peristiwa yang selalu disebut *what so-called Social Revolution* itu menghancurkan segala hal yang berkaitan dengan kerajaan tetapi tidak dapat menghapus kenangan orang akan sosok dan kesaktian Tengku Muhammadsyah. Dalam peristiwa yang berlangsung serentak 3-6 Maret 1946, Tengku Muhammadsyah yang sudah renta diseret dari Istana Kampung Tengah bersama sejumlah sanak keluarganya untuk dieksekusi di sebuah lubang besar di tepi sungai Kualuh. Di tempat itu, Raja Kualuh terakhir itu sempat marah ketika menyaksikan sejumlah sanak keluarganya dibunuh secara kejam lalu dikuburkan tanpa penghormatan.

Di penghujung hidupnya diceritakan, peluru yang ditembakkan dari senjata api serta tusukan-tusukan senjata tajam tidak mampu menggores kulitnya. Para penculik yang kehabisan akal berencana untuk membakar Yang Dipertuan Kualuh hidup-hidup namun urung dilaksanakan setelah Tengku Muhammadsyah menanyakan alasan laskar yang menjarah istana Kualuh lalu menyeret penghuni untuk dibunuh. Sesudah dijawab sekenanya, Raja Kualuh ini menyatakan jika laskar itu ingin menghabisi nyawanya maka senjata yang bisa menembus kulit Tengku Muhammadsyah ialah sebilah keris yang tersimpan dalam lemari di bilik istana. Kers itulah yang mengakhiri hidup Yang Dipertuan Kualuh, Tengku Muhammadsyah.²⁷

Dalam keterangan lain disebutkan, keadaan Yang Dipertuan Kualuh Tengku Muhammadsyah ketika Revolusi Sosial berkecamuk dituliskan 'telah ditemukan oleh sekelompok pemuda dalam keadaan sekarat karena tusukan-tusukan tombak di pekuburan Tionghoa. Raja Kualuh itu kemudian dibawa ke rumah sakit namun setelah kejadian itu tidak diketahui lagi keadaan dan nasibnya'.²⁸ Lokasi pekuburan yang dimaksud tidak disebutkan, mungkin di antara Tanjung Pasir, Tanjung Leidong atau Aek Kanopan. Sang Raja Kualuh ini mungkin sempat dianiaya di lubang tempat sejumlah keluarganya dieksekusi kemudian dalam keadaan terluka parah dibawa oleh unit-unit *Persatoean Perdjoangan* ke suatu tempat untuk dieksekusi secara

terbuka atau dirawat karena masih hidup meskipun sudah terluka parah.

Rentetan kisah Yang Dipertuan Kualuh Tengku Muhammadsyah ini melekat erat pada Mesjid Raya Tanjung Pasir. Tidak ada kisah tokoh lain yang dapat menggeser kisah tentang Tengku Muhammadsyah. Kisah sosok Raja Kualuh terakhir ini telah bertahan lebih dari seabad sehingga hampir tidak ada kemungkinan menyisipkan kisah lain yang tidak berhubungan dengan sosok penguasa Kualuh ini. Segala hal yang terjadi di mesjid ini bahkan segala hal yang terjadi pada orang-orang yang terlibat dalam 'pembunuhan' Yang Dipertuan Kualuh berikutan masalah yang dialami keturunannya kini umumnya selalu dikaitkan dengan Tengku Muhammadsyah. Adat Melayu menggariskan aturan penting bahwa pantang bagi kawula untuk mendurhakai raja. Jika kawula *derhaka* terjadi maka kesulitan akan menimpa di seumur hidupnya.

Mesjid Raya Tanjung Pasir yang permukaan lantainya dinaikkan hingga setinggi kira-kira setengah meter dari permukaan tanah dikerjakan oleh 38 tukang Tionghoa sebelum salah satu di antara mereka tewas akibat tergelincir dari atap. Sejumlah tukang kayu dan batu bumiputera dari Kualuh dan sekitarnya disebutkan turut pula berperan membangun mesjid berukuran besar ini. Tidak banyak keterangan yang bersifat teknis mengenai proses perencanaan, pembangunan dan pemanfaatan mesjid ini di masa lalu selain untuk ibadah sholat, hari raya dan perayaan hari besar di mana sang raja selalu hadir. Namun jika menilai bentuk, ukuran, kenangan dan perlakuan masyarakat, mesjid ini memiliki kedudukan istimewa bagi Yang Dipertuan Kualuh serta masyarakat di sekitarnya.

Mesjid Raya Tanjung Pasir memiliki kubah dan penopang yang juga bersegi delapan atau oktagon. Bentuk oktagon ini terlihat jelas di ruang utama. Pilar penopang berbentuk oktagon ini menguatkan ciri bangunan dari masa kolonial yang ditandai dengan kolom-kolom besar yang dibangun dengan susunan bata masif hingga terlihat tebal dan besar. Sistem penghawaan mesjid ini sangat baik berkat peninggian langit-

langit, banyaknya jumlah bukaan atau ventilasi yang berpengaruh pada pencahayaan. Selain itu, bagian luar kubah yang berlapis bahan logam dan akan panas di siang hari, bagian dalam kubah dilapisi semacam panel-panel kayu berwarna gelap yang disusun seperti susunan sirap dengan fungsi utama untuk meredam hawa panas dari luar. Ini membuat sirkulasi udara selalu mengalir.

Sebuah menara adzan setinggi kira-kira 12 meter menjadi penanda Mesjid Raya Tanjung Pasir, Kualuh. Jika mengamati empat bangunan yang menjorok keluar pada keempat sudut serambi agaknya mesjid dirancang untuk memiliki empat menara. Sebuah menara yang berada di sebelah kiri pintu masuk utama memiliki konstruksi yang sama dengan tiga bangunan lain di tiap sudut serambi. Alasan lain yang menguatkan dugaan itu ialah denah mesjid ini berbentuk bujur sangkar sehingga empat menara atau penambahan lain harus mempertimbangkan bentuk/keadaan bangunan yang simetris. Mungkin atas pertimbangan biaya dan kegunaan hanya satu menara yang dibangun sedangkan tiga penopang menara lainnya menjadi 'ruang tangkapan angin' yang tidak diketahui difungsikan untuk apa.

Bagian yang unik terdapat pada mihrab yang menjadi acuan arah kiblat. Ruangan tempat imam ini menjorok keluar dengan penampang setengah potongan peluru yang seolah-olah menempel pada bangunan persegi yang merupakan ruangan untuk mimbar yang juga dicat hijau. Dari dalam bentuk membulat mihrab ini tidak terlihat jelas karena terhalang lengkungan yang mengesankan menjadi bagian dari konstruksi kotak di antara tempat mimbar dengan mihrab. Kesan simetris terlihat jelas dari sisi Barat bangunan ini. Mihrab membulat yang menjorok keluar seperti model *kuncungan* yang jadi titik tengah penampang bangunan dari sudut ini. Dua ruangan tangkapan angin di pojok serambi yang beratap limas dengan banyak ventilasi berbentuk segitiga unik menjadi sudut orientasinya.



Gambar 23: Bagian dalam Mesjid Raya Tanjung Pasir yang menunjukkan arah kiblat dan tempat mimbar (atas) Bagian luar mihrab, tampak bangunan dengan penampang peluruh yang dijadikan ruang mihrab (bawah)
(Foto: Nasrul Hamdani & Muhammad Affan)

Kondisi Mesjid Raya Tanjung Pasir masih seperti sediakala. Selain penambahan tempat wudhu, pelapisan lantai dan sepertiga bagian dinding terbawah dengan keramik, semuanya masih asli. Demikian juga dengan mihrab kecil membulat dengan lubang-lubang angin yang unik. Juga Mimbar kayu bertingkat untuk khatib, daun pintu dan jendela yang diberi aksesoris kaca buram segitiga disebutkan masih seperti dahulu. Perubahan dalam skala terbatas terjadi karena pengecatan ulang dan penambahan lantai batu pada halaman mesjid. Pemasangan kipas angin serta sejumlah benda yang menggantung di dinding, mulai dari jam dinding, struktur organisasi mesjid hingga papan tulis menambah 'ramai' dinding ruang utama mesjid.

Bagian lain yang hampir tidak berubah ialah areal pemakaman. Jika dibandingkan dengan mesjid-mesjid lama di sepanjang Jalan Lintas Timur Sumatera, jumlah makam di kompleks Mesjid Raya Tanjung Pasir ini terbilang sedikit. Berdasarkan pengamatan kami, jumlah makam yang terletak di depan mihrab berbentuk peluru tidak lebih dari 100 bahkan kurang padahal kalau menilik bentuk nisan-nisannya yang silindris yang dibuat dari batu pasir, kompleks pemakaman itu setidaknya-tidaknya sudah ada pada akhir abad ke-19. Terdapat dua makam yang diberi cungkup sederhana, beratap seng yang sudah berkarat, salah satu makam yang berpagar tampak sudah lapuk. Masyarakat menyebut makam itu dengan sebutan seadanya: Kuburan Raja!

Mesjid yang masih dimanfaatkan oleh masyarakat Tanjung pasir untuk kegiatan ibadah dan Perayaan hari Besar Islam (PHBI) masih terpelihara dengan baik. Jika merujuk pada struktur BKM Raya Tanjung Pasir yang diemban 40 orang maka aktivitas peribadahan dan kegiatan sosial di lingkungan mesjid ini tergolong baik. Shalat Idul Fitri, Idul Adha dan pemotongan hewan qurban yang terus menerus bertambah menjadi indikator lain bagaimana mesjid yang lekat dengan nama Yang Dipertuan Kualuh Tengku Muhammadsyah serta aksi massa dalam revolusi sosial yang menghabisi Raja Kualuh ini dapat bertahan tanpa tersandung permasalahan sejarah.



Gambar 24: Mesjid Raya Nurul Yaqin Guntung Saga, Kuala Lumpur Selatan - Labuhan Batu Utara.
(Foto: Nasrul Hamdani & Muhammad Affan)

MESJID RAYA NURUL YAQIN GUNTING SAGA: 'MESJID UMAT' DI TEPI SUNGAI KUALUH

Terletak persis di tepi sungai Kualuh yang lebar di pinggir jalan Lintas Timur Sumatera di Guntung Saga, membuat Mesjid Raya Nurul Yaqin, jadi titik orientasi penting di Kecamatan Kualuh Selatan. Mesjid berbentuk kotak dengan lima kubah kecil berwarna perak mengkilap, direnovasi pada tahun 1995 atas bantuan H.A. Moeis, pemilik P.T. Moeis yang membuka dan memiliki sejumlah areal perkebunan sawit di Labuhan Batu sekitarnya. Bupati Labuhan Batu masa itu, H.B. Ispensyah Rambe didaulat meresmikan mesjid yang terletak antara dua atau tiga meter di bawah permukaan jalan dan dua atau tiga meter dari permukaan air sungai Kualuh yang cokelat akibat penambangan pasir.

Mesjid Raya Nurul Yaqin Gunting Saga disebutkan sudah ada sejak masa kolonial meskipun tidak ada pernyataan yang menyebutkan secara pasti waktu keberadaannya.²⁹ Sebagai pembanding, sejumlah warga emas Gunting Saga yang ditemui di pemukiman sekitar hanya menyebut 'mesjid ini sudah ada sejak saya masih kecil' atau (mesjid ini) 'sudah ada sejak jaman *ompung* (kakek) kami'. Warga pun demikian, sejauh penelusuran kami tidak ada yang menyebut waktu pembangunan mesjid itu. Hal yang paling diingat warga ialah, ketika Bupati Labuhan Batu meresmikan mesjid yang biaya renovasinya ditanggung oleh seorang pengusaha perkebunan. Momentum itu diabadikan pada sebuah prasasti marmer yang ditanamkan pada dinding luar mesjid yang mungkin baru disebut 'raya' sesudah direnovasi.

Hal-hal yang berkaitan dengan keadaan mesjid sebelum renovasi tidak begitu banyak diceritakan, hanya disebutkan '(mesjid lama) tak sebagus (mesjid) sekarang'. Jika merujuk pada perluasan wilayah kolonial di Pantai Timur Sumatera sejak 1858 (Penaklukan Siak) yang berlanjut 1865 (Penaklukan Asahan dan Serdang) maka kemungkinan mesjid ini baru ada sesudah 1865 ini atau jauh sesudah itu. Kemungkinan dapat dikaitkan dengan situasi politik yang memanas antara Asahan dengan Kualuh-Leidong antara 1822-1882. Namun jika merujuk pada pola dalam arus migrasi orang-orang Batak dari pedalaman Tapanuli Utara maka keberadaan mesjid yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat pendatang maka mesjid ini diperkirakan baru ada/diketahui pada paruh pertama abad ke-20, antara mulai tahun 1900-an hingga 30 tahun sesudah itu.

Di masa lalu, mesjid ini hanyalah sebuah surau kecil semi-permanen. Berdasarkan kenangan sejumlah warga emas disebutkan bahwa dahulu surau ini dibangun sederhana dengan atap bertingkat tanpa kubah. Surau kecil ini dibangun sebagai tempat persinggahan oleh para pendatang Batak yang telah memeluk Islam. Karena diperuntukkan sebagai tempat persinggahan bagi para pelintas sungai Kualuh, surau itu terkesan dibangun sederhana untuk fungsi-fungsi dasar (shalat dan istirahat). Stabilitas politik dan pertumbuhan penduduk

menggeser fungsi tempat persinggahan di daerah yang kemudian dinamai Gunting Saga menjadi pemukiman permanen bagi para pelintas sungai Kualuh yang disebut atau menyebut diri sebagai Batak Melayu. Kelompok inilah yang menjadi kelompok yang mengembangkan areal persawahan di Asahan dan Labuhan Batu.

Mesjid yang kini terlihat megah dengan dinding berlapis susunan panel-panel marmer putih ini merupakan pangkal sejarah kampung Gunting Saga sekarang ini. Oleh karena itu bukan tanpa dasar jika Mesjid Raya Nurul Yaqin Gunting Saga ini cukup tepat dijadikan mercu tanda Kecamatan Kualuh Selatan atau kampung atau (kini) Kelurahan Gunting Saga yang juga terkenal dengan masakan Gulai Asam Ikan Baung-nya. Kampung Gunting Saga berkembang mengikuti alur sungai yang menghubungkan kampung ini dengan Tanjung Pasir, pusat kekuasaan Kualuh. Seiring perluasan perkebunan yang diikuti pembukaan jalan raya sejak awal abad ke-20 membuat perkembangan kampung ini bergeser mengikuti alur jalan raya.

Pembukaan perkebunan dalam skala besar, pembangunan jalan raya pos disusul pembukaan jalur kereta api oleh Deli Spoorweg Maatschappij (DSM) yang menghubungkan Medan-Rantau Prapat bahkan di masa Jepang sempat akan terhubung ke Pekan Baru secara tidak langsung mengakibatkan kemunduran peran sungai dan kampung-kampung di tepi sungai Kualuh.³⁰ Sungai tidak lebih sebagai jalur transportasi pendukung sedangkan perkebunan menyebabkan pengalihan tenaga kerja. Kampung-kampung yang terletak di pinggir sungai pun seolah-olah menjadi terpencil menyusul pembentukan konsentrasi pemukiman yang lebih padat di sepanjang jalan raya. Pertumbuhan konsentrasi pemukiman baru itu akhirnya mendorong pembentukan kampung-kampung baru yang masih dapat dilihat sampai sekarang.

Perkembangan di atas; mulai dari pergeseran fungsi sungai, alih lahan serta pekerjaan dan pembentukan kampung-kampung baru inilah yang menjadikan Mesjid Raya Nurul Yaqin Gunting Saga penting bagi kajian sosio-historis di Kualuh. Dataran rendah Kualuh yang subur dengan ketersediaan air yang

mencukupi untuk persawahan ditambah reputasi beras Leidong yang terkenal itu menjadikan Kualuh dan sungai Kualuh yang membelah daerah ini menjadi pintu masuk bagi kajian tentang perubahan dan kesinambungan sosial di kawasan ini. Beberapa pokok kajian menarik ialah pengislaman para pendatang yang kemudian menggarap sawah-sawah paling penting bagi perekonomian Kualuh dan Asahan negeri penghasil beras sejak masa kolonial. Kajian yang menggunakan pendekatan genealogis sangat menarik mengingat ada sesuatu yang masih mengikat Batak Melayu dengan kampung asal (*Bona Ni Pasogit*) mereka di pedalaman.

Belum ditemukan kaitan langsung antara mesjid di Gunting Saga ini dengan Tanjung Pasir yang menjadi ibukota kerajaan Kualuh namun sejarah pembangunan Mesjid Raya Nurul Yaqin Gunting Saga ini telah menunjukkan suatu hubungan *rural-urban* (bandar/kota dan kampung) yang kuat antara Gunting Saga dengan Tanjung Pasir yang dermaga sungainya masih dapat disinggahi kapal api sampai tahun 1922.³¹ Hubungan ini terkait dengan serentetan peristiwa, mulai dari serangan dua penjurur Sultan Muhammad Husinsyah dan Raja Muhammad Ishak ke Kualuh lama yang menyisakan cerita tentang asal-usul salah satu dari penguasa Asahan itu, perpindahan bergelombang orang Batak dari pedalaman ke pesisir sampai Revolusi Sosial yang mengakhiri semua kekuasaan Kualuh.

Serangan Asahan atas Kualuh lama (1822) ditambah gaya hidup para bangsawan pada masa kolonial agaknya jadi masalah serius bagi masyarakat di kampung-kampung dalam wilayah kekuasaan Kualuh dan masyarakat. Pendapat ini tersimpul dari sejumlah hasil wawancara yang berisi ingatan tentang penaklukan Kualuh lama, 'ketakutan' sekaligus penyesalan atas Revolusi Sosial 1946 di Kualuh. Permasalahan ini ditumpahkan dalam Revolusi Sosial sehingga menyebabkan Yang Dipertuan Kualuh dan sebagian besar anggota keluarganya dibunuh. *'Tindakan yang lebih ganas telah dilakukan di lima kerajaan kecil di daerah Labuhan Batu. Menurut suatu laporan*

Persatuan Perjuangan (yang dimuat dalam Soeloeh Merdeka 10 April 1946) kemudian sebabnya ialah di daerah ini (Labuhan Batu), 'raja-rajanya telah menindas tanpa kenal batas terhadap rakyat dan kaum pergerakan' begitu tulis Reid.³²

Hal-hal yang dianggap permasalahan seperti yang telah disebut di atas, digambarkan oleh Reid secara ringkas namun cukup menggambarkan suasana waktu itu. *Wakil Pemerintah Negara Republik Indonesia (NRI) yang dijabat Tengku Hasnan disergap tengah malam bersama tiga pembantunya lalu dibawa ke pinggir sungai yang curam untuk dibunuh. Tengku Hasnan dan Tengku Long dipenggal kepalanya sedangkan dua yang lain terjun ke sungai menyelamatkan diri. Pada waktu yang sama Istana Kualuh di Tanjung Pasir dikepung kemudian diserbu dan semua penghuninya ditawan. Sultan Kualuh bersama salah seorang putranya ditemukan sedang sekarat esok harinya di pekuburan Cina.*³³ Penggambaran rekonstruktif berdasarkan sumber-sumber lisan dan tulisan yang dilakukan Reid ini menjadi representasi mengerikan tentang jalannya Revolusi Sosial itu.

Penggambaran di atas memiliki kemiripan dengan cerita-cerita yang tersimpan sebagai kenangan kolektif pada masyarakat Tanjung Pasir dan kampung-kampung di Kualuh. Terdapat sejumlah versi cerita (lihat narasi Mesjid Raya Tanjung Pasir) atau penambahan maupun pengurangan untuk berbagai kepentingan namun cerita itu merujuk pada peristiwa, sosok serta alur yang sama. Dalam Revolusi Sosial, massa tidak berasal dari luar daerah justru sebagian besar yang bergerak secara sporadis ialah warga kampung-kampung di kerajaan, yang terpengaruh suasana akibat masalah-masalah politik akibat polarisasi kekuasaan; rekrutmen konstituen partai secara besar-besaran atau pembentukan badan-badan perjuangan (milisi atau laskar rakyat) yang menimbulkan dikotomi negatif, pertentangan tajam, menimbulkan kecurigaan dan provokasi yang menjalar hingga ke akar rumput.

Dari 'curahan hati' beberapa orang yang merasa tidak berbuat apa-apa atau merasa tidak setia ketika sang raja dan keluarganya dibantai massa mengarah kepada penyesalan.

Sebuah ungkapan sesal, '*barangkali karena mengkhianati raja, (taraf) hidup kami tidak naik-naik padahal ayah saya dan ompung saya itu termasuk orang dekat raja!*' merupakan representasi penting untuk mengungkap hubungan antara raja dengan kawulanya sekaligus menilai apakah ada kosmologi yang menjadi dasar atas suatu susunan konstelasi sosial atau politik yang memisahkan ranah yang dikuasai raja dengan ranah yang menjadi hak para kawulanya, seperti mesjid yang dibangun raja dengan mesjid kawula (masyarakat).

Dari tujuh mesjid yang dipetakan, Mesjid Raya Nurul Yaqin Gunting Saga merupakan satu-satunya mesjid bersejarah dalam pemetaan ini yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Terlepas dari pengembangan langgam bangunan mesjid yang berlangsung sesudah itu, mesjid ini tetap dipandang sebagai mesjid komunitas atau mesjid masyarakat. Meminjam terminologi yang digunakan Ali Akbar (A.A.) Navis, mesjid ini kami sebut dan/atau digolongkan sebagai mesjid umat.³⁴ Penggolongan ini akan menjadi landasan untuk memahami sejarah, perkembangan sosio-budaya dan politik pada mesjid-mesjid indah yang didirikan para raja (mesjid raja). Penggolongan ini akan mendorong pemahaman lain, apakah ada hal-hal yang mengandung *anti-these* atau kontestasi atas lambang kekuasaan yang biasanya dilekatkan pada mesjid yang didirikan oleh masyarakat (mesjid umat).

Satu hal yang istimewa dan tidak ditemukan pada mesjid-mesjid yang dipetakan ialah, setiap tahun sejak 1959, masyarakat Gunting Saga menggelar Hari Gembira Aidil Fitri yang disingkat Hagaf. Kegiatan yang dimaksudkan untuk memeriahkan Hari Raya Idul Fitri sekaligus menghimpun para perantau asal Gunting Saga. Hagaf selalu dimeriahkan oleh beragam perlombaan dan hiburan yang materinya terus berubah setiap tahun, digelar di halaman Mesjid Raya Nurul Yaqin Gunting Saga dan pada aliran sungai Kualuh.³⁵ Pada tahun 2011, Hagaf berlangsung lebih meriah dan dibuka oleh Bupati Labuhan Batu Utara (Labura). Panitia yang terdiri berbagai unsur masyarakat termasuk pengurus mesjid menggelar lomba renang

sungai, lomba rakit batang pisang, tangkap bebek, panjat pinang, festival band, pemilihan dai cilik dan peragaan busana muslim dan pawai perahu.

Perayaan Hari Gembira Aidil Fitri yang sudah berlangsung untuk yang ke-52 kali ini menjadi kalender tetap masyarakat Kecamatan Kualuh Selatan, bahkan akan menjadi kalender tetap Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara. Sejak pertama kali diselenggarakan, Mesjid Raya Gunting Saga menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan yang didanai secara swadaya oleh masyarakat. Meskipun Hagaf dapat digolongkan sebagai Perayaan Hari Besar Islam (PHBI) namun jika mengamati agenda dan maksud acara itu digelar maka Hagaf cenderung dapat digolongkan sebagai pesta rakyat. Inilah satu hal yang paling dikenali dari Mesjid Raya Nurul Yaqin Gunting Saga sehingga bukan sesuatu yang sukar dipahami jika keadaan mesjid yang dahulu cuma surau kecil semi-permanen ini dapat berganti wajah menjadi mesjid permanen, megah dengan ciri arsitektur populer.

Mesjid yang dominan berwarna putih dengan pola marmer yang khas ini masih saja dikaitkan dengan kisah-kisah beraroma mistik karena adanya kompleks pemakaman yang terletak di pekarangan depan. Jembatan besi yang menghubungkan dua sisi sungai Kualuh ditambah cerita-cerita romantik tentang mesjid itu di masa lalu itu telah menjadi mercu tanda Gunting Saga sekaligus perhelatan akbar sesudah Idul Fitri. Dua menara yang terdapat di halaman mesjid ini; satu menara 'adzan' yang lebih tinggi dan satu menara lagi lebih pendek dijadikan menara tempat menggantungkan kentong kayu. Menara pendek setinggi empat-lima meter ini merupakan infaq dari almarhum H. Rafli Tanjung dan almarhumah Hj. Khujaimah Marpaung yang pembangunannya diwakili atau diserahkan oleh Rafliadi, S.H. anak dari pasangan itu pada tanggal 15 Januari 2005 untuk menggantikan menara kentong lama.



Gambar 25: Menara kentong di halaman Mesjid Raya Nurul Yaqin Gunting Saga (atas)
Perbandingan tinggi menara kentong dengan menara adzan (tengah) dan prasasti
penanda sumbangan yang ditanam pada dinding bawah menara kentong (bawah).
(Foto: Nasrul Hamdani & Muhammad Affan)

Pemberian istilah 'raya' pada Mesjid Nurul Yaqin di Gunting Saga ini berhubungan dengan keadaan psikososial masyarakat umum yang cenderung ingin lebih jika harus dibandingkan. Sejauh penelusuran kami, penambahan kata 'raya' (juga dengan 'jami' atau jamik) ini tidak disandarkan pada alasan-alasan administratif tetapi cenderung pada penamaan umum, bahwa mesjid raya dianggap atau merupakan mesjid utama di satu kecamatan. Begitupun, hal itu tidak berlaku di Kualuh Selatan. Pada kecamatan ini terdapat mesjid raya lain, yaitu Mesjid Raya Tanjung Pasir yang terletak kira-kira dua jam perjalanan sungai ke arah hilir. Dengan demikian, perasaan dan/atau motivasi yang bersifat daerah/kampung-sentris merupakan alasan yang cukup tepat mengapa warga dengan bangga memberi kata 'raya' pada mesjid yang menjadi representasi keislaman yang didirikan di kampung mereka.

Mesjid yang kini berada dalam kabupaten pemekaran yang memilih motto *Basimpul Kuat Babontuk Elok* atau secara harfiah berarti bersimpul jadi kuat, berbentuk terlihat indah ini merupakan salah mesjid penting di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Mesjid utama di Aek Kanopan, ibukota kabupaten baru itu tidaklah semegah atau memiliki kalender tahunan seperti Mesjid Raya Nurul Yaqin Gunting Saga. Seperti mesjid-mesjid lain, fungsi dasar mesjid ini masih berjalan namun aktivitas sholat berjamaah (setidaknya pada Ashar dan Magrib ketika kami berkunjung) di mesjid ini hanya diramaikan oleh orang-orang yang berumur lanjut. Keramaian pada Hari Gembira Aidil Fitri (Hagaf) yang berlangsung setiap Syawal tidak terpantul dari mesjid yang memiliki dermaga yang menjadi akses langsung ke sungai Kualuh.



Gambar 26: Mesjid Lama Tanjung Medan, Kampung Rakyat - Labuhan Batu Selatan
(Foto: Nasrul Hamdani & Muhammad Affan)

Mesjid Lama Tanjung Medan: Kisah Tengku Nong Hamzah dan 'Revolusi' di Kampung Raja

Cukup sulit mencapai Kampung Rakyat tempat Mesjid Lama Tanjung Medan berada meskipun jarak dari Rantau Prapat, ibukota Labuhan Batu atau Kota Pinang ibukota Labuhan Batu Selatan terbilang tidak begitu jauh, antara 40-50 kilometer. Dalam keadaan normal, jarak sejauh itu seharusnya dapat ditempuh dalam 45 menit hingga satu jam perjalanan dengan kendaraan bermotor namun para pengunjung harus menghabiskan waktu lebih lama. Kondisi jalan dari dan menuju ke kampung inilah yang menjadi penyebabnya. Hampir seluruh ruas jalan terhitung dari Simpang Tolan masih berupa jalan tanah yang diperkeras dengan batu padas meskipun pada

beberapa ruas terlihat sisa-sisa kepingan aspal yang masih menempel di tengah-tengah badan jalan yang sudah meninggi dari bahu jalan di pinggirnya.

Lebar badan jalan yang tidak lebih dari lima meter membuat jalan perkebunan itu terasa sempit dan semakin sempit jika dua kendaraan berpapasan. Salah satu kendaraan harus menepi untuk memberi laluan kepada yang lain. Parit-parit besar penampung air hujan yang dibentengi gundukan tanah setinggi hampir satu meter semakin mempersempit ruas jalan yang menjadi lintasan utama bagi truk-truk pengangkut tandan kelapa sawit sekaligus jalur angkutan umum ke Kampung Rakyat dan sejumlah kampung lain di Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Pemandangan menuju Tanjung Medan ini mirip dengan pemandangan menuju ke Mesjid Raya Tanjung Pasir. Hamparan kebun kelapa sawit terhampar di sisi kanan dan kiri jalan menuju kampung yang dahulu bernama Kampung Raja ini.

Perubahan nama Kampung Raja menjadi Kampung Rakyat berkaitan dengan Revolusi Sosial 1946 namun tidak banyak keterangan mengenai proses dan mengapa nama kampung ini diubah. Hampir seluruh keterangan dari warga yang dapat dihimpun hanya mengemukakan alasan paling sederhana 'karena tidak ada lagi raja di kampung ini!'³⁶ Begitupun, warga masih saja menyebut daerah mereka dengan Kampung Raja dibanding Kampung Rakyat yang telah menjadi nama resmi kampung yang berada di tengah-tengah perkebunan sawit ini. Banyak hal yang dapat menjelaskan kecenderungan itu namun Kisah dan kenangan tentang sosok serta kiprah Tengku Nong Hamzah merupakan faktor paling penting dalam perubahan dan kesinambungan sosial di Kampung Rakyat itu.

Tengku Nong Hamzah dikenal masyarakat Kampung Rakyat sebagai Raja Kampung Raja meskipun dalam beberapa catatan, sosok bangsawan Melayu keturunan Kota Pinang dari *trah* Sungai Toras yang dihormati rakyatnya ini disebutkan sebagai *hoofdbestuur* (berarti kepala pemerintahan, kira-kira setingkat camat dengan otoritas yang lebih khusus dan luas

sehingga penjabatnya sering dipanggil dengan sebutan *hoofdcamat*) yang memerintah Kampung Raja. Mengenai pengistilahan yang menunjukkan suatu hubungan administratif yang kuat dengan pemerintah kolonial ini -terlepas dari kemungkinan kesalahan menuliskan istilah administratif itu- ada pula yang menuliskan istilah itu dengan *half-bestur* (*sic*) meskipun tidak ada penjelasan lebih lanjut apa arti istilah ini.

Dengan status itu, Tengku Nong Hamzah dapat menjadi 'raja kecil' yang memerintah dari sebuah kampung terbesar dalam suatu daerah administratif yang dinilai penting secara ekonomi, sosial dan politik. Daerah administratif yang disandang Tengku Nong Hamzah itu kemungkinannya ialah satu 'kotak' dalam bagan struktur pemerintahan langsung atau *rechtstreeksbestuurgebied* atau mungkin saja kotak lain dalam struktur *zelfbestuurgebied* yang dimodifikasi. Mengenai hal ini perlu pendalaman lebih lanjut karena hanya ada empat *zelfbestuurder* penting di Sumatera Timur yang diikat dengan kontrak politik '*lange*' bukan '*korte*'. *Lange* (berarti panjang) atau *korte* (pendek) ini sangat menentukan 'kelas' kerajaan dan 'gengsi' para sultan di hadapan para penguasa tradisional lainnya, terutama gengsi para raja yang negerinya 'diikat' dengan dengan *lange verklaing*.

Terlepas dari permasalahan psikopolitik karena istilah yang timbul dari penggolongan kerajaan *lange* dan *korte* dalam struktur pemerintahan kolonial di atas, terdapat sebuah fakta menarik di Kampung Raja. Jika didasarkan pada prasasti dan nisan makam Tengku Nong Hamzah di Kampung Raja itu, maka Jabatan Raja Kampung Raja ini secara resmi disandang Tengku Nong Hamzah pada tanggal 1 Januari 1916 yang menjadi tahun resmi berdirinya 'kerajaan' Kampung Raja (lihat gambar 18). Dengan demikian, sebelum tahun 1916 tidak ada *patron* yang dirajakan secara resmi oleh pemerintah kolonial di kampung ini. Kemungkinan kedua ialah, kampung ini merupakan kampung yang baru diintegrasikan sebagai kampung administratif untuk pemerintahan swapraja mengingat banyaknya mayoritas

penduduknya adalah pendatang dari wilayah Padang Lawas dan Angkola.

Perubahan nama Kampung Raja menjadi Kampung Rakyat merupakan konsensus politik yang mengubah konstelasi sosial di kampung itu. Pada tanggal 3 Maret 1946, Tengku Nong Hamzah melepaskan jabatan sebagai Raja Kampung Raja sekaligus mengakhiri 30 tahun pemerintahan dan keberadaan 'Kerajaan' Kampung Raja di *onderafdeeling* Labuhan Batu. Hal ini dilakukan agar 'pembantaian' para bangsawan yang sudah terjadi di Sunggal, Langkat, Bilah, Kota Pinang dan Kualuh tidak berulang di kampung ini selain menghindari bentrok antara massa dengan warga Kampung Raja. Kemungkinan, pada hari ketika Tengku Nong Hamzah melepaskan jabatan itu pada hari itu pula nama Kampung Raja diubah menjadi Kampung Rakyat. Perubahan ini menandai transisi pemerintahan di kampung yang disebut-sebut memiliki deposit timah.



Gambar 27: Prasasti pada makam Tengku Nong Hamzah terletak di halaman Mesjid Raya Tanjung Medan (Foto: Nasrul Hamdani & Muhammad Affan)

Penyerahan kekuasaan Raja Kampung Raja kemudian disusul perubahan nama kampung berlangsung mulus berkat jejak rekam Tengku Nong Hamzah selama memerintah kampung besar di tengah perkebunan itu. Jejak rekam dan pengalaman sosok yang dikenang agamis dan sederhana ini membawa dirinya ke lingkungan birokrasi pemerintah RI di Labuhan Batu.³⁷ Sehari sesudah melepaskan jabatan Raja Kampung Raja, Tengku Nong Hamzah langsung diangkat menjadi A.B.A. yang kemungkinannya ialah *Administratief Belasting Ambtenaren* atau pegawai administrasi pajak untuk pemerintahan Republik Di Labuhan Batu. Jika benar demikian, jabatan ini bukanlah hal baru bagi Kepala atau Raja Kampung Raja ini. Salah satu tugas utama kepala-kepala kampung di masa kolonial ialah menarik pajak (*belasting*) dari masyarakat.

Pajak dan cara pengutipannya pernah menimbulkan perlawanan dan ketegangan di sejumlah daerah di Hindia Belanda termasuk *onderafdeeling* Labuhan Batu. Pemberlakuan skema pajak diri yang memaksa setiap orang yang mencapai usia yang ditentukan diwajibkan membayar pajak. Jika tidak mampu membayar maka orang yang bersangkutan harus kerja rodi selama waktu yang telah ditentukan kontrolis setempat. Dasar pengenaan pajak ini mendorong para pemuda yang baru menginjak usia kena pajak menghindari dengan cara berpindah ke kota-kota terdekat. Sebagai pejabat yang berwenang mengutip pajak, Tengku Nong Hamzah berusaha menjalankan hali itu namun tampaknya masalah *belasting* yang menimbulkan perlawanan di Panai tidak mengganggu hubungan antara Tengku Nong Hamzah dengan kawulanya.

Selain menjabat A.B.A. pada masa perang kemerdekaan, Tengku Nong Hamzah pernah memegang sejumlah jabatan birokrasi strategis hingga tahun 1958. Dari inskripsi pada panel prasasti dapat diketahui karir birokrasi Tengku Nong Hamzah. Berikut salinan inskripsi prasasti beraksara Latin dan Jawi itu: Tengku Nong Hamzah/Raja Kampung Raja/Almarhum Tawakal'alallah/1 Januari 1916 sampai 4 Maret 1946 [menjadi] Raja Kampung Raja/4 September 1946 sampai 19 Desember

1949 [menjadi] A.B.A./20 Desember 1949 sampai 30 Juni 1958 [menjabat] Kepala Wilayah Labuhan Batu/1 Juli 1950 sampai 30 Juni 1958 [menjabat] Patih Tingkat I Labuhan Batu/1 Juli 1958 sampai 21 Juli 1968 masih disebutkan 'Patih' diikuti keterangan 'pensiun'/Hari ketika Tengku Nong Hamzah mangkat diabadikan dengan jelas pada prasasti di atas, tertulis: Mangkat malam Ahad jam 7.50 WIB, 21 Juli 1968.

Konsensus yang dicapai masyarakat Kampung Rakyat merupakan perlawanan atas desakan massa radikal-anarkis di masa lalu sekaligus penghormatan kawula atas sosok Nong Hamzah. Tengku Nong Hamzah merupakan satu dari sedikit raja yang melalui peristiwa berdarah itu dengan selamat, bukan karena sedang beruntung melainkan karena rekam jejaknya di masa lalu sehingga kawula Kampung Raja mengambil prakarsa untuk melindungi rajanya dari tindak anarkis massa dari luar kampung yang memang mengincar golongan bangsawan secara membabit. Kisah tentang Tengku Nong Hamzah dan segala hal yang membuatnya dikenang masyarakat ini melekat pada sebuah mesjid yang disebut masyarakat secara harfiah saja: Mesjid Lama Tanjung Medan.

Seperti namanya, Mesjid Lama Tanjung Medan memang benar-benar mesjid lama yang sudah tidak dimanfaatkan lagi. Alasan utamanya ialah, mesjid yang luasnya sekitar 100 meter persegi ini dianggap tidak lagi mampu menampung jama'ah apalagi pada bulan Ramadhan dan hari raya. Sebagai jalan keluar, masyarakat Kampung Raja mengambil prakarsa untuk membangun mesjid baru yang terletak persis di sebelah Tenggara mesjid lama itu dan tetap mempertahankan mesjid lama tetap tegak sebagai bentuk penghormatan pada sosok Tengku Nong Hamzah. Mesjid baru yang dinamai Mesjid Jami' Tanjung Medan ini dibangun dengan corak sederhana namun lebih besar dibandingkan dengan mesjid yang didirikan Tengku Nong Hamzah pada tahun 1935 ini. Pembangunan Mesjid Jami' ini berlangsung setahun sebelum Tengku Nong Hamzah mangkat.³⁸



Gambar 28: Mesjid Jami' Tanjung Medan yang dibangun 1967. Di sebelah kiri-belakang tampak menara dan sebagian bangunan bagian Timur Mesjid Lama Tanjung Medan.
(Foto: Nasrul Hamdani & Muhammad Affan)

Penghormatan masyarakat atas sosok Raja Kampung Raja yang tercatat pula sebagai pensiunan Patih Labuhan Batu ini ditunjukkan ketika Tengku Nong Hamzah mangkat. Sebagaimana raja atau Sultan Melayu lainnya di Sumatera timur, jenazah Raja Kampung Raja ini dimakamkan persis di depan mihrab mesjid yang menjadi bagian paling depan sekaligus penunjuk ke arah kiblat. Makam Tengku Nong Hamzah merupakan makam tunggal berukuran kira-kira 25 meter persegi. Meski batu nisannya terkesan sederhana dan hampir tidak terlihat lagi karena rimbunan tanaman berdaun hijau tua dengan bintik-bintik kuning. Lantai makam itu dilapisi tegel kuning bercorak guratan berwarna putih yang abstrak. Makam yang ditinggikan itu dilapisi panel keramik putih, diberi cungkup permanen dengan warna dan ornamen khas ini merupakan tanda bahwa Tengku Nong Hamzah tetap dihormati kawula Kampung Raja.



Gambar 29: Makam Tengku Nong Hamzah, Raja kampung Raja
di Kompleks Mesjid Lama tanjung Medan
(Foto: Nasrul Hamdani & Muhammad Affan)

Mesjid Lama Tanjung Medan termasuk bangunan unik yang tidak kami jumpai di tempat lain karena memadupadankan material semen yang menjadi ciri bangunan Barat dan kayu (papan) yang menjadi ciri bangunan Melayu. Mesjid kecil yang kini terpaksa dijadikan gudang peralatan Mesjid Jami' Tanjung Medan masih berdiri kokoh. Menara mesjid setinggi kira-kira 10 meter yang ditegakkan di atas kolom beton segi empat setinggi empat meter pun masih kokoh. Hanya bagian bersegi enam yang ber dinding papapn dan berlapis seng pada bagian luar diperkuat dengan kabel baja. Menara bertangga kayu ini masih dapat dinaiki hingga ke puncak meskipun dinding dan anak tangganya diselimuti debu tebal. Puncak menara dipercantik dengan kubah berbentuk mirip topi perang yang biasa dikenakan para prajurit Mongol atau tentara tradisional di Asia Timur hingga Barat ini difungsikan sebagai tempat meletakkan corong pengeras suara Mesjid Jami' (lihat gambar 17).

Mesjid kecil berbentuk bujur sangkar ini memiliki ukuran serambi yang cukup luas bahkan kalau dibandingkan dengan ruangan di dalamnya. Sebuah bangunan seperti bagian teras yang menjorok ke luar (semacam *kuncungan* tetapi menjorok cukup jauh ke luar) di sebelah Selatan yang menjadi akses keluar-masuk utama ke serambi dan ruang utama mesjid selain pintu di bagian Timur dan Utara. Mesjid yang dinding papannya dilapisi cat berwarna biru sedangkan bagian kolom betonnya diwarnai krem pucat sehingga terlihat seperti warna putih ini berlantai semen yang sudah pecah maupun retak. Ornamen khas bangunan mesjid seperti bulan bintang yang dibentuk pada *kuncungan*, lengkungan (*arch*), aksen garis-garis tebal dan tipis serta sejumlah bentuk geometri (seperti bintang dan belah ketupat) menghiasi mesjid kecil yang sudah berumur 75 tahun ini.



Gambar 30: Pintu utama Mesjid Lama Tanjung Medan
dihiasi ornamen bulan bintang dan lengkungan yang khas Eropa.
(Foto: Nasrul Hamdani & Muhammad Affan)

Bagian lain yang menarik ialah mihrab. Mihrab Mesjid Lama Tanjung Medan dibentuk membulat seperti peluru, ditegakkan dengan bata dan dilapisi adukan semen tebal yang menjorok keluar. Jika ditinjau dari luar, bentuk mihrab yang mirip peluru yang ditegakkan itu seolah-olah menempel pada dinding papan (lihat gambar 17). Berbeda dengan mihrab slinder pada Mesjid Raya Tanjung Pasir Kualuh, tidak ada ornamen apapun yang diletakkan pada mihrab bundar Mesjid Raya Tanjung Medan ini. Dari dalam, mihrab yang ini terkesan sempit dan gelap. Di dalamnya hanya dapat dibentangkan sajadah ukuran sedang untuk alas sholat (sajadah) imam. Ketiadaan ventilasi membuat bagian dalam mihrab ini gelap dan sedikit lembab karena tidak ada atap peneduh yang dapat menghindarkan mihrab bagian luar dari curah hujan dan sengatan panas matahari.

Mesjid yang lantainya yang ditinggikan 50 centimeter dari permukaan tanah ini memiliki tiga pintu masuk dan sembilan jendela. Bentuk daun pintu dan jendela semuanya sama, berbentuk empat persegi panjang dihiasi dengan bilah-bilah kayu yang disusun miring seperti sisir. Celah di antara susunan pelat kayu itu difungsikan sebagai ventilasi udara. Panel daun pintu maupun daun jendela yang masing-masing berjumlah sepasang dicat warna biru sedangkan bilah-bilah kayu yang disusun rapi menyerupai sisir diwarnai kuning tua sehingga memancarkan suasana cemerlang. Di atas setiap panel/kusen pintu dan jendela terdapat lubang angin berukuran besar berbentuk bujur sangkar sedangkan empat lubang angin di atas pintu diberi kayu yang disilangkan sebagai aksen penanda.

Mesjid Lama Tanjung Medan yang terletak persis di sebelah Markas Komando Rayon Militer ini memang tidak difungsikan lagi seperti mesjid umumnya namun masyarakat tetap mempertahankan bangunan itu seperti yang masih dapat dilihat sampai kini. Faktor sang pendiri mesjid, Tengku Nong Hamzah menjadi alasan masyarakat mempertahankan Mesjid Lama Tanjung Medan yang jika saja dipugar dengan perhitungan dan pertimbangan yang tepat akan dapat menjadi mercu tanda

Kampung Rakyat. Apalagi, mesjid itu telah menjadi saksi bisu yang merekam perubahan dan kesinambungan sosial di kampung itu. Revolusi yang berlangsung berdarah-darah di kerajaan lain tidak berlaku demikian di Kampung Raja. Raja dan para bangsawan yang jadi sasaran revolusi di Kampung Raja ini justru dapat melalui peralihan kekuasaan itu dengan baik tanpa pertumpahan darah.



Gambar 31: Mesjid Besar Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan
(Foto: Nasrul Hamdani & Muhammad Affan)

MESJID BESAR KOTA PINANG: MENUJU MESJID AGUNG KOTA PINANG

Pemekaran Kabupaten Labuhan Batu menjadi Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura) dan Labuhan Batu Selatan (Labusel) yang beribukota di Kota Pinang membawa 'berkah' bagi pekan-pekan kecil di daerah pemekaran itu. Kota Pinang yang selama ini dikenal sebagai kota transit sekaligus kota terakhir sebelum memasuki Provinsi Riau setelah pemekaran didaulat menjadi ibukota Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Perkembangan ini langsung mengangkat derajat dan perasaan warga Kota Pinang yang sebelum ini 'cuma' menjadi pekan yang dijadikan ibukota kecamatan. Kisah-kisah di masa lalu tentang Kota Pinang mulai dihidupkan untuk mengikat perasaan yang membuncah itu. Kisah tentang Kesultanan Kota Pinang yang

menguasai bagian tengah Sungai Barumun, tentang Istana Kota Bahran yang megah namun kini tinggal reruntuhan, Mesjid Besar dan Yang Dipertuan Musthafa Sultan Kota Pinang terakhir dihidupkan kembali.

Kota Pinang bukanlah kota baru. Kota yang menjadi ibukota Kesultanan Kota Pinang ini disebutkan sudah ada sejak abad ke-15. Keberadaan bandar ini disebutkan lebih tua dibanding Tanjung Balai ibukota Asahan. Sebagai representasi Kerajaan Pinang Awan, sebuah lokasi yang disebut dengan nama Hotang Momo atau Hotang Mumuk dan dianggap sebagai 'titik nol' atau pusat kekuasaan Kota Pinang pada masa-masa awal menyimpan serangkaian kisah perjalanan Batara Sinomba atau Batara Gorga Pinayungan dari Pagaruyung bersama adiknya tirinya Putri Lenggogeni yang diusir sang ayah. Seorang adik Batara Sinomba yang lain, bernama Batara Guru Payung berkeras turut serta dalam perjalanan panjang menuju Aceh meskipun tidak ada restu dari sang ayah, Raja Alamsyah Syaifuddin.³⁹

Dalam perjalanan menuju Aceh, negeri yang menjanjikan kemakmuran dan penghidupan yang layak bagi mereka itulah, ketiga saudara itu tiba di suatu tempat di mana sebuah pohon Pinang tumbuh begitu tinggi. Saking tingginya, pucuk pelepahnya seolah-olah menembus gumpalan-gumpalan awan di atasnya. Keadaan inilah yang menjadi dasar penamaan tempat yang berada di tepi sungai Barumun itu dengan (kampung) Pinang Awan yang dikepalai Patuan Hajoran, pemimpin dua klan (kelompok marga) penting di situ yaitu Daposong (*sic*, mungkin saja Dasopang) dan klan Tambak. Di tempat inilah, terutama karena asal-usul Batara Sinomba dari Pagaruyung di tanah Minangkabau yang menjadi pusat orientasi masyarakat di pedalaman Pantai Barat Sumatera, Batara Sinomba didaulat sebagai raja di Pinang Awan oleh pemimpin kedua klan itu.

Nama Pinang Awan diubah menjadi Kota Pinang oleh Sultan Kumala, generasi keenam Batara Sinomba.⁴⁰ Perubahan nama Pinang Awan menjadi Kota Pinang tidak diketahui pasti namun hal itu dapat dikaitkan dengan perubahan konstelasi

politik tradisional di kawasan yang sekarang ini dikenal dengan nama Asahan-Labuhan Batu (Aslab). Dominasi Aceh di ujung Pulau Sumatera, perebutan hegemoni antara Aceh dan Siak serta putusnya kontak negeri-negeri yang memiliki hubungan sejarah dan kekerabatan dengan Pagaruyung di Minangkabau sejak abad ke-17 itu secara langsung maupun tidak langsung telah mendorong lahirnya konsep pertuanan baru di kawasan ini. Negeri-negeri baru yang 'merdeka' dari Pagaruyung namun tunduk pada Aceh pun lahir dari pertuanan ini meskipun dalam perkembangannya diketahui pula ada negeri-negeri yang merdeka dari Aceh dan senantiasa memelihara romantisme dengan Pagaruyung.

Lahirnya Deli (juga Serdang), Asahan, Batubara, Kota Pinang, Bilah dan Panai berkaitan dengan perkembangan serta dampak konstelasi tersebut di atas. Namun, satu hal penting lain dari kelahiran negeri-negeri baru yang dipengaruhi Aceh ialah telah ada pelebagaan negara dengan alat serta kelengkapan seperti halnya sebuah negara pada abad ke-16 hingga 17. Negeri-negeri baru yang dipengaruhi dan mengadopsi cara-cara orang Aceh itu diperintah oleh seseorang yang diberi gelar 'Sultan', sebuah istilah yang tidak dikenal sebelum pengaruh Aceh muncul. Pelebagaan negara ini juga mendorong percepatan proses pengislaman yang berarti pengintegrasian wilayah dan memperluas pengaruh kekuasaan negeri-negeri yang diperintah seorang sultan yang menyandang *Wakil* maupun *Wazir* Sultan Aceh itu hingga ke wilayah pedalaman.

Pun demikian dengan Kota Pinang. Jika menggunakan asumsi Anthony Reid tentang angka harapan hidup raja-raja di Asia Tenggara (antara 30-36 tahun)⁴¹ maka perubahan nama Pinang Awan menjadi Kota Pinang terjadi kira-kira pada tahun ke-180 negeri itu. Selain itu, hal lain yang mendorong perubahan yang berlangsung pada akhir abad ke-16 atau awal abad ke-17 itu ialah ketika Aceh memperluas rentang kendali pertahanan di daerah-daerah takluknya dengan membangun *kuta* yang bermakna benteng atau daerah yang dijadikan basis pertahanan. Dari perluasan ini kemudian muncul daerah-daerah yang

dianggap sebagai benteng Aceh, misalnya Kuta Rentang atau Kota Rantang di Hamparan Perak Sumatera Utara. Analogi ini dapat digunakan untuk melihat perkembangan Kota Pinang yang berada di tepi sungai Barumun yang bermuara ke Panai dan berhulu di Padang Lawas.

Sejarah Pinang Awan 600 tahun lalu itu ditambah perubahan status Kota Pinang menjadi ibukota Kabupaten Labuhan Batu Selatan mengubah pandangan orang akan kota lintas ini. Pemusatan kantor pemerintahan di sekitar pekan Kota Pinang yang jalan protokolnya dibelah oleh Jalan Lintas Timur Sumatera berdampak besar bagi perkembangan Kota Pinang. Penataan ruang publik yang dimulai dari penetapan serta pengembangan kawasan perkantoran, penataan pasar serta perbaikan dan pelebaran jalan berimbas pada Mesjid Besar Kota Pinang yang menjadi satu-satunya objek sejarah yang masih dipelihara dengan baik. Sementara, Istana Kota Bahrn yang terletak tidak jauh dari mesjid resmi Kesultanan Negeri Kota Pinang itu kini tinggal sisa-sisa bangunannya saja; tangga, kolom-kolom beton serta dinding sudah dipenuhi tumbuhan menjalar yang batangnya sudah menjadi kayu, sampah dan berbau pesing.



Gambar 32: Sisa-sisa bangunan Istana Kota Bahrn di Kota Pinang
(Foto: Nasrul Hamdani & Muhammad Affan)

Mesjid Besar Kota Pinang merupakan satu-satunya peninggalan Kesultanan Negeri Kota Pinang yang masih utuh sekaligus menjadi objek penting untuk menautkan kisah-kisah tentang perkembangan masyarakat dan daerah itu dengan masa lalunya. Dari mesjid yang terletak tidak jauh dari sungai Barumun ini kisah tragis tentang Yang Dipertuan Ma'mur Tengku Musthafa Perkasa Alamsyah, Sultan Kota Pinang terakhir dan negeri yang dipimpin hingga akhir hayatnya dapat dilacak. Demikian pula dengan kisah di balik reruntuhan Istana Kota Bahrn yang megah pada jaman itu. Garis kisah tentang gelombang massa yang mengepung lalu menyerang Istana Kota Bahrn yang kabarnya suasana mencekam itu sempat dituangkan dalam sebuah lukisan juga dapat ditelusuri dari mesjid yang dibangun pada tahun 1927 itu.

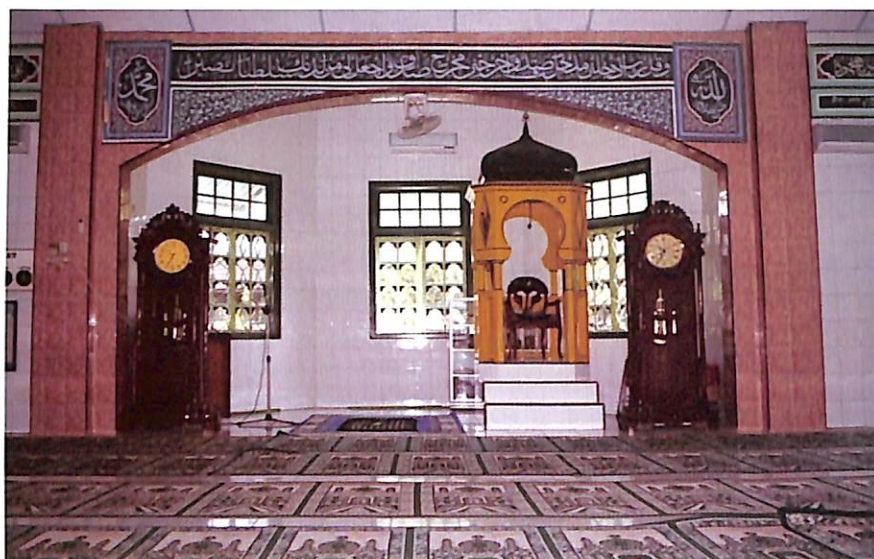
Dalam konteks konsep/gagasan tentang re/dekonstruksi simbol dan simbolisme, Mesjid Besar Kota Pinang adalah representasi sejarah Kota Pinang selain tatengger yang dibangun untuk mengenang serbuan pejuang Republik atas markas tentara Belanda di Simpang Tiga Kota Pinang. Penetapan representasi simbolik ini bukan saja karena mesjid ini menjadi satu-satunya objek sejarah yang masih tersisa namun lebih disebabkan oleh pandangan sejarah masyarakat yang telah memandang mesjid ini sebagai simbol yang menautkan setiap individu, kelompok-kelompok masyarakat dan lingkungan sosialnya dengan masa lalu mereka. Pandangan ini, seperti pemaparan Mesjid Raya Tanjung Pasir Kualuh merupakan cerminan dari kesadaran sejarah masyarakat yang sebelum era reformasi 'dipaksa' untuk memandang sejarah secara makro sehingga masyarakat cenderung melihat masa lalu Kota Pinang sebagai romantisme.

Dibanding tujuh mesjid bersejarah lain di Asahan dan Labuhan Batu yang didokumentasikan dalam pemetaan ini, Mesjid Besar Kota Pinang termasuk mesjid yang 'paling beruntung nasibnya'. Mesjid ini bukan sekedar masih dimanfaatkan secara luas namun masih dipelihara dengan baik. Tidak satupun mesjid dalam pemetaan ini yang menggunakan penyejuk udara (*air conditioner*) di dalam ruangan utamanya

selain Mesjid Besar Kota Pinang. Penggunaan sejumlah penyejuk udara yang memang diperuntukkan bagi kenyamanan jama'ah mesjid atau orang yang singgah untuk sekedar menunaikan ibadah tidak dapat dilepaskan dari usaha Badan Kenaziran Mesjid Besar Kota Pinang. 'Agar jama'ah dapat menjalankan ibadah dengan nyaman'⁴² begitu alasan Ketua Badan Kenaziran Mesjid Besar Kota Pinang yang mengelola mesjid dan kompleks makam yang terletak di sebelah Barat mesjid itu.

Dari Jalan Lintas Sumatera di Kota Pinang mesjid yang didominasi warna hijau tua dan putih ini hanya berjarak 1-1,5 kilometer. Tidak terlalu jauh namun jika tidak bertanya agak sulit juga mencari mesjid yang gerbang utamanya membelakangi jalan lintaspenghubung Kota Pinang dengan Bagan Batu itu. Jalan protokol yang sempit dengan persimpangan yang menunjukkan kawasan istana dan mesjid itu telah ditata dengan baik seringkali membuat orientasi menuju Mesjid Besar Kota Pinang ini bergeser. Kantor Telkom berikut menara telekomunikasi yang berwarna merah-putih menjadi titik orientasi yang paling mudah untuk mencapai mesjid yang melanjutkan tradisi lama dengan tetap mempertahankan 'mengambil' imam dari Besilam, sebuah kampung persulukan dekat Tanjung Pura di Kabupaten Langkat.

Mesjid Besar Kota Pinang dibangun oleh Yang Dipertuan Ma'mur Tengku Musthafa Perkasa Alamsyah atau biasa pula disebut Sultan Musthafa. Jika dipandang sepintas, mesjid ini lebih mirip rumah tinggal apabila tidak ada kubah bertingkat yang menjadi titik tengah mesjid. Serambi bertiang kayu yang mengitari hampir seluruh bangunan mesjid kecuali di bagian luar dinding mihrab menambah kesan seperti rumah tinggal, ditambah lagi bentuk daun pintu dan jendela yang tergolong biasa untuk kelas sebuah mesjid kerajaan. Kesan itu akan langsung hilang ketika memasuki ruangan utama Mesjid Besar Kota Pinang. Sebuah mimbar kayu berwarna kuning dengan kubah hijau tua yang didirikan di atas tiga undakan menghilangkan semua kesan tentang rumah itu. Dua buah jam bandul berukuran besar di sebelah kiri dan kanan mimbar menghadirkan suasana klasik pada bagian itu.



Gambar 33: Mihrab dan mimbar Mesjid Besar Kota Pinang
(Foto: Nasrul Hamdani & Muhammad Affan)

Sebuah tangga bercat putih menghubungkan ruang utama di dalam mesjid dengan sebuah ruang kecil tempat sebuah kentong kayu digantungkan di dalam kubah. Kentong kayu dari masa Sultan Musthafa setinggi 120 centimeter itu memang sudah lama tidak digunakan lagi namun tetap diletakkan di tempat semula untuk mempertahankan ciri dan keaslian mesjid yang telah beberapa kali direnovasi. Bagian-bagian mesjid yang direnovasi antara lain ialah, lantai dan dinding yang kini dilapisi keramik. Pada beberapa bagian dinding dan pilar mesjid diletakkan panel-panel kaligrafi sebagai hiasan. Tiga tingkat undak mimbar telah dilapisi keramik putih sedangkan mimbarnya dicat ulang sebagaimana warna sebelumnya. Badan Kenaziran Mesjid Besar Kota Pinang berusaha mempertahankan keaslian mesjid ini meskipun diakui sulit memeliharanya.⁴³

Denah Mesjid Besar Kota Pinang ini ialah persegi panjang dan terlihat jelas jika ditinjau dari dalam namun jika melihat bentuk atapnya yang bersegi banyak maka denah atau

penampang mesjid ini justru menyerupai tanda plus (+). Di bagian luar tidak ada perubahan besar. Parit kecil penampungalir air hujan yang jatuh dari atap seng bergelombang yang berbentuk limas di sekeliling mesjid disebutkan masih seperti sediakala. Antara dinding mesjid dengan parit itu dipisahkan oleh lantai semen kira-kira selebar satu meter. Dinding serambi yang menjadi pembatas antara mesjid dengan pekarangan dibangun berukuran 'setengah batu' (kira-kira setinggi 50 centimeter) dan berhiaskan spesi atau susunan acak kerikil kecil berwarna coklat mengkilap masih pun terlihat demikian. Kayu penopang atap serambi masih kayu yang sama ketika mesjid itu dibangun 84 tahun yang lalu.

Kubah Mesjid Besar Kota Pinang tergolong unik, karena mirip kubah menara Mesjid Lama Tanjung Medan yang seperti topi zirah tentara Mongol atau tentara tradisional lain di Asia Timur namun lebih besar ukurannya. Kubah bersegi delapan yang berwarna hitam ini ditopang oleh dua ruangan bersegi delapan yang memiliki banyak jendela (lihat gambar 22). Ruangan yang persis di bawah kubah, kira-kira berukuran 12 meter persegi seperti telah disebut sebelum ini adalah tempat kentong kayu digantungkan (lihat gambar 25). Ruang di bawahnya yang juga bersegi delapan merupakan bagian dari ruang yang sama. Di ruang bawah inilah sebuah pintu dengan bukaan vertikal dipasang untuk menghindari guguran debu dari ruang kubah yang memang penuh dengan debu sekaligus menutup akses orang-orang yang tidak berkepentingan dari bawah ke atas.

Sejak Revolusi Sosial 1946 hingga tahun 1990-an, Mesjid Besar Kota Pinang merupakan satu-satunya mesjid yang ada. Oleh karena itu semua kegiatan keagamaan di Kota Pinang dipusatkan di mesjid ini bahkan Mesjid Besar ini menjadi wadah yang menyatukan 'Kaum Tua' dan 'Kaum Muda' yang selalu berseberangan karena masalah *khilafiyah* sampai kini. Kenangan tentang 'kerukunan' golongan yang disebut 'Kaum Tua' yang diwakili oleh al-Jam'iyatul al-Washliyah serta Nahdlatul Ulama (NU) yang dibawa perantau Mandailing serta 'Kaum Muda' yang

direpresentasikan oleh Muhammadiyah dan dibawa perantau Minangkabau serta etnis Sipirok-Angkola dapat diceritakan dengan baik oleh warga emas di Kota Pinang.



Gambar 34: Tangga menuju ruang di bawah kubah (kiri) Kentong kayu di ruangan di bawah kubah Mesjid Besar Kota Pinang (kanan)
(Foto: Nasrul Hamdani & Muhammad Affan)

Sebelum al-Washliyah, warga Nahdliyin NU dan Muhammadiyah memiliki mesjid sendiri, warga ketiga organisasi keagamaan itu secara bersama-sama menunaikan ibadah dan kegiatan di mesjid ini. Pada bulan Ramadhan, meskipun sholat Tarawih dilaksanakan dengan cara 'Kaum Tua';

ada seruan bilal di antara raka'at tarawih, raka'at seluruhnya berjumlah 23, doa serta tahlil di akhir sholat, warga Muhammadiyah tetap mengikuti tarawih berjama'ah hingga raka'at ke delapan. Warga Muhammadiyah memilih menutup tarawih mereka dengan melakukan sholat witir di rumah. Hal ini berlangsung tanpa pernah menimbulkan masalah justru sejumlah masalah yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial yang dialami umat Islam dapat diselesaikan secara bersama-sama.⁴⁴

Pada tahun 1990-an, sebuah mesjid baru dibangun di Kota Pinang. Mesjid yang dibangun warga NU itu terletak kira-kira lima kilometer dari Mesjid Besar Kota Pinang. Pada awal berdiri, jama'ah mesjid baru itu tetap menunaikan ibadah Jum'at, sholat Idul Fitri dan Idul Adha di Mesjid Besar Kota Pinang. Seiring dengan penambahan penduduk akibat yang berdampak pada daya tampung, kini warga Kota Pinang mempunyai pilihan untuk menunaikan tarawih dan ibadah jama'ah lain pada dua mesjid yang telah berdiri. Pejabat kecamatan Kota Pinang yang kini daerahnya itu telah dijadikan ibukota Kabupaten Labuhan Batu Selatan menetapkan Mesjid Besar Kota Pinang sebagai mesjid kabupaten. Ini menandakan seluruh kegiatan keagamaan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan, mulai dari Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) hingga sholat ied diselenggarakan di Mesjid Besar Kota Pinang.

Hal ini menimbulkan wacana tentang penggantian nama 'Besar' yang disandang Mesjid Besar Kota Pinang dengan 'Agung' yang merupakan nama umum bagi mesjid kabupaten. Wacana ini telah berkembang namun sejauh ini belum ada ketetapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan tentang status mesjid ini. Merujuk pada penetapan Kota Pinang sebagai ibukota kabupaten, keinginan menjadikan Mesjid Besar Kota Pinang menjadi Mesjid Agung Kota Pinang bukanlah sesuatu yang sulit dicapai. Jika melihat mesjid-mesjid yang dikelola oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota, 'Agung' menjadi nama umum yang disandang mesjid-mesjid yang

didanai oleh pemerintah setempat, seperti Mesjid Agung Rantau Prapat yang menjadi mesjid Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu atau Mesjid Agung Kisaran yang menjadi mesjid Pemerintah Kabupaten Asahan.

Kini, Mesjid Besar Kota Pinang yang dirawat dengan baik itu tengah menunggu perubahan itu. Secara psikis perubahan itu akan sangat berarti bagi warga Kota Pinang karena sejarah mesjid yang memiliki bangunan mihrab bersegi lima ini berkaitan dengan perubahan dan kesinambungan sosial di Kota Pinang. Hal yang paling penting dalam perubahan status 'Besar' menjadi 'Agung' ini ialah penguatan fungsi mesjid, sebagaimana yang didengungkan oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Indonesia, mesjid harus menjadi pusat kegiatan sosial umat Islam. Demikian pula Mesjid Besar Kota Pinang, jika di masa lalu mesjid ini menjadi tempat berhimpun 'Kaum Tua' dan 'Kaum Muda' maka sebelum statusnya diubah mesjid ini harus menjadi media penguatan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat Muslim di kota yang tengah membangun itu.

Seperti mesjid peninggalan kerajaan Melayu lain, terdapat satu bagian dari tapak kompleks mesjid yang diperuntukkan untuk pemakaman raja dan kerabat diraja Kota Pinang. Di sini jenazah Yang Dipertuan Ma'mur Tengku Musthafa Perkasa Alamsyah dimakamkan beserta sejumlah besar kerabat diraja Kota Pinang yang menjadi korban Revolusi Sosial. Makam para bangsawan yang ditandai oleh ikatan kain berwarna kuning ini masih sering diziarahi orang-orang yang mungkin memiliki ikatan emosional dengan sosok yang jasadnya dimakamkan di tempat ini. Ketika pemetaan ini dijalankan, sepasang suami isteri berusia lanjut terlihat tengah khushuk memanjatkan doa di makam Sultan Mustafa. Beberapa makam yang nisannya dibungkus kain kuning dan sebuah makam yang dinaungi payung kertas serta masih terlihat baru juga turut pula mereka ziarahi.

Terlepas dari siapa yang diziarahi, perubahan status 'Besar' menjadi 'Agung' akan berpengaruh pada makam kerabat

diraja Kota Pinang dan bangsawan keturunan Kota Pinang yang disebutkan tidak banyak lagi yang menetap di tanah leluhur mereka itu terutama sejak revolusi sosial berkecamuk. Secara morfologis jika mengikuti tata ruang mesjid-mesjid baru, tidak pernah ada areal pemakaman di kompleks mesjid agung bahkan berdasarkan pengalaman, tidak pernah ada pemakaman di lingkungan mesjid-mesjid resmi bagi pemerintah setempat yang umumnya dibangun sejak tahun 1950-an. Selain itu, terdapat pula kecenderungan bahwa mesjid lama yang memiliki nilai sejarah/budaya tetap dipelihara sebagai cagar budaya, untuk memenuhi kebutuhan akan mesjid pemerintah membangun mesjid baru yang terletak agak jauh dari mesjid lama itu. Hal ini berlangsung di Medan, ada Mesjid Agung Medan selain Mesjid Raya al-Mashun di Kota Ma'shum.



Gambar 35: Sebagian makam kerabat diraja Kota Pinang di kompleks Mesjid Besar Kota Pinang
(Foto: Nasrul Hamdani & Muhammad Affan)



Gambar 36: Masjid Agung Rantau Prapat - Rantau Utara, Labuhan Batu
(Foto: Nasrul Hamdani & Muhammad Affan)

KISAH DUA MESJID AGUNG: MESJID AGUNG RANTAU PRAPAT DAN MESJID AGUNG KISARAN

Mesjid Agung Rantau Prapat dan Mesjid Agung Kisaran dipisahkan oleh jarak sejauh 3,5 jam perjalanan darat namun kedua mesjid yang menyandang status 'Agung' ini memiliki kedudukan yang sama. Mesjid Agung Rantau Prapat menjadi mesjid resmi tempat Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu yang beribukota di Rantau Prapat menggelar Peringatan Hari Besar Islam, dua sholat Ied setiap tahun. Fungsi demikian juga diemban oleh Mesjid Agung Kisaran yang menjadi mesjid resmi Pemerintah Kabupaten Asahan. Kedudukan 'Agung' ini membuat kedua mesjid itu memiliki kesamaan nasib, cerita dan

kecenderungan meskipun akar kesejarahan dua mesjid yang telah menjadi mercu tanda religiusitas pemerintah dan masyarakat di masing-masing kota ini berbeda.

Usia Mesjid Agung Rantau Prapat terpaut lebih dari dua dasawarsa jika dibandingkan dengan usia Mesjid Agung Kisaran. Mesjid Agung Rantau Prapat dibangun Sultan Bilah terakhir, Tengku Adil Bidar Alamsyah pada tahun 1935 di atas tanah yang diwakafkan atas nama dirinya.⁴⁵ Mesjid ini merupakan mesjid kerajaan kedua yang dibangun oleh Sultan Bilah, mesjid pertama terletak di ibukota Bilah, Negeri Lama yang terletak kira-kira 70 kilometer ke arah Selatan Rantau Prapat. Mesjid kerajaan Bilah kedua dibangun di Rantau Prapat ibukota *onderafdeeling* Labuhan Batu yang diperintah oleh seorang *controleur*, pejabat pemerintah kolonial kira-kira setingkat camat dengan wewenang yang lebih luas. Pembangunan mesjid di Rantau Prapat ini merupakan usaha menegaskan kedudukan politik Kesultanan Negeri Bilah di hadapan kawula Bilah di Rantau Prapat sekaligus menguatkan posisi tawar negeri itu dengan pemerintah.

Pembangunan mesjid di luar pusat kekuasaan kerajaan seperti ini juga dilakukan Sultan Sulaiman Shariful Alamsyah dari Serdang. Sultan Serdang terakhir ini membangun Mesjid Raya Sulaimaniyah di tempat kelahirannya, Pantai Cermin meskipun sebuah mesjid dengan nama yang sama telah didirikan di ibukota kerajaannya, Perbaungan. Alasan Sultan Sulaiman ketika itu ialah memberikan mesjid yang pantas bagi kawula Serdang di Pantai Cermin.⁴⁶ Sultan Ma'mun al-Rasyid dari Deli pun melakukan demikian, hanya saja pembangunan Mesjid Raya al-Mashun itu menjadi alasan sampingan untuk memindahkan ibukota Deli dari Labuhan ke Medan yang sedang berkembang pesat sebagai kota perkebunan terkemuka di dunia.

Sejumlah alasan dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa Sultan-sultan Melayu di Sumatera Timur membangun mesjid ataupun istana di kota yang menjadi kedudukan pejabat kolonial atau di kota yang sedang berkembang pesat. Selain alasan politik, alasan-alasan yang bersifat praktis kemudahan akses, kedekatan dengan pusat administrasi, pusat ekonomi,

sarana dan prasarana yang baik hingga keamanan dianggap lebih terjamin sering menjadi dasar pembangunan mesjid, istana bahkan pemindahan ibukota. Bilah memang tidak memindahkan pusat administrasinya ke Rantau Prapat namun pembangunan mesjid lebih disebabkan oleh ketiadaan representasi Bilah di kota yang merupakan batas Selatan sebuah kawasan perkebunan yang dinamai *Cultuurgebied* yang berarti sabuk perkebunan Sumatera.

Biaya pembangunan Mesjid Agung Rantau Prapat ditanggung kas Sultan Bilah yang diambil dari dana sisa pajak daerah itu.⁴⁷ Sisa pajak yang dimaksud ialah kutipan pajak dari penjualan hasil perkebunan yang diterima Sultan Bilah dalam jangka waktu yang tidak diketahui secara pasti. Sisa pajak yang dikumpulkan Sultan Adil dari Bilah kemungkinan berasal dari pajak hasil penjualan komoditas perkebunan (terutama karet dari jenis *Hevea brasiliensis* yang produktif dan kelapa sawit yang mulai mendatangkan hasil) yang mulai pulih dari deraan *economische maleisch* yang *diplesetkan* menjadi ekonomi meleset atau sisa pajak (*belasting*) untuk individu yang diberlakukan pemerintah kolonial untuk menutupi kekurangan kas negeri sekaligus (meskipun tersamar) mencari tenaga rodi.

Seperti telah disinggung dalam pemaparan Mesjid Lama Tanjung Medan, penetapan dan penarikan pajak (*belasting*) telah menimbulkan gejolak sosial terutama antara (lembaga termasuk petugas pemungut pajak) pemungut pajak dengan orang-orang yang kena pajak. Sejumlah daerah-daerah di Kesultanan Negeri Bilah sempat mengalami masalah pajak akibat penolakan warga Bilah sampai muncul larangan bepergian ke luar daerah. Dengan keadaan itu, terdapat kemungkinan bahwa salah satu alasan pembangunan Mesjid Agung Rantau Prapat yang indah itu ialah untuk meredam perlawanan yang mulai muncul sekaligus menarik simpati warga Bilah di Rantau Prapat yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak akibat penetapan skema *belasting* baru itu.

Masalah yang timbul akibat penetapan *belasting* pada tahun 1930-an ini dibangkitkan kembali sehingga menjadi salah

satu materi agitasi paling efektif untuk menggerakkan massa hingga pecahnya Revolusi Sosial 1946. Pembunuhan Sultan Muhammadsyah dari Kualuh, Sultan Musthafa dari Kota Pinang serta sejumlah besar bangsawan tinggi (meskipun sebagian dari mereka adalah pejabat Republik) di Sumatera Timur dipicu oleh sentimen dari masa lalu ini yang dibangkitkan secara emosional. Inilah alasan penting mengapa Revolusi Sosial itu digolongkan sebagai amuk massa sehingga Mohammad Said merasa perlu untuk memberikan suatu pandangan mengenai revolusi itu dalam sebuah artikel setebal 43 halaman. Artikel yang masih dirujuk hingga kini itu bertajuk 'Apa Itu Revolusi Sosial?'.⁴⁸

Di luar kemungkinan yang dapat dipakai untuk memahami perubahan dan kesinambungan sosial yang tersimpan pada kisah-kisah tentang Mesjid Agung Rantau Prapat ini, mesjid yang dibangun di atas tanah seluas 3,984,5 meter persegi ini telah menjadi bagian penting dalam sejarah kota Rantau Prapat. Kota yang menjadi perhentian terakhir kereta api dari Medan ini lebih dahulu dikenal sebagai kota perkebunan. Tidak ada mercu tanda yang menjadi simbol kota selain bangunan-bangunan kolonial dalam suatu ruang yang ditata dengan perencanaan matang. Pembangunan Mesjid Agung Rantau Prapat yang dicat kuning terang, hijau tua dan putih menghasilkan kombinasi yang menarik sekaligus meretas *pakem* warna bangunan kolonial yang umumnya dicat putih dengan pilar-pilar bata, kolom-kolom yang besar dan atap genteng semen berwarna gelap.

Berbeda dengan Mesjid Agung Kisaran. Mesjid bersejarah yang paling muda usianya di antara mesjid-mesjid yang dipetakan ini dibangun tahun 1950-an. Tidak diketahui kapan angka pasti pembangunan mesjid yang terletak di antara jejeran rumah toko (*ruko*) di tengah kota Kisaran namun terdapat sejumlah keterangan dan bukti fisik yang menyatakan mesjid ini telah direnovasi beberapa kali. Ditinjau dari bentuk bangunan yang menerapkan lengkungan-lengkungan pada teras depan, bentuk mimbar, penggunaan ornamen khas seperti yang terlihat pada ornamen Mesjid Raya Sultan Ahmadsyah Tanjung Balai,

Mesjid Raya Tanjung Pasir di Kualuh atau Mesjid Lama Tanjung Medan, Mesjid Agung Kisaran ini merupakan mesjid Melayu tipikal yang dicirikan dengan kubah yang besar.

Di masa lalu, Kisaran merupakan ibukota *afdeeling* Asahan yang membawahi sejumlah kerajaan termasuk Tanjung Balai ibukota Kesultanan Negeri Asahan sebelum kota di muara sungai itu dinaiktarafkan menjadi *gemeente*. Mengenai Mesjid Agung Kisaran tidak ditemukan keterangan lebih rinci mengenai mesjid yang dikelola masyarakat melalui Badan Kemakmuran Mesjid Agung ini, apakah mesjid yang memiliki empat menara ini merupakan mesjid yang dibangun Sultan Asahan sebagai representasi kerajaan itu di Kisaran atau mesjid umat yang dibangun dengan meniru/mengadaptasi corak mesjid lama yang dibangun raja-raja Melayu Sumatera Timur. Tidak ada keterangan namun penerapan *dak* beton sebagai atap menunjukkan mesjid ini bukan berasal dari masa ketika mesjid-mesjid kerajaan didirikan.

Seperti lingkungan yang mengitari Mesjid Raya Sultan Ahmadsyah Tanjung Balai, lingkungan Mesjid Agung Kisaran pun tidak menunjukkan lingkungan yang didominasi komunitas Islam. Jejeran rumah toko yang berfungsi ganda sebagai rumah dan kedai berkembang memanjang mengikuti jalan protokol kota itu sudah menandakan bahwa yang menempati kawasan itu adalah etnik Tionghoa. Keadaan ini merupakan kecenderungan yang sudah umum berlangsung pada masyarakat asli yang kian mundur ke pinggiran kota. Tanah dan rumah warisan yang terletak di tengah kota secara perlahan berpindah tangan. Pengalihan hak atas kepemilikan rumah dan tanah milik penduduk asli itu berdampak pada mesjid yang kian terjepit oleh rumah toko yang memang dibangun untuk kepentingan fungsional.

Mesjid yang kini terlihat sempit karena seperti terhimpit jejeran rumah toko, penambahan bangunan baru serta penutupan pekarangan dengan panel keramik ini masih menjadi mesjid utama di Kisaran. Terdapat sejumlah mesjid lain di kota yang salah satu kampungnya, Bunut pernah dikenal sebagai

penghasil sepatu kulit buatan tangan terbaik namun status 'Agung' yang disandang mesjid ini ditambah posisinya menjadi kekuatan untuk dapat terus melangsungkan kegiatan-kegiatan keagamaan secara resmi. Kota Kisaran yang kosmopolitan namun masih terikat pada 'tradisi' perkebunan yang kuat telah menjadikan mesjid yang terletak di jalan Imam Bonjol ini sebagai simbol religiositas komunitas Muslim di kota itu.



Gambar 37: Mesjid Agung Kisaran - Asahan
(Foto: Nasrul Hamdani & Muhammad Affan)

¹ Mengenai budaya campuran yang dinamai *Indis*, baca Djoko Soekiman, *Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa Abad XVIII - Medio Abad XX*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, Yayasan Adhikarya Foundation dan The Ford Foundation, 2000.

² Tengku Alexander, *Wawancara* (Tanjung Balai), 26 Juni 2011.

³ Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai No. 4/1999 tanggal 9 Agustus 1999 dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 88-342-49/1999 tanggal 28 September 1999 nama Lapangan Pasir diubah menjadi Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmatsyah bersamaan dengan itu RSUD Tanjung Balai pun dinamai RSUD Dr. Tengku Mansyur, Tanjung Balai.

⁴ Tuanku Luckman Sinar Basarshah II, *Kronik Mahkota Kesultanan Serdang*, Medan: Perwira, 2007, hlm. 26.

⁵ Tengku H.M. Lah Husny, *Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Penduduk Melayu Sumatera Timur 1612-1950*, Jakarta: Departemen Pendidikan & Kebudayaan, Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1976, hlm. 108-109.

⁶ Beberapa sumber menyebut nama Yang Dipertuan Kualuh-Leidong yang diangkat menjadi Sultan Asahan (1868-1882) ini adalah Tengku Na'amalullah atau Tengku Abdullah Na'amalullah Syah Bin Raja Muhammad Ishak (Yang Dipertuan Kualuh I).

⁷ Tengku Ferry Bustamam, *Bunga Rampai Kesultanan Asahan*, Medan: Medan: t.p., 2003, hlm. 44 dan 46.

⁸ Anthony Reid, *Asal Mula Konflik Aceh: Dari Perebutan Pantai Timur Sumatera hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005, hlm. 45-48. Tengku Luckman Sinar, *Perang Sunggal 1872-1895*, Medan: Perwira, 1996.

⁹ Baca Ratna, 'Birokrasi Kerajaan Melayu di Sumatera Timur pada Abad XIX', Yogyakarta: Tesis Universitas Gadjah Mada, 1990.

¹⁰ Anthony Reid, *Perjuangan Rakyat, Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987, hlm. 108-109.

¹¹ Anthony Reid, *Ibid.*, hlm. 87-89. Mengenai pengaruh perkebunan tembakau pada kerajaan baca juga Fatimah, 'Pengaruh Sosial Ekonomi Perkebunan Tembakau Terhadap Masyarakat di Sumatera Timur 1863-1900', Yogyakarta: Tesis Universitas Gadjah Mada, 1985.

¹² Serangan atas Serdang ini baca Tengku Luckman Basarshah II, *Op.Cit.*, hlm. 20-26.

¹³ Penggolongan dan penentuan usia nisan baca Suprayitno, 'Evidence of the Beginning of Islam in Sumatera: Study on Acehese Tombstone' dalam *Tawarikh* Vol. 2 No. 2 April 2011.

¹⁴ Samuel Hartono dan Handinoto, "Arsitektur Transisi' di Nusantara dari Akhir Abad 19 ke Awal Abad 20 (Studi Kasus Komplek Bangunan Militer di Jawa pada Peralihan Abad 19 ke 20)', *Makalah* dalam <http://fportfolio.petra.ac.id> (24 Agustus 2011).

375. ¹⁵ Tengku Ferry Bustamam, *Op.Cit.*, hlm. 73; Anthony Reid, *Op.Cit.*, hlm.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 79.

¹⁷ Edi Siahaan, *Wawancara* (Puluraja atau Pulo Rakyat), 30 Juni 2011.

¹⁸ Tengku Ferry Bustamam, *Op.Cit.*, hlm. 31-32.

¹⁹ Hasnan Nababan, *Wawancara* (Tanjung Pasir), 29 Juni 2011.

²⁰ Nasir Sagala dan Anas Tambunan, *Wawancara* (Gunting Saga), 28 Juni 2011.

²¹ Usman Pelly, *Urbanisasi dan Adaptasi: Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing*, Jakarta: LP3ES, 1994.

²² Mengenai pengistilahan Batak dan Melayu ini baca Daniel Perret, *Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut*, Jakarta: Gramedia-EFEO, 2010.

²³ Hasnan Nababan, *Wawancara Berkelompok* (Tanjung Pasir), 29 Juni 2011.

²⁴ Abdul Mukhtar Pohan dan Hasnan Nababan, *Wawancara Berkelompok* (Tanjung Pasir), 29 Juni 2011.

²⁵ Anthony Reid, *Op.Cit.*, hlm. 100.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 95.

²⁷ Hasnan Nababan, *Wawancara Berkelompok* (Tanjung Pasir), 29 Juni 2011.

²⁸ Anthony Reid, *Op.Cit.*, hlm. 376.

²⁹ Nasir Sagala, *Wawancara* (Gunting Saga), 30 Juni 2011.

³⁰ Lihat deskripsi Edi Sumarno, 'Munduranya Kota Pelabuhan Tradisional di Sumatera Timur pada Periode Kolonial' dalam *Historisme* No. 22/XI/Agustus 2006. Mengenai perkembangan jalur kereta api di Sumatera Timur baca Indera, 'Pertumbuhan dan Perkembangan Deli Spoorweg Maatschappij di Sumatera Timur 1883-1940', Jakarta: Tesis Universitas Indonesia, 1996.

³¹ Tengku H.M. Lah Husny, *Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Penduduk Melayu Sumatera Timur 1612-1950*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1976, hlm. 10.

³² Anthony Reid, *Op.Cit.*, hlm. 375 dan 398.

³³ *Ibid.*, hlm. 375-376.

³⁴ A.A. Navis, *Surat dan Kenangan Huji*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994, hlm. 21-27.

³⁵ Waspada, 5-6 September 2011.

³⁶ Ali Ramtani Siregar, *Wawancara* (Kampung Rakyat), 30 Juni 2011.

³⁷ Ali Ramtani Siregar, *Wawancara* (Kampung Rakyat), 30 Juni 2011.

³⁸ Ali Ramtani Siregar, *Wawancara* (Kampung Rakyat), 30 Juni 2011.

³⁹ Tengku Ferry Bustamam, *Bunga Rampai Kesultanan Asahan*, Medan: Medan: t.p., 2003, hlm. 7.

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 7-9.

⁴¹ Baca Anthony Reid, *Southeast Asia in Age of Commerce 1450- 1680*. Vol.1: *The Lands below the Winds*, New Haven: Yale University Press, 1988.

⁴² Saidi Siregar, *Wawancara* (Kota Pinang), 28 Juni 2011.

⁴³ Saidi Siregar, *Wawancara* (Kota Pinang), 28 Juni 2011.

⁴⁴ Saidi Siregar, *Wawancara* (Kota Pinang), 28 Juni 2011.

⁴⁵ Mutia Dalimunte dan Anas Alimin, *Wawancara* (Rantau Prapat), 27 Juni 2011.

⁴⁶ Ratna et.al., 'Pengentas dari Serdang: Kisah Karya dan Cita-cita Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah 1865-1946' Medan: Naskah Buku (dalam penerbitan), 2010.

⁴⁷ Sri Hartini (Ed.), *Perekaman Peninggalan Sejarah Budaya Islam di Sumatera Utara*, Medan: Museum Negeri Sumatera Utara, 2010, hlm. 45.

⁴⁸ Artikel ini diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris oleh Benedict Anderson dan Toenggoel Siagian lalu diterbitkan dalam sebuah jurnal dengan judul 'What was the "Social Revolution of 1946" in East Sumatra?

4

CATATAN PENUTUP

Hubungan mesjid dengan umat Islam merupakan integritas dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, sebagai daerah yang dijuluki Serambi Mekkah, di Aceh banyak dijumpai mesjid, baik sekarang maupun dahulu. Pada zaman dahulu, mesjid di Aceh memiliki ciri tersendiri, baik ditinjau dari segi perletakan, struktur bangunan, arsitektur, ragam hias, dan fungsi. Bangunannya didirikan di atas perletakan tanah yang menghadap kiblat dengan bahan bangunan yang terdiri atas material-material yang ada di sekitarnya, seperti batu gunung, tanah liat, kayu dan daun rumbia, serta atap berbentuk tumpang dan pelana. Pertumbuhan dan perkembangan mesjid di Aceh sejalan dengan proses penyiaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu, pembangunan mesjid di Aceh mengikuti pola perkembangan wilayah dan jumlah penduduk pada saat itu. Pendirian mesjid-mesjid tersebut merupakan inisiatif dari penguasa dan masyarakat setempat. Namun, tidak jarang bahwa pembangunan mesjid di Aceh merupakan swadaya dari masyarakat.

Masyarakat Aceh memandang mesjid sebagai pusat ibadah dan kebudayaan. Oleh karena itu, pembangunan mesjid tidak semata-mata dimaksudkan sebagai media pembangunan ruhani-spiritual, tetapi juga berperan sebagai sarana pembinaan umat, sebagai kelanjutan dari pembinaan individu. Di mesjid diadakan pembinaan kehidupan masyarakat secara konkrit, seperti pembinaan ekonomi, sosial budaya. Oleh karena itu, di Aceh mesjid selalu dibangun berdekatan dengan pusat pemerintahan, kegiatan ekonomi, dan perdagangan. Fungsi sosial mesjid di Aceh yang paling fenomenal pada zaman dahulu adalah sebagai tempat menyusun taktik dan strategi perjuangan. Pada saat ini bangunan mesjid sudah menjadi bangunan yang lengkap dengan bagian-bagiannya; kubah, menara, tiang-tiang marmer, gapura, taman, air mancur, ornamen, dan sebagainya. Dalam satu

kompleks mesjid dapat berdiri bangunan sebagai lembaga pelayanan masyarakat, seperti balai pendidikan, perpustakaan, kesehatan, asrama, dan rumah sakit.

Pada awalnya bangunan mesjid di Aceh sangat sederhana. Mesjid merupakan sebuah lapangan yang batasnya berupa deretan rumah yang ada di sekitarnya. Bentuk asli mesjid tetap merupakan corak khas dengan adanya lapangan terbuka di bagian tengahnya. Pada zaman berikutnya terus mengalami perubahan dan penyempurnaan. Pemilihan material mesjid kuno di Aceh terkait dengan pola pembangunan lingkungan alam sekitarnya. Penggunaan daun rumbia sebagai atap menunjukkan adanya pola hubungan tersebut. Perkembangan selanjutnya, model mesjid di Aceh yang sudah dikenal di Nusantara banyak dijadikan sebagai model pembangunan mesjid lainnya di Indonesia. Pembangunan mesjid Muslim Pancasila, misalnya, mengambil contoh mesjid Aceh yang selama ini diakui sebagai mesjid para wali di Jawa. Dalam perkembangannya, peranan dan fungsi mesjid mengalami pasang surut. Hal itu, tentu tidak terlepas dari berbagai problem yang dihadapi mesjid.

Dari pengamatan tampaknya, mesjid-mesjid di Aceh telah mengalami perkembangan dalam berbagai aspek. Terjadinya perubahan bentuk dari pola tradisional ke pola modern yang bukan hanya mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga merupakan suatu proses yang mendasari pola pemikiran masyarakat sesuai dengan perkembangan budaya pada waktu itu. Mesjid kuno yang dibangun di Aceh merupakan bangunan *sakral* yang sesuai dengan perkembangan Islam dan juga mengadopsi budaya setempat. Dengan demikian, adanya suatu jalinan antara budaya Islam dan unsur-unsur budaya lokal di Aceh. Namun, dalam perkembangannya juga dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya luar. Sebagaimana lazimnya bahwa setiap perubahan akan membawa dampak yang luas dalam berbagai segi. Terjadinya perubahan pembangunan mesjid dari pola tradisional ke pola modern telah membawa dampak yang besar terhadap kelestarian bangunan mesjid itu sendiri. Kecuali

Mesjid Raya Baiturrahman, banyak mesjid kuno yang tidak difungsikan lagi sehingga terbengkalai begitu saja.

Pandangan masyarakat bahwa mesjid adalah rumah Allah tampaknya memiliki dampak kurang bertanggung jawabnya umat bagi pemeliharaan mesjid. Karena mesjid adalah rumah Allah maka tentulah Allah yang bertanggung jawab bagi kelangsungannya. Anggapan ini mengakibatkan masyarakat kurang peduli dengan mesjid, fenomena ini harus dirubah bahwa mesjid selain rumah Allah juga sebagai rumah kedua umat. Perubahan pandangan ini diharapkan supaya umat betah tinggal di mesjid dan sekaligus bertanggung jawab bagi kebersihan, keutuhan, dan pemberdayaan mesjid. Tidak adanya usaha yang maksimal dari pemerintah untuk menyelamatkan benda-benda peninggalan budaya dan sejarah bangsa. Demikian pula karena minimnya pengetahuan guru-guru tentang pentingnya peninggalan sejarah sebagai aset budaya bangsa sehingga banyak benda cagar budaya yang rusak dan tidak dilindungi.

Keberadaan mesjid-mesjid bersejarah di Aceh penting dijadikan sebagai sumber sejarah guna menggali dan mengenali kembali sejarah Aceh. Keberadaanya juga memberikan kontribusi bagi identitas dan ciri khas daerah. Untuk itu, hal pertama yang harus disepakati bahwa pembangunan mesjid yang paripurna dengan mengembalikan fungsi mesjid, yaitu terciptanya aktivitas umat yang Islami. Tujuan akhir yang diharapkan adalah untuk mencitakan dan meningkatkan kesalehan individu dan kesalehan sosial masyarakat. Hubungan sosial yang akan tercipta adalah hubungan sosial yang sesuai dengan tuntutan ajaran yang Islami, yaitu hubungan yang baik, silaturahmi, musyawarah yang semuanya berkonotasi ibadah. Karena itu, keberadaan mesjid harus menjadi tempat yang menyejukkan bukan sebaliknya menjadi tempat keresahan umat.

Berdasarkan potensi mesjid dan nilai strategisnya dalam membangun umat maka mesjid harus dimanfaatkan dengan memaksimalkan fungsinya. Namun, harus diperhatikan bahwa tujuan pembangunan mesjid adalah pembangunan kehidupan umat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemeliharaan terhadap

mesjid bersejarah tidak semata-mata sebagai upaya pelestarian terhadap keberadaan benda peninggalan sejarah. Namun, pelestarian tersebut tetap besar artinya terhadap warisan sejarah guna memupuk rasa nasionalisme dan kesadaran sejarah bagi masyarakat. Pemeliharaan dan perlindungan mesjid bersejarah bukan saja tugas pemerintah, melainkan tugas semua orang. Pemeliharaan bangunan bersejarah perlu terus dilakukan mengingat nilai kejuangan, kepeloporan, fungsi sosial, serta dapat memupuk semangat cinta tanah air dan kebersamaan.

Mesjid-mesjid bersejarah di Asahan dan Labuhan Batu memang tidak berkaitan dengan proses pengislaman awal. Namun kisah-kisah di balik mesjid yang menjadi 'pasangan' istana ini menggambarkan dinamika perkembangan Islam yang menjadi budaya dominan di Sumatera Timur setidaknya-tidaknya sampai berakhirnya perang kemerdekaan (1949). Oleh karena tidak memiliki kaitan langsung dengan perkembangan awal Islam, maka tiga pertanyaan mendasar mengenai (1) kapan Islam masuk, (2) siapa yang membawa dan (3) bagaimana pengislaman itu berlangsung tidak menjadi ranah yang disinggung. Selain tidak terkait secara langsung dengan pengislaman awal itu, usia mesjid-mesjid yang didokumentasikan -kecuali Mesjid Raya Sultan Ahmadsyah dan Jami' Puluraja (1900), kabupaten Asahan- tidak melebihi satu abad.

Seluruh mesjid yang dipetakan dalam laporan ini dibangun pada masa kolonial bahkan Mesjid Agung Kisaran dibangun sesudah kemerdekaan. Hal ini sesungguhnya menunjukkan sebuah kecenderungan bahwa kolonialisme memberi pengaruh signifikan dalam perkembangan Islam di Asahan dan Labuhan batu serta perkembangan corak dan arsitektur mesjid yang menjadi simbol Islam. Penerapan kolom-kolom besar seperti bangunan Eropa, dinding bata dan kubah besar berbagai rupa pada mesjid-mesjid bersejarah di dua kabupaten di atas, kecuali Mesjid Jami' di Puluraja yang mempertahankan atap bertingkat merupakan penanda penting untuk merekonstruksi ciri/corak bangunan Melayu sekaligus

memahami proses pepadupadanan ciri arsitektur Eropa yang menawarkan permanensi dan perubahan ciri bangunan Melayu lama yang cenderung bersifat fungsional.

Cita rasa, seni dan teknologi Eropa telah memberi ciri khas pada mesjid-mesjid yang kami petakan. Mesjid-mesjid permanen yang didirikan mulai sejak akhir abad ke-18, dari Mesjid Raya Sultan Ahmadsyah di Tanjung Balai hingga Mesjid Agung Rantau Prapat memiliki nilai estetik juga dikagumi secara teknik. Terlepas dari pandangan pesimistik yang menyoal peran Eropa atau kolonialisme dalam perkembangan bangunan mesjid dan perkembangan Islam sebagai dasar pembentukan sistem sosial, hampir tidak ada mesjid yang dipetakan tidak melibatkan jurutera Belanda dan/atau tukang bangunan Tionghoa yang dinilai berhasil menyerap kemampuan jurutera Eropa dalam merencanakan sekaligus menerjemahkan teknologi bangunan Eropa apa atau bagaimana yang dapat diadaptasi di daerah tropis.

Pengaruh Eropa itu menyentuh ruang-ruang sosial masyarakat Melayu namun keterikatan masyarakat Melayu pada sungai dan ruang hidup di pesisir pantai membuat tidak satupun mesjid bersejarah yang kami petakan dibangun jauh dari sungai. Mesjid Raya Sultan Ahmadsyah dibangun tidak jauh dari kuala Sungai Asahan. Demikian pula dengan Mesjid Jami' Puluraja yang terancam abrasi karena terletak di tebing tanah sungai Asahan yang kian curam. Mesjid Besar Kota Pinang, Mesjid Raya Tanjung Pasir di Kualuh, Mesjid Lama Tanjung Medan, Mesjid Raya Nurul Yaqin Gunting Saga dan Mesjid Agung Rantau Prapat dibangun tidak jauh dari sungai. Pergeseran tempat mungkin dapat berlangsung wajar akibat pengalihan jalur transportasi dari alur sungai ke jalan raya sehingga mempengaruhi orientasi tata ruang kota.

Mesjid-mesjid bersejarah yang kami petakan ini hampir seluruhnya dibangun para raja sehingga kisah tentang raja yang membangunnya melekat juga pada mesjid itu. Sebuah mesjid, Mesjid Raya Nurul Yaqin Gunting Saga dapat dipakai untuk menjelaskan hubungan antara pusat (*center*) dengan daerah-

daerah pinggiran (*peripheries*) meskipun dalam konteks tertentu pada masa tertentu pula sulit untuk merekonstruksi hubungan yang tetap terikat pada patronase Melayu. Pada Kabupaten Asahan dan Labuhan Batu, bentuk-bentuk patronase itu tersirat dalam sistem sosial yang mengakomodir 'orang Batak masuk Melayu', Batak masuk Jawi yang melahirkan satu golongan Melayu yang unik karena memiliki peran sejarah sekaligus kedudukan sosial yang penting di hadapan patron mereka, yaitu Batak Melayu.

Delapan mesjid bersejarah dalam laporan pemetaan ini merupakan representasi sosial yang memungkinkan untuk digunakan sebagai landasan merekonstruksi sejarah yang lebih luas. Kemungkinan-kemungkinan itu antara lain ialah merekonstruksi sejarah kota atau sejarah pedesaan, sejarah politik jika dikaitkan dengan motivasi yang melatari pendirian mesjid bahkan biografi. Hal ini memungkinkan karena mesjid-mesjid bersejarah yang telah disebut di atas merupakan penaut kenangan masyarakat dengan masa lalunya. Oleh karena itu, selain menyiratkan jejak perubahan dan kesinambungan sosial di kabupaten Asahan dan Labuhan Batu, mesjid-mesjid yang didirikan para raja Melayu ini tetap memiliki kedudukan penting bagi masyarakat di sekitar lingkungan mesjid, meskipun sejumlah cerita kelam menghiasi kisah tentang mesjid bersejarah pada dua kabupaten itu.

SENARAI BACAAN

Abdul Rochyn, *Sejarah Arsitektur Islam sebuah Tinjauan*, Bandung : Penerbit Angkasa, 1983

Achyar Zein, "Masjid di "mata" Tuhan (Introspeksi Keberadaan Masjid di Aceh Pasca Tsunami)", *Waspada* tanggal 7 Februari 2005.

Ajisman dan Almaizon, *Bangunan Bersejarah di Kabupaten Tanah Datar*, BKSNT Padang, 2004

Ali Hasjmy, *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah*, Jakarta : Beuna, 1983.

_____, *Semangat Merdeka, 70 Tahun Menempuh Jalan Pergolakan dan Perjuangan Kemerdekaan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1985.

_____, *Ulama Aceh Mujahid Pejuang Kemerdekaan dan Pembangunan Tamadun Bangsa*, Jakarta : Bulan Bintang, 1997.

Anderson, John, *Mission to the East Coast of Sumatra in MDCCXXIII*, London: William Blackwood, T. Cadel and Strand, 1826. (e-book)

Arabesk, BP3 Aceh: Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Mei 2002.

Avan, Alexander, *Parijs van Sumatra*, Medan: Rainmaker Publishing House, 2010.

Basarshah II, Tuanku Luckman Sinar, *Kronik Mahkota Kesultanan Serdang*, Medan: Perwira, 2002.

Bustamam, Tengku Ferry, *Bunga Rampai Kesultanan Asahan*, Medan: tanpa nama penerbit, 2003.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Mesjid Kuno di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Sejarah dan Purbakala, Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999.

Fatimah, 'Pengaruh Sosial Ekonomi Perkebunan Tembakau Terhadap Masyarakat di Sumatera Timur 1863-1900', Yogyakarta: Tesis Universitas Gadjah Mada, 1985,

Gazalba, Sidi, *Masjid, Pusat Ibadah Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka Indonesia, 1964.

Hakim, Lukmanul. *Persepsi Masyarakat terhadap Pemungsian Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Banda Aceh: PPISB, 2001.

Hamka, *Sejarah Islam di Sumatera*, Medan : Pustaka Nasional, 1950.

Harun Nasution dkk, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 1992.

Hartono, Samuel dan Handinoto, "Arsitektur Transisi' di Nusantara dari Akhir Abad 19 ke Awal Abad 20 (Studi Kasus Komplek Bangunan Militer di Jawa pada Peralihan Abad 19 ke 20)', *Makalah* dalam <http://fportfolio.petra.ac.id> (24 Agustus 2011)

Husny, Tengku H.M. Lah, *Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Penduduk Melayu Sumatera Timur 1612-1950*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek

Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1976,

Ibrahim Alfian, *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, Banda Aceh : Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1999.

Indera, 'Pertumbuhan dan Perkembangan Deli Spoorweg Maatschappij di Sumatera Timur 1883-1940', Jakarta: *Tesis Universitas Indonesia*, 1996.

Irchamuddin, Sukamto. *Masjid dan Masyarakat*. Banda Aceh: LP3IS, 1887.

Ismail, Nur, M. *Fungsi Masjid sebagai Wadah pembinaan Masyarakat*. Banda Aceh: LP3IS, 1996.

Madjid, Nur Cholis, *Kaki Langit Peradaban Islam*. Jakarta: Paramadina, 1997

Nasution, Amir Hasan. *Pemberdayaan Fungsi Meunasah sebagai wadah Kelembagaan Pendidikan Islam*. Banda Aceh: LP3IS, 1999/2000.

Juinboll, Th.W., *"Atjeh" The Encyclopaedia of Islam*, Volume 1, 1960.

Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara, *Inventarisasi dan Dokumentasi Peninggalan Sejarah dan Purbakala di Kabupaten Asahan 1995/1996*, Medan: Kanwil Depdikbud Sumut, 1996.

Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad, Jilid 1 dan 2*, Medan : Waspada, 1980.

Kompas, 22 Agustus 2011

Madjid, Nurcholis, *Kaki Langit Peradaban Islam*, Jakarta: Paramadina, 1997.

_____. *Dialog Keterbukaan: Artikulasi Nilai Islam dan Wacana Sosial Politik Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 1998.

Navis, A.A., *Surat dan Kenangan Haji*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Pelly, Usman *Urbanisasi dan Adaptasi, Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing*. Jakarta: LP3ES, 1994.

Pelzer, Karl J., *Toeang Kebon dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatera Timur 1863-1947*, Jakarta: Pustakan Sinar Harapan, 1985.

Perret, Daniel, *Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut*, Jakarta: Gramedia-EFEO, 2010.

Prima, Biro Sejarah, *Perjuangan Kemerdekaan dalam Wilayah Sumatera Utara: Medan Area Mengisi Proklamasi* (Jilid 1). Medan: Badan Musyawarah Pejuang Republik Indonesia Medan Area, 1976.

Puteh, Jakfar. *Peranan Imam Masjid dalam Membina Masyarakat di Kotamadya Banda Aceh*. Banda Aceh: LP3IS, 1995/1996.

_____. *Eksistensi Manajemen Masjid dalam Pembinaan Kegiatan Dakwah di Kecamatan Kuta Alam*. Banda Aceh: LP3IS.

Ratna, 'Labuhan Deli: Riwayatmu Dulu' dalam *Historisme* No. 22/XI/Agustus 2006.

- _____, 'Birokrasi Kerajaan Melayu di Sumatera Timur pada Abad XIX', Yogyakarta: Tesis Universitas Gadjah Mada, 1990.
- Reid, Anthony, *Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera*, Jakarta: Sinar Harapan, 1987.
- _____, *Asal Mula Konflik Aceh: Dari Perebutan Pantai Timur Sumatera hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Sinar, Tengku Luckman, *Perang Sunggal 1872-1895*, Medan: Perwira, 1996.
- Soedewo, Ery *et.al.*, *Perekaman Peninggalan Sejarah Budaya Islam di Sumatera Utara*, Medan: Museum Negeri Sumatera Utara, 2010.
- Sumarno, Edi, 'Mundurnya Kota Pelabuhan Tradisional di Sumatera Timur pada Periode Kolonial' dalam *Historisme* No. 22/XI/Agustus 2006.
- Suprayitno, 'Evidence of the Beginning of Islam in Sumatera: Study on Acehnese Tombstone' dalam *Tawarikh* Vol. 2 No. 2 April 2011.
- Syafwandi, "Konsep-konsep dasar Tentang Pelestarian Arsitektur Tradisional Aceh, dalam *Majalah Intim*, Jakarta : Intim, 1988.
- Tim Inventori Kota Tua Sumatera Utara 2010, *Naskah Inventori Kota-kota Tua Sumatera Utara*, Medan: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, 2010.

Tugiyono KS. Dkk., *Peninggalan Situs dan Bangunan Bercorak Islam di Indonesia*. Jakarta : Mutiara Sumber Widya, 2001.

Waspada 3 Mei 2005.

Waspada, 5-6 September 2011.

Wiryoprawiro, Zein. M., *Perkembangan Arsitektur Mesjid di Jawa Timur*, Surabaya : Bina Ilmu, 1986

Yulianto, Sumalyo, *Arsitektur Mesjid dan Monumen Sejarah Muslim*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006

Zein, Abdul Baqir, *Mesjid-mesjid Bersejarah di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

SENARAI INFORMAN

Abdul Mukhtar Pohan (80 tahun) - Sesepuh Tanjung Pasir - Tanjung Pasir, Kualuh Selatan, Labuhan Batu Utara.

Alexander, Haji Tengku (60 tahun) - Ketua Badan Kenaziran Mesjid Raya Sultan Ahmadsyah Tanjung Balai - Kota Tanjung Balai.

Ali Ramtani Siregar, Haji (68 tahun) - Penasihat Badan Kenaziran Mesjid Jami' atau Mesjid Lama Tanjung Medan, Labuhan Batu Selatan.

Amin Nasution (60 tahun) - Pengurus Mesjid Raya Tanjung Pasir - Tanjung Pasir, Kualuh Selatan, Labuhan Batu Utara.

Anas Alimin, Haji (67 tahun) - Mantan Pengurus Mesjid Agung Rantau Prapat, Labuhan Batu.

Anas Tambunan (60 tahun) - Imam Mesjid Nurul Yaqin Gunting Saga - Gunting Saga, Kualuh Selatan, Labuhan Batu Utara.

Edi Suwarno Siahaan (42 tahun) - Warga Pulo Raja, Asahan

Hasnan Nababan (70 tahun) - Pengurus Mesjid Raya Tanjung Pasir - Tanjung Pasir, Kualuh Selatan, Labuhan Batu Utara.

Muhammad Syukur (66 tahun) - Pengurus Mesjid Raya Tanjung Pasir - Tanjung Pasir, Kualuh Selatan, Labuhan Batu Utara.

Mutia Dalimunte, Hajjah - Kepala Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mesjid Agung Rantau Prapat, Labuhan Batu.

Nasir Sagala (57 tahun) - Nazir Mesjid Nurul Yaqin Gunting Saga - Gunting Saga, Kualuh Selatan, Labuhan Batu Utara.

Saidi Sinaga, Haji (63 tahun) - Ketua Badan Kenaziran Mesjid Besar Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan.